



**IMPLEMENTASI PROYEK PERUBAHAN
STRATEGI PENINGKATAN PENGAWASAN
MELALUI SISTEM MEDIASI MASALAH
DAN REHABILITASI PROFESI DI PROPAM
POLDA BALI**

DISUSUN OLEH:

AKBP NANANG PRIHASMOKO, S.T., S.H., M.H.

NOSIS: 20240707012338



**LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN POLRI
PUSAT PENDIDIKAN ADMINISTRASI**

**LAPORAN IMPLEMENTASI
PROYEK PERUBAHAN**

**STRATEGI PENINGKATAN PENGAWASAN
MELALUI SISTEM MEDIASI MASALAH DAN REHABILITASI
PROFESI DI PROPAM POLDA BALI**



Oleh :

NANANG PRI HASMOKO, S.T., S.H., M.H.

NOSIS: 20240707012338

**PESERTA PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TINGKAT II
ANGKATAN XXXI TAHUN 2024**

LEMBAR PERSETUJUAN

IMPLEMENTASI PROYEK PERUBAHAN

**STRATEGI PENINGKATAN PENGAWASAN
MELALUI SISTEM MEDIASI MASALAH DAN REHABILITASI PROFESI
DI PROPAM POLDA BALI**

Peserta:

**NANANG PRI HASMOKO, S.T., S.H., M.H.
NOSIS : 20240707012338**

Telah disetujui pada tanggal : 3 Desember 2024

Di Puskamin Lemdiklat Polri Bandung

Coach,



**GRACE K.D RAHAKBAU, SIK. MSi
AKBP NRP 76110038**

Mentor,



**I KETUT AGUS KUSMAYADI, SIK. SH
KOMBES POL NRP 74080669**

Formulir Penilaian Coach

**PENJELASAN COACH TENTANG
KEMAMPUAN PESERTA**


NAMA PESERTA PELATIHAN : NANANG PRI HASMOKO, ST. SH. MH.

NOSIS : 20240707012338

Saya menilai peserta Sangat Mampu / Mampu / Kurang Mampu / Tidak Mampu dalam melaksanakan Laporan Aksi Perubahan, dengan penjelasan sebagai berikut :

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Bandung, 28 November 2024



GRACE K.D. RAHAKBAU, S.I.K., M.Si.
AKBP NRP 76110038



**LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN POLRI
PUSAT PENDIDIKAN ADMINISTRASI**

Jalan Gedebage Selatan No. 157 Cisaranten Kidul Kec. Gedebage Kota Bandung

**FORMULIR PERSETUJUAN MENTOR
PADA TAHAP MEMBANGUN KOMITMEN BERSAMA**

Nama Peserta: NANANG PRI HASMOKO

Instansi : POLDA BALI

Area Perubahan Organisasi	Gagasan Inovatif
Bidang profesi dan Pengamanan {Propam} Polda Bali	Strategi Peningkatan Pengawasan Melalui Sistem Mediasi Masalah Dan Rehabilitasi Profesi Di Propam Polda Bali
Catatan dan Rekomendasi	

Desember, 1 Oktober 2024

Mentor

I KETUT AGUS KUSMAYADI, S.I.K., S.H.
KOMBES POL NRP 74080669

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat, karunia dan petunjuk-Nya penulis dapat menyelesaikan proyek perubahan yang berjudul “Strategi Penguatan Pengawasan Melalui Sistem Mediasi Masalah dan Rehabilitasi Profesi di Propam Polda Bali”.

Penyusunan Laporan Proyek Perubahan ini dapat terlaksana berkat bimbingan, pengarahan, sumbangan pikiran dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pihak- pihak sebagai berikut:

1. Kepala Kepolisian Daerah Bali Bapak IRJEN POL DANIEL ADITYAJAYA, S.H., S.I.K., M.Si.;
2. Wakil Kepala Kepolisian Daerah Bali Bapak BRIGJEN POL I KOMANG SANDI ARSANA, S.I.K., M.H.;
3. Kabid Propam Polda Bali KOMBES POL I KETUT AGUS KUSMAYADI, S.I.K., S.H. selaku Mentor;
4. Ibu AKBP GRACE K.D. RAHAKBAU, S.I.K., M.Si. selaku *Coach*;
5. Seluruh Pejabat Utama di lingkungan Polda Bali;
6. Tim Kerja Efektif Proyek Perubahan;
7. Pimpinan OMBUDSMAN RI Perwakilan Provinsi Bali;
8. KOMANDAN POLISI MILITER KODAM IX/UDAYANA;
9. Pimred Frekuensi Media Siber dan Ketua DPD Media Organisasi Siber Indonesia Provinsi Bali;
10. Rekan rekan seperjuangan PKN II Angkatan XXXII Tahun 2024 yang solid dan saling memberikan dukungan;
11. Istri dan anak-anak yang selalu memberikan dukungan dan semangat;
12. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah mendukung pelaksanaan proyek perubahan ini.

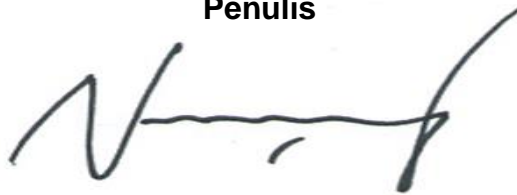
Penulis sangat menyadari sepenuhnya bahwa dalam Proyek Perubahan ini masih jauh dari sempurna, oleh karenanya penulis mengharapkan adanya masukan, kritik dan saran untuk kesempurnaan dalam pelaksanaannya dan semoga Proyek Perubahan ini ini dapat bermanfaat dan dapat menjadi salah satu sumber inspirasi

serta sumbangsih pemikiran bagi kemajuan organisasi Polri di masa yang akan datang ke arah yang lebih baik sehingga Polri semakin dipercaya dan dicintai oleh masyarakat.

Akhir kata, dengan segala harapan dan doa, semoga segala bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis dalam bentuk apapun akan mendapat balasan dan limpahan pahala, berkah serta kemuliaan dari Tuhan Yang Maha Esa.

Denpasar, 3 Desember 2024

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Nanang Pri Hasmoko', written in a cursive style.

AKBP NANANG PRI HASMOKO, S.T., S.H., M.H.

EXECUTIVE SUMMARY

Proyek perubahan ini merupakan harapan terwujudnya personel Polri yang Presisi melalui peningkatan pengawasan oleh Bidpropam Polda Bali guna memastikan bahwa pelaksanaan tugas telah dilaksanakan secara profesional, proporsional dan prosedural sehingga penyimpangan atau pelanggaran dalam pelaksanaan tugas dapat dicegah untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap Polri.

Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) Polda Bali bertugas membina dan melaksanakan pengamanan internal, penegakan disiplin, ketertiban dan pertanggungjawaban profesi di lingkungan Polda Bali termasuk pelayanan pengaduan masyarakat mengenai dugaan adanya penyimpangan tindakan oleh anggota Polri serta melaksanakan rehabilitasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Salah satu upaya atau strategi yang telah dilakukan oleh Bidpropam Polda Bali dalam mencegah atau meminimalisir adanya penyimpangan atau pelanggaran disiplin maupun etika Polri serta komplin dari masyarakat melalui strategi atau terobosan yang dilaksanakan oleh Subbagyanduan Bidpropam Polda Bali dengan program Sistem Mediasi Masalah untuk menekan jumlah pelanggaran dengan melakukan mediasi antara masyarakat dengan anggota Polri yang mendapat komplin dan terhadap anggota Polri yang pernah melakukan pelanggaran juga telah dilakukan pembinaan oleh Subbagrehabpers Bidpropam Polda Bali guna memulihkan atau merehabilitasi profesi dalam rangka pembinaan karier ke depannya sehingga diharapkan anggota Polri tersebut dapat meningkatkan disiplin dan etos kerjanya yang berdampak pada terwujudnya Polri yang Presisi.

Untuk mewujudkan hal tersebut, dalam proyek perubahan ini telah dilakukan penyusunan Standar Operasional Prosedur pelaksanaan Sistem Mediasi Masalah dan Rehabilitasi Profesi sebagai acuan dalam pelaksanaannya sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat maupun terhadap anggota Polri. Beberapa kegiatan telah dilaksanakan dalam tahapan jangka pendek yang difokuskan pada pemantapan dukungan *stakeholder* terkait, melalui komunikasi dan kolaborasi baik internal maupun eksternal, pembentukan tim efektif, penyusunan standar operasional prosedur, dan pemantapan sarana pendukung baik SDM, Sarana prasarana maupun anggaran.

Dalam pelaksanaan proyek perubahan pada tahapan jangka menengah dan jangka Panjang ini perlu dijaga momentum kelanjutannya, dimonitor dan dievaluasi serta proyek perubahan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada Polri khususnya Polda Bali dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui program peningkatan pengawasan salah satunya kegiatan tersebut guna meminimalisir pelanggaran yang dilakukan anggota Polri dan pembinaan karier bagi anggota Polri sehingga dapat bekerja dengan profesional, proporsional dan prosedural.

Proyek perubahan ini diharapkan sebagai solusi dalam peningkatan pengawasan kepada personil polri, sehingga Etos kerja dan disiplin anggota polri semakin baik dengan terwujudnya polri yang Presisi maka kepercayaan masyarakat terhadap polri akan semakin meningkat.

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	1
FORMULIR PENILAIAN COACH	2
FORMULIR PERSETUJUAN MENTOR	3
KATA PENGANTAR	4
EXECUTIVE SUMMARY	6
DAFTAR ISI	8
BAB I. PENDAHULUAN	11
A. LATAR BELAKANG	11
A.1. Gambaran Umum	11
A.2. Kondisi Saat Ini	14
A.3. Kondisi yang diharapkan	17
A.4. Isu Strategis	20
A.5. Alat Analisis	20
A.6. Solusi	21
B. Tujuan dan Manfaat Untuk Organisasi Adaptif	22
B.1. Tujuan	22
B.2. Manfaat	23
C. <i>Output</i> dan <i>Outcome</i>	23
C.1. <i>Output</i>	23
C.2. <i>Outcome</i>	23
E. Ruang Lingkup	23
BAB II. ANALISA MASALAH	25
A. Visi dan Misi Bidang Propam	25
A.1. Visi Bidpropam	25

A.2. Misi Bidpropam Polda Bali	25
A.3. Fungsi Bidpropam	25
B. Analisa Masalah	26
B.1. Milestone jangka pendek	27
B.2. Milestone jangka menengah	27
B.3. Milestone jangka Panjang	28
BAB III. STRATEGI PENYELESAIAN MASALAH	29
A. Terobosan Inovasi	29
A.1. Penggunaan Teknologi Digital untuk Pengawasan	29
A.2. Layanan Konsultasi Psikologis dan Dukungan Internal.....	29
B. Pentahapan dan Kegiatan	30
B.1. Jangka Pendek	30
B.2. Jangka Menengah	31
B.3. Jangka Panjang	32
BAB IV. PELAKSANAAN PROYEK PERUBAHAN	32
A. Capaian Tahapan Rencana Strategis	32
B. Implementasi Strategi Marketing	50
C. Strategi Marketing	51
D. Bentuk Strategi Marketing	57
E. Mata Pelatihan Pilihan	63
F. Pelaksanaan Strategi Pengembangan Kompetensi	64
G. Pemetaan Sikap Perilaku Kepemimpinan dan Strategi Pengembangan Potensi Diri	65
H. Kaitan Proyek Perubahan Dengan Materi Pelatihan	68

BAB V PENUTUP	70
A. Kesimpulan	70
B. Lesson Learnt	70
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN	74

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Proyek perubahan ini difokuskan pada peningkatan pengawasan oleh Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) Polda Bali yang bertugas melaksanakan pengamanan internal, penegakan ketertiban dan disiplin, serta pertanggungjawaban profesi dilingkungan Polda Bali termasuk pelayanan pengaduan masyarakat mengenai dugaan adanya penyimpangan tindakan anggota Polri serta melaksanakan rehabilitasi personil guna mengembalikan hak anggota Polri yang sebelumnya menjalani sanksi hukuman dari pelanggaran disiplin atau kode etik profesi ke keadaan semula, setelah mendapat surat putusan bebas atau selesai menjalani hukuman. Sesuai dengan Peraturan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri nomor 1 tahun 2017 Subagrehabpers mempunyai kewajiban untuk melakukan rehabilitasi personil melalui pemulihan profesi yang tentu dalam pelaksanaannya melibatkan stakeholder baik internal maupun eksternal.

Agar pelaksanaan penyelesaian permasalahan dengan mediasi dan pembinaan pemulihan profesi bagi anggota Polri yang telah menjalani hukuman dan pengawasan dapat dilaksanakan secara maksimal maka hal tersebut sangat perlu dilakukan dengan berbagai strategi untuk mempermudah dan mempercepat pelaksanaannya serta dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan peningkatan pengawasan melalui penyelesaian permasalahan dengan mediasi dan rehabilitasi profesi bagi anggota Polri tentunya akan meminimalisir pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri di Polda Bali

1. Gambaran umum

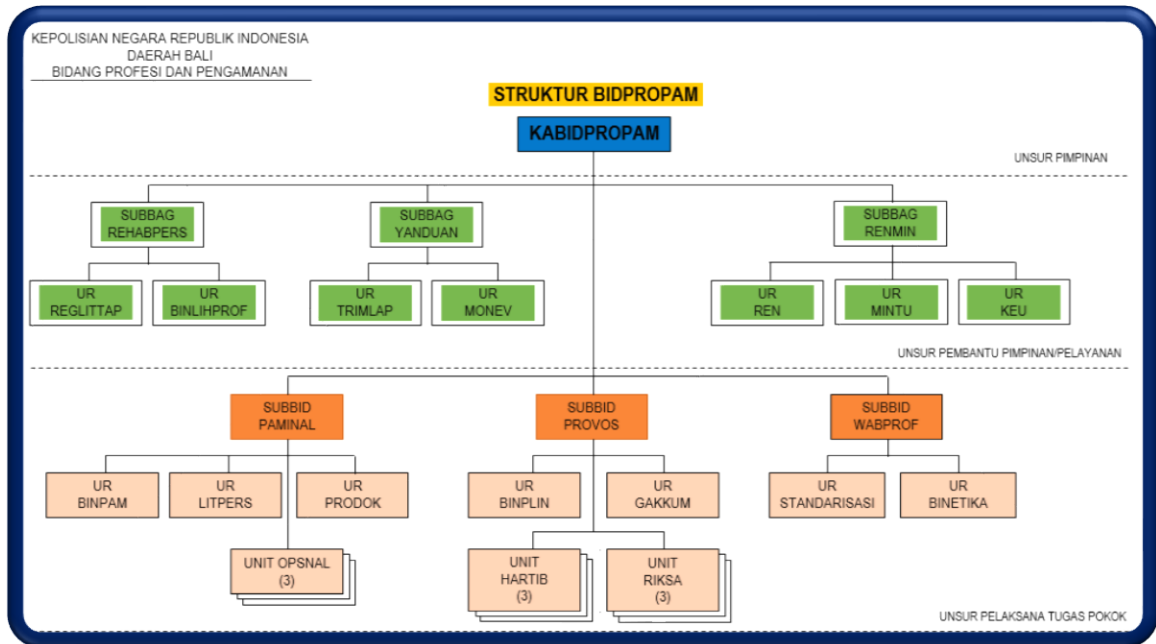
Program prioritas Kapolri yang presisi, yaitu prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan yang bertujuan untuk menata kelembagaan, perubahan sistem dan metode organisasi, menjadikan sumber daya manusia (SDM) Polri yang unggul di era revolusi industri 4.0, perubahan teknologi kepolisian yang modern, pemantapan dukungan Polri dalam penanganan *Covid-19*, pemulihan

ekonomi nasional, peningkatan kinerja pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, peningkatan kinerja penegakan hukum, serta penguatan fungsi pengawasan merupakan upaya Polri dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Pencapaian dalam pelaksanaan tugas sangat dipengaruhi oleh perilaku dan kinerja dari personel guna mendukung organisasi Polri sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, pemelihara keamanan serta ketertiban masyarakat dalam penegakan hukum.

Untuk memastikan personel Polri melaksanakan tugas sesuai dengan tanggungjawabnya secara profesional, proporsional dan prosedural dan mengikuti peraturan serta perundang-undangan yang berlaku diperlukan pengawasan secara terus menerus baik oleh atasan langsung maupun oleh fungsi pengawasan internal Polri, salah satu pengembangan fungsi Pengawasan ditingkat Polda adalah Bidang Profesi dan Pengamanan Polda Bali yang melaksanakan tugas pembinaan dan menyelenggarakan fungsi profesi dan pengamanan antara lain penegakan disiplin dan ketertiban di lingkungan Polda Bali, pelayanan pengaduan masyarakat, Kode etik profesi Polri serta melaksanakan rehabilitasi terhadap Pegawai Negeri pada Polri. Rehabilitasi yang dimaksudkan disini adalah pengembalian hak anggota Polri yang sebelumnya tersangkut pelanggaran disiplin, kode etik profesi maupun pidana ke keadaan semula setelah mendapat putusan bebas atau selesai menjalani hukuman, dimana fungsi ini diemban oleh Subbagrehabpers Bidpropam Polda Bali dengan kegiatan melakukan pembinaan pemulihan profesi bagi anggota yang telah menjalani hukuman dan pengawasan atas pelanggaran yang telah mereka lakukan.

Dalam pelaksanaan tugasnya Bidpropam Polda Bali dipimpin oleh seorang Kabidpropam yang dibantu oleh 3 orang Kasubbid dan 3 orang Kasubbag beserta anggotanya. Adapun struktur organisasi Bidpropam Polda Bali dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1
Struktur Organisasi Bidpropam Polda Bali



Dan terkait komposisi jumlah personel pada Bidpropam Polda Bali dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1
Daftar Susunan Personel Bidpropam Polda Bali

KUAT PERSONEL POLRI SATKER BIDPROPAM POLDA BALI						
NO	PANGKAT	DSP	RIIL	PERSONEL		KET
				+	-	
1	2	3	4	5	6	7
1	KOMBES POL	1	1			
2	AKBP	3	3			
3	KOMPOL	10	3		-7	
	PAMEN	14	7		-7	
4	AKP	22	8		-14	
5	IPTU	11	10		-1	
6	IPDA	11	12		+1	
	PAMA	44	30		-14	
7	AIPTU	50	23	+23		
8	AIPDA		14			
9	BRIPKA		22			
10	BRIGPOL		1			
11	BRIPTU		14			
12	BRIPDA		2			
	BRIGADIR	50	78		+28	
	JUMLAH TOTAL	108	115		+7	

2. Kondisi saat ini

Masih adanya pelanggaran disiplin, kode etik profesi Polri dan tindak pidana yang dilakukan oleh Pegawai Negeri pada Polri yang kemudian ditindaklanjuti dengan proses penegakan disiplin maupun kode etik profesi Polri sesuai ketentuan selanjutnya terhadap anggota Polri yang melakukan pelanggaran dan telah dijatuhi hukuman kemudian menjalani hukuman serta telah melalui masa pengawasan sesuai ketentuan serta telah mendapatkan putusan atau selesai menjalani hukuman harus dilakukan rehabilitasi untuk pengembalian haknya seperti semula, dimana penyelenggara rehabilitasi personel pada Bidpropam Polda Bali diemban oleh Subbagrehabpers dalam bentuk kegiatan pembinaan pemulihan profesi. Penyelenggaraan kegiatan rehabilitasi personel, dari sisi anggaran, Subbagrehabpers tidak memiliki mata anggaran tersendiri untuk menyelenggarakan kegiatan rehabilitasi khususnya pada kegiatan pembinaan pemulihan profesi anggota Polri yang dalam 1 (satu) tahun harus melakukan pembinaan pemulihan profesi terhadap 80 (delapan puluh) orang personel, begitu juga sarana prasarana yang masih terbatas seperti laptop yang ada hanya 2 (dua) unit laptop, 2 (dua) unit printer dengan kondisi rusak berat dan tidak memiliki akses jaringan internet untuk pembuatan laporan melalui aplikasi online.

Adapun jumlah pelanggaran baik disiplin dan kode etik profesi Polri yang dilakukan oleh anggota Polri Polda Bali dan pelaksanaan rehabilitasi yang telah dilaksanakan oleh Subbagrehabpers Bidpropam Polda Bali dari Tahun 2022 s.d. Juli 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel B.1

Data Jumlah Pelanggaran Disiplin Dan Kode Etik Profesi Personel Polda Bali

No	Jenis Pelanggaran	Jumlah Pelanggaran				
		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024
		Smt I	Smt II	Smt I	Smt II	Smt I
1	Disiplin	37	22	28	10	14
2	Kode Etik Profesi	6	9	8	16	15
3	Pidana	1	-	-	-	1
	Jumlah	44	31	36	26	29

Tabel B.2**Data Rehabilitasi Personel Polda Bali**

No	Jenis Rehabilitasi	Jumlah Personel Yang Telah Direhabilitasi				
		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024
		Smt I	Smt II	Smt I	SMT II	Smt I
1	Surat Keterangan Tidak Terbukti (SKTT)	5	29	1	3	6
2	Surat Keterangan Tidak Bersalah (SKTB)	3	6	5	-	2
3	Rekomendasi Penilaian Status (RPS)	47	20	29	8	2
4	Rehabilitasi Personel Dan Pemulihan Hak (RPPH)	17	6	8	12	14
JUMLAH		72	59	38	23	24

Terkait dengan sistem medisasi masalah dilaksanakan setiap ada permasalahan yang dilakukan atau adanya laporan dari masyarakat dan untuk pembinaan pemulihan profesi saat ini dilakukan setiap 2 (dua) bulan sekali tergantung dari jumlah personel yang selesai menjalani hukuman dan masa pengawasan dengan agenda kegiatan pemberian materi psikologi, perawatan personel, pembinaan karier, tes kesehatan jiwa, penegakan disiplin, penegakan etika profesi, rehabilitasi dan pencatatan personel yang disampaikan oleh pemateri dari satker external sesuai bidang tugasnya masing-masing.

Namun pelaksanaan pembinaan pemulihan profesi personel tersebut tidak dapat dilaksanakan secara maksimal mengingat keterbatasan sarana dan prasarana serta tidak adanya dukungan anggaran. Untuk melaksanakan kegiatan tersebut, terbatas pada binlihprof terhadap personel yang masih dalam pengawasan dan mendekati berakhirnya masa pengawasan, Yang sesuai petunjuk arahan dari Divpropam Polri kegiatan pembinaan dan pemulihan profesi anggota Polri dilakukan melalui 4 jenis kegiatan antara lain:

1. Binlihprof (pembinaan pemulihan profesi) tumpang rawat yaitu binlihprof yang dilaksanakan terhadap personel yang ditumpangrawatkan pada salah satu satker di Polda jajaran dalam rangka pemeriksaan, evaluasi jabatan dan menjalani putusan dengan waktu pelaksanaan setiap minggu satu kali.
2. Binlihprof atas sanksi putusan sidang KKEP yaitu binlihprof yang dilaksanakan terhadap personel yang menerima sanksi putusan berupa kewajiban pelanggar untuk mengikuti pembinaan mental kepribadian, kejiwaan,

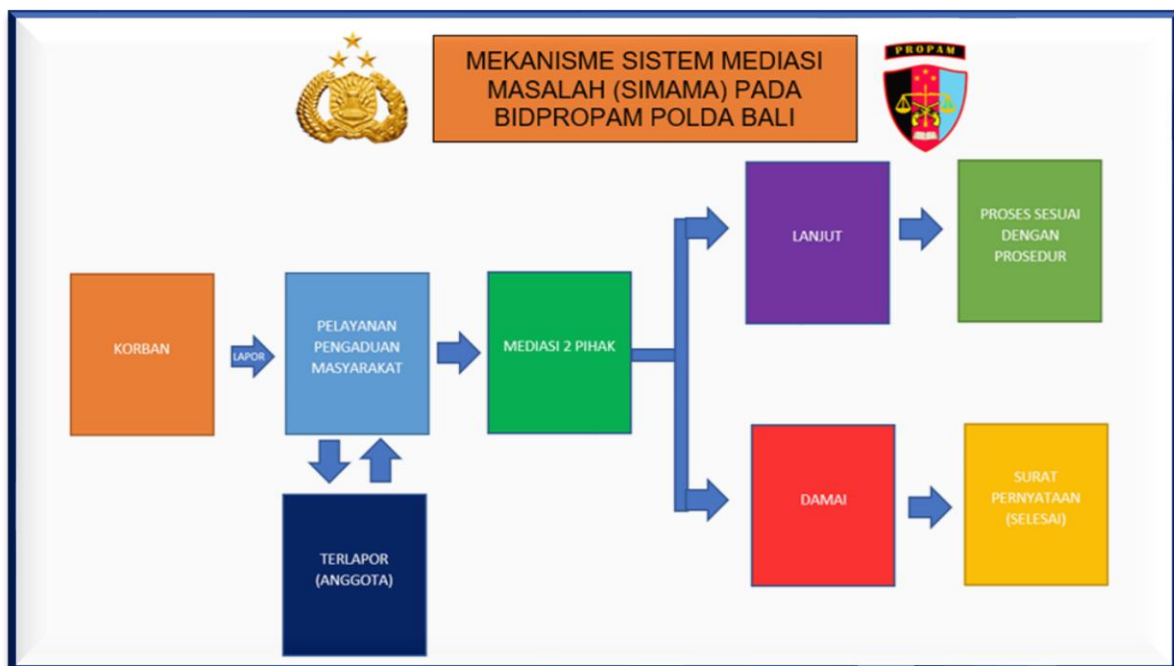
keagamaan dan pengetahuan profesi dengan waktu pelaksanaan sekurang-kurangnya satu minggu dan paling lama satu bulan.

3. Binlihprof dalam masa pengawasan dilaksanakan terhadap personel yang selesai menjalani masa hukuman namun masih dalam masa pengawasan sebelum diterbitkan administrasi rehabilitasinya dengan waktu pelaksanaan minimal 2 (dua) hari.
4. Binlihprof khusus dilaksanakan terhadap personel dalam proses pemeriksaan, masa pengawasan, sedang menjalani putusan (bukan putusan rekom PTDH), belum terbit administrasi rehabilitasinya, karena melakukan pelanggaran yang meresahkan dan menjadi atensi pimpinan berdasarkan hasil anev jumlah dan jenis pelanggaran anggota contoh penyalahgunaan narkoba, dengan waktu pelaksanaan sesuai kebutuhan minimal satu bulan dengan tempat kegiatan khusus.

Adapun mekanisme pembinaan pemulihan profesi Polri yang dilaksanakan pada Subbagrehabpers Bidpropam Polda Bali, terlihat pada gambar berikut:

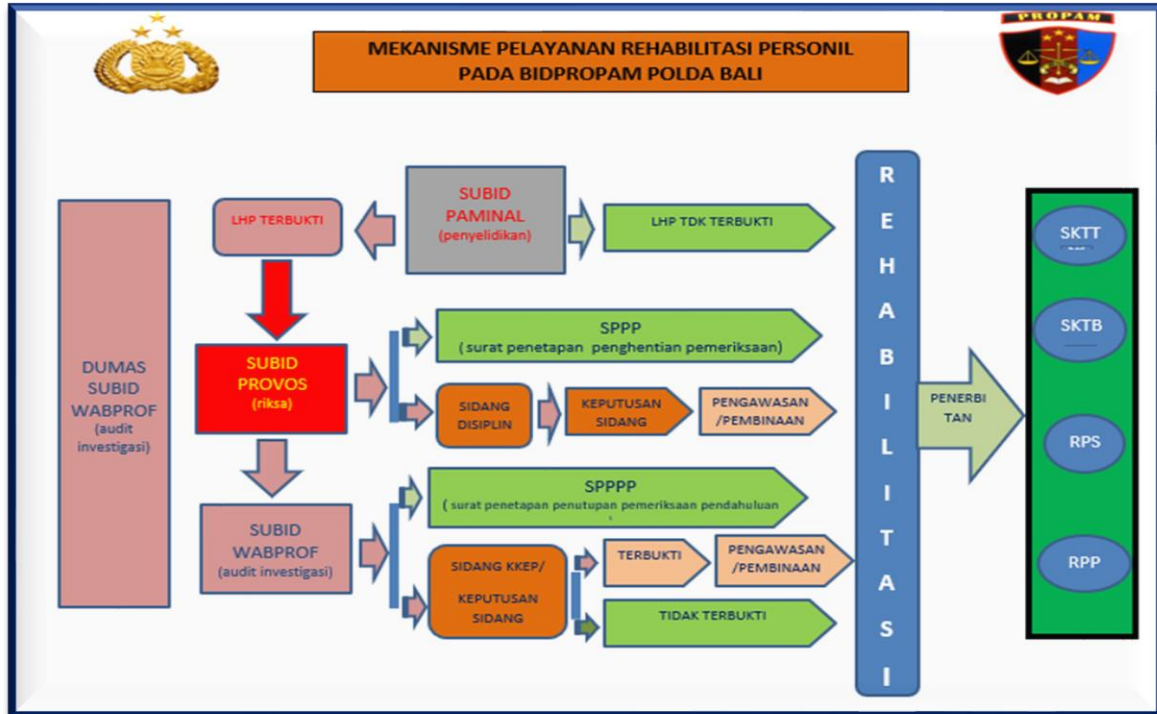
Gambar 2

Mekanisme Sistem Mediasi Masalah oleh Subbagyanduan pada Sentra Pelayanan Pengaduan Bidpropam Polda Bali



Gambar 3

Mekanisme Pelayanan Rehabilitasi Personel oleh Subbagrehabpers Bidpropam Polda Bali



3. Kondisi yang diharapkan

Berangkat dari kondisi saat ini yang menjadi permasalahan dan kendala dalam penerapan system mediasi masalah dan rehabilitasi personil, Kabidpropam Polda Bali berhasil menyusun strategi sebagai upaya untuk memenuhi dan meningkatkan penerapan system mediasi masalah dan rehabilitasi personil. Adapun strategi dan upaya tersebut dalam jangka pendek adalah terjalannya koordinasi dan kolaborasi antar stakeholder dalam rangka membangun kerjasama guna menyusun indikator-indikator permasalahan menjadi draft perencanaan baik itu kebutuhan anggaran, sarana prasarana maupun metode yang digunakan serta didukung jaringan digital yang memadai. Pada tahap akhir rancangan proyek perubahan ini mengimplementasikan rumusan strategi dalam tiga tahapan :

Jangka Pendek (Okt – Des 2024)	Jangka Sedang (Jan – Juni 2025)	Jangka Panjang (Juli – Juli 2026)
<ul style="list-style-type: none"> • Terbentuknya tim pelaksana • Terjalannya kerjasama dan kolaborasi dgn seluruh stakeholder • Tersusunnya rencana kerja • Tersusunnya SOP pemulihan profesi • Tersusunnya SOP sistem mediasi permasalahan 	<ul style="list-style-type: none"> • Terpenuhinya kebutuhan anggaran dan sarpras • Personil yang mengawaki telah mengikuti pelatihan dan dikbangspes • Terlaksananya giat Rehabpers • Terlaksananya mediasi masalah • Personil yang mengawaki sistem mediasi masalah tersebut mampu menjalankan sesuai dengan SOP. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pers yg mumpuni di bidangnya & berkompeten dalam pelayanan • Semakin minim pelanggaran oleh personel Polda Bali • Tingkat kepuasan Masyarakat terhadap system mediasi masalah yang diterapkan semakin terlayani. • Tingkat kepercayaan publik terhadap anggota Polri secara umum semakin meningkat.

Dengan terimplementasikannya 3 bentuk tahapan diatas maka beberapa manfaat bagi Bidpropam Polda Bali adalah sebagai berikut:

1. Tersusunnya Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk memperjelas standar kerja personil.
2. Seluruh kebutuhan untuk menunjang pelaksanaan tugas terpenuhi.
3. Semua personil sudah mempunyai kompetensi yang mumpuni.
4. Rencana kerja subagyangduan dan subagrehabpers BidPropam menjadi jelas dan terarah.

Untuk dapat mencapai kondisi yang diharapkan dan dapat memberi manfaat yang lebih luas, perlu disusun strategi serta tahapan untuk mencapai bentuk ideal tersebut melalui 3 tahapan sebagai berikut

a. Tahapan Jangka pendek.

Dalam jangka pendek akan dilakukan tahapan sebagai berikut:

1. Membangun tim pelaksana yang efektif
 - Koordinasi dengan mentor
 - Pembentukan tim kerja
 - Mengidentifikasi kebutuhan
 - Terbitnya surat perintah tugas
 - Mengajukan kebutuhan sarana prasarana, anggaran dan personil
2. Membangun koordinasi dan kolaborasi dengan seluruh *stakeholder*
 - Koordinasi dengan stakeholder internal Bidpropam
 - Koordinasi dengan stakeholder external Bidpropam
 - Kolaborasi dan koordinasi antar instansi terkait melalui FGD
3. Menyusun rencana kerja
 - Menyusun rencana kegiatan
 - Membagi personil yang terlibat dalam bentuk tim efektif
4. Menyusun Standar Operasional Prosedur
 - Menyusun SOP
 - Mengevaluasi SOP

b. Tahapan Jangka Menengah :

Sementara dalam jangka menengah selain dilakukan evaluasi dan penyempurnaan program jangka pendek akan dilanjutkan dengan aksi kegiatan yaitu :

1. Mengoptimalkan tim pelaksana
 - Koordinasi dengan mentor
 - Membimbing tim efektif
 - Menyerap anggaran sesuai kebutuhan

- mengevaluasi kerja tim
- 2. Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan mediasi dan pemulihan profesi
 - Koordinasi dengan stakeholder internal BidPropam
 - Koordinasi dengan stakeholder external BidPropam
 - Kolaborasi dan Koordinasi melalui FGD
- 3. Mengevaluasi Rencana kerja
 - Notulesi evaluasi
 - Mengawasi pelaksanaan proyek perubahan
- 4. Mengevaluasi SOP
 - Notulensi SOP
 - Mengawasi pelaksanaan sesuai SOP

c. Tahapan Jangka Panjang :

Jika jangka menengah telah dapat dijalankan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan maka akan dilanjutkan dengan beberapa aksi kegiatan dalam jangka panjang yaitu :

1. Personil yang mumpuni dan kompeten dalam tugas
 - Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas pengawasan personil
 - Mengevaluasi kinerja personil
2. Mendata pengaduan dan pelanggaran
 - Mengevaluasi semua kegiatan penguatan pengawasan
 - Melaksanakan supervisi

4. Isu Strategis

Isu strategis dalam rancangan proyek perubahan ini adalah belum optimalnya pelaksanaan tugas penyelesaian permasalahan anggota dan kegiatan pemulihan profesi yang dilaksanakan oleh Subagyangduan dan Subagrehabpers Bidpropam Pold Bali.

5. Alat Analisis

Strategi pemecahan masalah dengan menggunakan alat analisis (Tools of Analysis) SOAR analisis (Strenght, Opportunities, Aspirations, Result), dari hasil identifikasi faktor yang paling utama dalam strategi subagyauduan dan subagrehabpers melalui mediasi masalah serta pemulihan profesi dapat diidentifikasi sebagai berikut :

Strenght : Program prioritas Kapolri dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Opportunities : Adanya tuntutan dan harapan masyarakat agar Polri lebih profesional dalam melaksanakan tugas.

Aspirations : Kegiatan mediasi penyelesaian permasalahan dan pembinaan yang menyenangkan dan personil yang mengikuti kegiatan pemulihan profesi tidak rendah diri, meningkatnya etos kerja anggota setelah selesai permasalahannya dan mengikuti kegiatan pemulihan profesi.

Result : Meminimalisir pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri, pembinaan karier anggota dapat berjalan sebagaimana mestinya dan citra Polri yang semakin membaik.

6. Solusi

Polisi yang presisi menjadi sebuah keharusan untuk menjawab semua keinginan dan harapan dari masyarakat, sesuai dengan Peraturan Kapolri nomor 1 tahun 2017 subbagrehabpers mempunyai kewajiban untuk melakukan pemulihan profesi bagi anggota Polri yang telah menjalani hukuman dan masa pengawasan untuk mendapatkan kembali hak-haknya serta kembali menjalankan perintah tugas seperti biasa serta perkadiv nomor 4 tahun 2021 tentang tata cara penyelesaian dengan perdamaian pelanggaran anggota. Hal tersebut dapat dilakukan melalui kolaborasi dan koordinasi dengan fungsi terkait, sehingga menghasilkan kebijakan yang berkualitas dan akurat. Kolaborasi memerlukan strategi yang sinergis untuk mencapai hasil yang diharapkan dan dapat dipertanggung jawabkan

B. Tujuan dan Manfaat untuk Organisasi Adaptif

1. Tujuan

Tujuan utama gagasan Proyek perubahan ini adalah untuk dapat memaksimalkan pengawasan terhadap personel guna meminimalisir pelanggaran yang dilakukan melalui mediasi dan pemulihan profesi untuk mewujudkan personil Polri yang Presisi yang dilakukan melalui 3 (tiga) tahapan tujuan yaitu :

a. Tujuan Jangka Pendek

Tujuan jangka pendek yang akan dicapai dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan sejak melaksanakan Pelatihan Kepemimpinan Nasional tahun 2024 yaitu mulai bulan Oktober s.d. Desember 2024 adalah **terbentuknya tim pelaksana dan terjalinnya koordinasi serta kolaborasi dengan stakeholder** dengan sasaran yaitu:

- Tersusunnya tim pelaksana
- Terjalin kerjasama dan kolaborasi dgn seluruh stakeholder
- Tersusunnya rencana kerja
- Tersusunnya SOP

b. Tujuan Jangka Menengah

Tujuan jangka menengah yang akan dicapai dalam waktu 6 (enam) bulan Januari s.d. Juni 2025 adalah **terpenuhinya kebutuhan personil dan tersusunnya draf Rencana Kerja dan Standar Operasional Prosedur (SOP)** dengan sasaraannya yaitu :

- Evaluasi tim efektif
- Evaluasi dengan seluruh stakeholder
- Terlaksananya sistem mediasi masalah
- Terlaksananya pemulihan profesi

c. Tujuan Jangka Panjang

Tujuan jangka Panjang yang akan dicapai dalam waktu 1 (satu) tahun Juli 2025 s.d. Juli 2026 adalah **terimplementasinya Rencana Kerja kegiatan pemulihan profesi secara berkelanjutan** dengan sasaran yaitu :

- Personil yang mumpuni dan berkompeten
- Tidak adanya pelanggaran yang dilakukan oleh anggota

2. Manfaat

Penerima manfaat dari proyek perubahan ini terdiri dari pihak eksternal maupun internal.

Adapun manfaat Proyek Perubahan ini antara lain:

- Mencegah adanya pelanggaran anggota Polri dilingkungan Polda Bali
- Memudahkan pengawasan terhadap anggota Polri
- Meningkatkan *public trust* (kepercayaan masyarakat) terhadap Polri;

C. Output dan Outcome

1. Output

Output dari proyek perubahan ini adalah terpenuhinya kebutuhan personel, anggaran dan penambahan sarana prasarana, Standar Operasional Prosedur, Rencana Kerja sesuai tahapan pada jangka pendek, sedang dan jangka panjang.

2. Outcome

Outcome dari proyek perubahan ini adalah personil yang memiliki kompetensi dan berintegritas serta tidak ada lagi pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri yang mewujudkan Polri yang Presisi.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) di Polda Bali mencakup beberapa tugas dan fungsi utama yang berkaitan dengan pengawasan, penegakan disiplin, serta kode etik profesi bagi anggota kepolisian di wilayah hukum Polda Bali. Berikut adalah beberapa ruang lingkup utama Bidpropam Polda Bali:

- Pengawasan Disiplin:** Mengawasi kedisiplinan anggota kepolisian di wilayah Polda Bali. Hal ini meliputi pelanggaran disiplin seperti ketidakhadiran,

pelanggaran jam kerja, hingga pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku di internal kepolisian.

2. **Penegakan Kode Etik Profesi:** Memproses dan menindaklanjuti pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota polisi. Jika ditemukan pelanggaran kode etik, Bidpropam memiliki kewenangan untuk melakukan sidang kode etik dan memberikan sanksi yang sesuai.
3. **Pengamanan Internal:** Bertanggung jawab atas keamanan internal kepolisian, termasuk melindungi organisasi kepolisian dari ancaman internal yang dapat merusak citra dan integritas institusi.
4. **Penyelidikan Pelanggaran:** Melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap laporan pelanggaran disiplin atau kode etik yang dilakukan oleh anggota kepolisian. Bidpropam juga bekerja sama dengan instansi lain dalam proses investigasi ini, jika diperlukan.
5. **Pembinaan Anggota:** Memberikan pembinaan dan pengarahan kepada anggota kepolisian agar tetap menjaga disiplin dan integritas, serta menjalankan tugas sesuai dengan peraturan dan kode etik yang berlaku.
6. **Pengaduan Masyarakat:** Bidpropam juga menangani pengaduan dari masyarakat terkait pelanggaran yang dilakukan oleh anggota kepolisian. Pengaduan ini akan diproses dan diinvestigasi untuk memastikan bahwa tindakan kepolisian tetap sesuai dengan hukum dan etika.

Ruang lingkup ini penting untuk memastikan bahwa anggota kepolisian di Bali menjalankan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan standar hukum, etika, dan moral yang berlaku.

BAB II

ANALISA MASALAH

A. Visi dan Misi Bidang Propam.

1. Visi Bidpropam

Terwujudnya Pengamanan Internal, penegakan tata tertib, disiplin dan tegaknya hukum serta terbinanya dan terselenggaranya pertanggungjawaban profesi sehingga meminimalisir penyimpangan perilaku yang dilakukan oleh anggota / PNS Polri.

2. Misi Bidpropam Polda Bali

- a. Menyelenggarakan fungsi pelayanan terhadap laporan / pengaduan masyarakat tentang sikap perilaku dan penyimpangan anggota Polri / PNS Polri;
- b. Menyelenggarakan dan Pengamanan Internal meliputi; Pengamanan Personel, Materiil, kegiatan dan bahan keterangan dilingkungan Polri termasuk penyelidikan terhadap dugaan adanya pelanggaran atau penyimpangan dalam pelaksanaan tugas anggota / PNS Polri;
- c. Menegakkan hukum secara profesional dan proporsional dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia dengan menyelesaikan penanganan perkara personel Polri yang bermasalah sehingga mendapat kepastian hukum dan keadilan.

3. Dalam melaksanakan tugas, Bidpropam menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, administrasi dan ketatausahaan, serta pengelolaan keuangan;
- b. perumusan kebijakan Kapolda dalam bidang pembinaan pengamanan internal, pembinaan disiplin dan pertanggungjawaban profesi di lingkungan Polda;
- c. pembinaan dan pengamanan internal, yang meliputi personel, materiil, kegiatan, dan bahan keterangan;

- d. pembinaan dan penegakan disiplin dan/atau kode etik profesi Polri;
- e. pembinaan profesi, yang meliputi penilaian akreditasi profesi dan pembinaan atau penegakan etika profesi, serta pengauditan terhadap proses investigasi kasus baik eksternal maupun internal;
- f. pelayanan penerimaan laporan atau pengaduan warga masyarakat mengenai sikap dan tindakan pegawai negeri pada Polri yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dan/atau kode etik profesi Polri;
- g. pengendalian dan pemantauan terhadap penanganan laporan dan pengaduan warga masyarakat oleh satuan-satuan dalam lingkungan Polda dan pelaksanaan rehabilitasi terhadap pegawai negeri pada Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi dan dokumentasi kegiatan Bidpropam.

B. Analisa Masalah

Tahapan yang dicapai dalam proyek perubahan ini berupa 3 (tiga) tahapan yaitu jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Masing-masing tahap disesuaikan dengan ketersediaan sumberdaya yang dimiliki dengan waktu yang disesuaikan dengan kegiatan rutin sehari-hari. Dalam setiap tahapan ditentukan target output yang akan dicapai dengan menyajikan informasi tahapannya sebagai berikut :

1. Jenis kegiatan pada setiap tahapan.
2. Pelaksana kegiatan pada setiap tahapan.
3. Target waktu dan periode penyelesaian.
4. *Output* yang dihasilkan.

Tahapan proyek perubahan, *milestone* dan *output* kunci sebagai berikut:

1. Milestone jangka pendek

NO	TAHAPAN UTAMA JANGKA PENDEK SINKRONISASI	OKTOBER					NOPEMBER					DESEMBER			EVIDENCE/ OUTPUT	STAKEHOLDER	
		I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III			
1	Pembentukan Tim Efektif a. Rapat pembentukan Tim Efektif b. Penerbitan Surat Perintah Tugas sbg Tim Efektif															Daftar hadir rapat, Foto dan Sprin penunjukan sbg Tim Efektif	Kabidpropam, Para Kasubbid Propam, Kasubbagrehabpers, Kasubbagyanduan dan Kasubbagrenmin
2	Koordinasi dan komunikasi dgn Tim a. Rapat tujuan dan lingkup proper b. Pengorganisasian kegiatan berupa: Penyiapan tim dan pembagian tugas Identifikasi pemangku kepentingan Penyusunan jadwal kegiatan Penyiapan instrumen dan Identifikasi sarpras kegiatan c. Sosialisasi peresmian proper dan penggalangan dukungan komitmen															Daftar hadir rapat, Job Discription dan Time Schedule Dokumentasi kegiatan	Para Kasubbid Propam, Kasubbagrehabpers, Kasubbagyanduan dan Kasubbagrenmin
3	Perumusan Draf Rencana Kegiatan a. Analisa kebutuhan data dan dokumen b. Kompilasi data, jumlah jenis anggaran, sarpras yg dibutuhkan c. Rapat perumusan kegiatan															Daftar hadir rapat dan dokumentasi kegiatan	Para Kasubbid Propam, Kasubbagrehabpers, Kasubbagyanduan dan Kasubbagrenmin
4	Perumusan Draf SOP mengumpulkan data peraturan terkait binlihprof															Daftar hadir rapat dan dokumentasi kegiatan	Para Kasubbid Propam, Kasubbagrehabpers, Kasubbagyanduan dan Kasubbagrenmin

2. Milestone jangka menengah

NO	TAHAPAN UTAMA JANGKA MENENGAH	JANUARI					FEBRUARI					MARET					APRIL					MEI					JUNI					EVIDENCE/ OUTPUT	STAKEHOLDER
		I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V		
1	Mengidentifikasi kebutuhan sarpras dan anggaran Menyusun RAB utk kegiatan binlihprof																															Dokumen	Kasubbag rehapers, Kasubbagrenmin
2	Meningkatkan kemampuan personel melalui pelatihan dan dikbang a. Menyusun time schedule platihan b. Membuat Sprin pelatihan c. Menyusun materi pelatihan d. Menginventarisir personel yg diikutkan dikbang e. Mengajukan daftar nama yang diikutkan dikbangspes kpd Karo SDM Polda Bali																															Dokumen	Kabidpropam, Kasubbagrenmin
3	Melaksanakan kegiatan binlihprof a. Menyusun SOP Binlihprof b. Menginventarisir personel yang akan dilakukan binlihprof c. Melaksanakan koordinasi dgn pemateri Binlihprof d. Menyusun Surat Perintah Tugas Tim e. Membuat time Schedule Binlihprof f. Pelaksanaan Binlihprof secara berkala																															Dokumen Sprin, materi binlihprof, laporan kegiatan dan foto.	Kabidpropam, Para Kasubbid Propam, Kasubbagrehab
4	Melaksanakan SiMaMa (Mediasi Masalah) antara pendumas (masyarakat) dgn anggota Polri yang diadakan																															Register buku tamu, form SiMaMa dan dokumentasi/ foto	Kasubbag yanduan

3. Milestone jangka panjang

NO	TAHAPAN UTAMA JANGKA PANJANG	JULI 2025	AGST 2025	SEPT 2025	OKT 2025	NOP 2025	DES 2025	JAN 2026	FEB 2026	MARET 2026	APRIL 2026	MEI 2026	JUNI 2026	JULI 2026	EDVANCE /OUTPUT	STAKEHOLDER
1	Terwujudnya personel yang mumpuni di bidangnya dan berkompeten dalam pelayanan Personel telah mengikuti pelatihan dan dikbang														Data/ Dokumen	Kasatker/ Kasatwil
2	Tidak ada lagi pelanggaran oleh personel Polda Bali														Data/ Dokumen	Kabidpropam

No	Kondisi sebelum Proper	Kondisi yang diharapkan
1.	<ul style="list-style-type: none"> Masih adanya pelanggaran disiplin, kode etik profesi dan pidana yang dilakukan oleh PNPP Polda Bali 	<ul style="list-style-type: none"> Menurunnya angka pelanggaran disiplin, etika profesi maupun pidana yang dilakukan oleh PNPP Polda Bali guna mewujudkan Polri yang Presisi.
2.	<ul style="list-style-type: none"> Belum maksimalnya pelaksanaan Sistem Mediasi Masalah & Pemulihan Profesi 	<ul style="list-style-type: none"> Terlaksananya kegiatan Sistem Mediasi Masalah & Rehabilitasi Profesi Secara Maksimal
3.	<ul style="list-style-type: none"> Kompetensi personel, anggaran & sarana prasarana masih terbatas 	<ul style="list-style-type: none"> Personil Polri yang berkompeten dibidangnya serta tercukupinya anggaran & sarana prasarana

BAB III

STRATEGI PENYELESAIAN MASALAH

A. Terobosan Inovasi

Beberapa terobosan inovatif dapat diterapkan dalam penyelesaian masalah di bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Bali untuk meningkatkan kinerja, transparansi, dan kepercayaan publik. Berikut adalah beberapa ide yang mungkin relevan:

1. Penggunaan Teknologi Digital untuk Pengawasan

- **Pelaporan Online:** Laporan secara online melalui Aplikasi WA yang memudahkan masyarakat maupun anggota kepolisian untuk melaporkan pelanggaran atau perilaku tidak etis secara langsung dan cepat. Hal ini merupakan komunikasi digital dan memudahkan proses pelaporan.

2. Layanan Konsultasi Psikologis dan Dukungan Internal

- **Program Konseling Psikologis:** Menyediakan layanan konseling bagi anggota kepolisian yang mengalami tekanan mental atau stres dalam menjalankan tugas. Hal ini penting untuk menjaga kesehatan mental personil dan mencegah tindakan yang tidak etis akibat beban pekerjaan.
- **Penegakan Disiplin dengan Pendekatan Humanis:** Menerapkan pendekatan yang lebih humanis dalam menangani pelanggaran internal, dengan tidak hanya fokus pada sanksi tetapi juga pada rehabilitasi dan pembinaan personil.

B. Pentahapan Dan Kegiatan

Dalam mengimplementasikan 3 (tiga) bentuk tahapan diatas maka disusun strategi untuk dapat mencapai kondisi yang diharapkan dan dapat memberi manfaat yang lebih luas melalui 3 (tiga) tahapan sebagai berikut :

1. Jangka Pendek.

Dalam jangka pendek dilakukan tahapan sebagai berikut:

1. Membangun tim pelaksana yang efektif
 - Berkoordinasi dengan mentor
 - Membentuk tim kerja
 - Mengidentifikasi kebutuhan sarana prasarana pendukung
 - Terbitnya surat perintah tugas untuk tim efektif
 - Mengajukan kebutuhan sarana prasara, anggaran dan personil
2. Membangun koordinasi dan kolaborasi dengan seluruh *stakeholder*
 - Berkoordinasi dengan stakeholder internal Bidpropam
 - Berkoordinasi dengan stakeholder external Bidpropam
 - Berkolaborasi dan berkoordinasi antar instansi melalui FGD
3. Menyusun rencana kerja
 - Menyusun rencana kegiatan
 - Membagi tugas personil yang terlibat dalam tim efektif
4. Menyusun Standar Operasional Prosedur
 - Menyusun SOP
 - Mengevaluasi SOP

2. Jangka Menengah :

Sementara dalam jangka menengah selain dilakukan evaluasi dan penyempurnaan program jangka pendek akan dilanjutkan dengan aksi kegiatan yaitu :

1. Mengoptimalkan tim pelaksana
 - Koordinasi dengan mentor
 - Membimbing tim efektif
 - Menyerap anggaran sesuai kebutuhan
 - mengevaluasi kerja tim
2. Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan mediasi dan pemulihan profesi
 - Koordinasi dengan stakeholder internal BidPropam

- Koordinasi dengan stakeholder external BidPropam
- Kolaborasi dan Koordinasi melalui FGD

3. Mengevaluasi Rencana kerja

- Notulesi evaluasi
- Mengawasi pelaksanaan proyek perubahan

4. Mengevaluasi SOP

- Notulensi SOP
- Mengawasi pelaksanaan sesuai SOP

3. Jangka Panjang :

Jika jangka menengah telah dapat dijalankan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan maka akan dilanjutkan dengan beberapa aksi kegiatan dalam jangka panjang yaitu :

1. Personil yang mumpuni dan kompeten dalam tugas
 - Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas pengawasan personil
 - Mengevaluasi kinerja personil
2. Mendata pengaduan dan pelanggaran
 - Mengevaluasi semua kegiatan penguatan pengawasan
 - Melaksanakan supervisi

BAB IV
PELAKSANAAN PROYEK PERUBAHAN

A. Capaian Tahapan Rencana Strategis

Rangkaian kegiatan implementasi proyek perubahan dalam jangka pendek selama 3 (dua) bulan penuh (bulan Oktober s.d. Desember 2022) dilaksanakan setelah seminar rancangan proyek perubahan. Dan telah berhasil menyelesaikan seluruh tahapan (*milestone*) yang telah ditetapkan pada saat seminar rancangan proyek perubahan bersama *coach*, mentor, dan penguji. Keseluruhan capaian jangka pendek proyek perubahan disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 8

Jadwal Rencana dan Realisasi Pelaksanaan Proyek Perubahan

KEGIATAN UTAMA	RENCANA	REALISASI	WAKTU	PERAN	BUKTI LAMPIRAN
MILESTONE1					
Membangun Kolaborasi strategis	Minggu I	Meminta arahan mentor	1 okt 2024	Project leader	Foto dokumentasi
		Membuat nota dinas undangan rapat	9 okt 2024	Project leader	Nota Dinas Undangan
	Minggu II	Meminta tanda tangan utk undangan rapat	13 okt 2024	Project leader	Nota Dinas Undangan
		Melaksanakan rapat pembentukan dengan tim efektif	16 okt 2024	Project leader	- Notulensi - Daftar hadir - Foto Dokumentasi
	Minggu III	Membuat nota dinas undangan rapat	21 okt 2024	Project leader	Nota Dinas Undangan
		Meminta tanda tangan undangan rapat	22 okt 2024	Project leader	Nota Dinas Undangan
		Melaksanakan rapat penyusunan SOP dengan tim efektif	22 okt 2024	Project leader	- Notulensi - Daftar hadir - Foto Dokumen

KEGIATAN UTAMA	RENCANA	REALISASI	WAKTU	PERAN	BUKTI LAMPIRAN
MILESTONE I					
	Minggu IV	Melaksanakan koordinasi dengan Kapolda Bali	22 okt 2024	Project leader	Foto Dokumentasi
		Melaksanakan Koordinasi dengan Irwasda Polda Bali	23 okt 2024	Project leader	Foto Dokumentasi
		Melaksanakan Koordinasi dengan Karo SDM Polda Bali	24 okt 2024	Project leader	Foto Dokumentasi
		Membuat nota dinas undangan rapat	25 okt 2024	Project leader	Nota Dinas Undangan
		Melaksanakan Koordinasi dengan Kabid kum Polda Bali	28 okt 2024	Project leader	Foto Dokumentasi
		Melaksanakan Koordinasi dgn Kabid Humas Polda Bali	28 okt 2024	Project leader	Foto Dokumentasi
		Melaksanakan rapat dengan tim efektif dan stakeholder sekaligus pemantapan SOP	29 okt 2024	Project leader	- Notulensi - Daftar hadir Naskah SOP Foto Dokumen
Membangun Kolaborasi strategis	Minggu I	Melaksanakan koordinasi dengan Ketua DPD Media Organisasi Siber Indonesia Prov Bali	4 Nov 2024	Project leader	Foto Dokumentasi
		Membuat Surat Permohonan ke Kantor Ombudsman	6 Nov 2014	Project leader	Foto Dokumentasi
	Minggu II	Melaksanakan koordinasi dengan Kepala Perwakilan OMBUDSMAN RI Prov Bali Dan POM TNI Kodam IX Udayana	11 Nov 2024	Project leader	Foto Dokumentasi
		Membuat Nota dinas permohonan Konseling Psikologis	12 Nov 2024	Project leader	Foto Dokumentasi
		Membuat nota dinas undangan rapat	14 Nov 2024	Project leader	Nota Dinas Undangan
	Minggu III	Melaksanakan rapat dgn tim kerja efektif untuk mengevaluasi SOP	18 Nov 2024	Project leader	- Notulensi - Daftar hadir - Naskah SOP - Foto Dokumen
		Sosialisasi Sistem Mediasi Masalah dan memasang banner di ruang pelayanan Bidpropam dan Polres jajaran	19 Nov 2024	Project leader	Foto Dokumentasi

Membangun Kolaborasi strategis	Minggu III	Membuat surat undangan pelaksanaan mediasi masalah oleh Subbagyanduan Bidpropam Polda Bali	20 Nov 2024	Project leader	Nota dinas undangan
		Melaksanakan penerapan Sistem Mediasi Masalah dengan melibatkan mediator	21 Nov 2024	Project leader	- Notulensi - Daftar Hadir - Foto dokumen
		Melaksanakan Konseling Psikologis dan Kejiwaan	22 Nov 2024	Project leader	- Nota Dinas - Foto Dokumen

KEGIATAN UTAMA	RENCANA	REALISASI	WAKTU	PERAN	BUKTI LAMPIRAN
MILESTONE I					
	Minggu IV	Melaksanakan pelaporan kepada Mentor Kabid Propam Polda Bali	25 Nov 2024	Project leader	Foto dokumentasi
		Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dgn bidkum, Polres jajaran Polda Bali dalam rangka harmonisasi SOP Sistem Mediasi Masalah	26 Nov 2024	Project leader	Foto dokumentasi
		Melaksanakan Binlihprof terhadap personel Polda Bali	27 Nov 2024	Project leader	- Absen - Foto dokumentasi
		Melaporkan pelaksanaan proyek perubahan kepada Wakapolda Bali	29 Nov 2024	Project leader	Foto dokumentasi
	Minggu V	Melaksanakan persiapan dan bimbingan Seminar implementasi Proper	1-2 Des 2024	Project leader	Foto dokumentasi

Dalam implementasi kegiatan proyek perubahan, pencapaian program jangka pendek dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pembentukan Tim Kerja Efektif Proyek Perubahan

Tahapan awal yang dilakukan adalah meminta arahan mentor terkait implementasi proyek perubahan selanjutnya melakukan komunikasi dan koordinasi dalam rangka pembentukan tim kerja efektif proyek perubahan yang dilaksanakan

pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 bertempat di ruang rapat Bidpropam Polda Bali dan melaksanakan pembagian tugas dengan mempertimbangkan tugas pokok dan kemampuan anggota tim yang ditunjuk sehingga proyek perubahan ini dapat berjalan sesuai dengan rencana, disamping itu hasil koordinasi dan arahan dari mentor juga menjadi bahan masukan dalam persiapan pelaksanaan proyek perubahan.

Tim efektif yang dibentuk guna mendukung proyek perubahan ini terdiri dari para Kasubbid, Kasubbag dan Staf Bidpropam Polda Bali yang berkompeten di bidangnya sesuai obyek dari Proyek Perubahan ini yaitu Sistem Mediasi Masalah pada Subbagyanduan Bidpropam dan Pembinaan Pemulihan Profesi pada Subbagrehabpers Bidpropam Polda Bali.

Gambar 5

Rapat Koordinasi Pembentukan Tim Kerja Efektif Proyek Perubahan



Adapun *output* yang dihasilkan dari rapat koordinasi dan arahan mentor adalah terbitnya Surat Perintah Kabidpropam Polda Bali Nomor: Sprin/339/X/DIK.1.2./2024, tanggal 1 Oktober 2024 tentang penunjukan sebagai Tim Kerja Efektif Proyek Perubahan beserta uraian tugas masing-masing.

2. Penyusunan draf SOP Sistem Mediasi Masalah pada Subbagyanduan Bidpropam dan SOP Pembinaan dan Rehabilitasi Profesi pada Subbagrehabpers Bidpropam Polda Bali

Pada tahapan ini dilaksanakan rapat koordinasi dengan Tim kerja efektif untuk membahas penyusunan draf Standar Operasional Prosedur (SOP) Sistem Mediasi masalah pada Sentra Pelayanan Propam yang diawaki oleh Subbagyanduan Bidpropam dan draf Standar Operasional Prosedur (SOP) Pembinaan dan pemulihan profesi yang diawaki oleh Subbagrehabpers Bidpropam Polda Bali dimana sesuai nota dinas undangan kepada anggota Tim Kerja Efektif jadwal pelaksanaannya pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024, namun karena sebagian dari anggota Tim berhalangan hadir oleh karena ada tugas yang tidak bisa ditinggalkan sehingga rapat koordinasi diundur pelaksanaannya menjadi pada hari Kamis, tanggal 18 Oktober 2022 bertempat di ruang rapat Bidpropam Polda Bali dimana tujuan dari penyusunan draf SOP tersebut sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas baik itu saat melaksanakan mediasi masalah maupun pembinaan dan pemulihan profesi.

Gambar 6

Rapat koordinasi dengan Tim Kerja Efektif dalam penyusunan draf SOP



Adapun *output* yang dihasilkan dari rapat koordinasi ini adalah tersusunnya draf Standar Operasional Prosedur (SOP) Sistem Mediasi masalah pada Sentra Pelayanan Propam yang diawaki oleh Subbagyanduan Bidpropam dan draf Standar Operasional Prosedur (SOP) Pembinaan dan pemulihan profesi yang diawaki oleh Subbagrehabpers Bidpropam Polda Bali.

3. Pelaksanaan kegiatan Koordinasi dan Audiensi dengan *Stakeholder* baik internal maupun eksternal guna mendukung kelancaran pelaksanaan Proyek Perubahan.

Pada tahapan ini dilaksanakan koordinasi dan audiensi dengan beberapa *stakeholder baik internal* (Pejabat Utama Polda Bali) maupun dengan pihak eksternal Polri guna mendukung pelaksanaan proyek perubahan ini yang dilaksanakan dalam beberapa waktu, yaitu:

1. Pada tanggal 17 Oktober 2024 melaksanakan koordinasi dengan Kapolda Bali dan Wakapolda Bali memaparkan Proyek Perubahan yang dilaksanakan;



2. Pada tanggal 23 Oktober 2024 melaksanakan koordinasi dengan Irwasda dan memaparkan Proyek Perubahan yang dilaksanakan;



3. Pada tanggal 24 Oktober 2024 melaksanakan koordinasi dengan Karo SDM dan memaparkan Proyek Perubahan yang dilaksanakan;



4. Pada tanggal 28 Oktober 2024 melaksanakan koordinasi dengan Kabid Hukum dan memaparkan Proyek Perubahan yang dilaksanakan;



5. Pada tanggal 29 Oktober 2024 melaksanakan koordinasi dengan Kabid Humas dan memaparkan Proyek Perubahan yang dilaksanakan;



6. Pada tanggal 30 November 2024 melaksanakan koordinasi dengan Kabid Propam Polda Bali dan memaparkan Proyek Perubahan yang dilaksanakan;



7. Pada tanggal 5 November 2024 melaksanakan koordinasi dengan Ketua DPD Media Organisasi Siber Indonesia Provinsi Bali dan memaparkan Proyek Perubahan yang dilaksanakan;



8. Pada tanggal 11 November 2024 melaksanakan koordinasi dengan Kepala Perwakilan OMBUDSMAN RI Provinsi Bali dan memaparkan Proyek Perubahan yang dilaksanakan;



9. Pada tanggal 13 November 2024 melaksanakan koordinasi dengan DANPOMDAM IX/UDAYANA Dan DANDENPOM IX/3 Denpasar dan memaparkan Proyek Perubahan yang dilaksanakan;



Adapun *output* yang dihasilkan dari pelaksanaan koordinasi dan audiensi ini adalah mendapatkan saran dan masukan terkait pelaksanaan proyek perubahan dan pernyataan dukungan dari stakeholder sehingga proyek perubahan ini dapat berjalan dengan lancar dan dapat memberikan manfaat bagi institusi Polri khususnya Polda Bali dan masyarakat.

4. Rapat koordinasi dengan Tim Kerja Efektif untuk mengevaluasi draf SOP Sistem mediasi masalah dan Rehabilitasi profesi

Pada tahapan ini dilaksanakan rapat koordinasi dengan tim kerja efektif guna mengevaluasi dan menampung saran masukan untuk penyempurnaan draf SOP sistem mediasi masalah dan SOP pembinaan dan pemulihan profesi dan bentuk administrasi untuk pertanggungjawaban pelaksanaan SOP dimaksud yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2024 bertempat di ruang rapat Bidpropam Polda Bali.

Gambar 8

Rapat Evaluasi SOP Sistem Mediasi Masalah dan Rehabilitasi Profesi



Output yang dihasilkan dalam pelaksanaan rapat koordinasi dengan Tim Efektif adalah disetujuinya SOP mekanisme pelaksanaan Sistem mediasi masalah pada Sentra Pelayanan Propam Subbagyanduan dan mekanisme pelaksanaan pembinaan pemulihan profesi pada Subbagrehabpers Bidpropam Polda Bali, sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas dan dapat dipertanggungjawabkan termasuk administrasi yang harus ada dan dilengkapi pada saat pelaksanaan kegiatan dimaksud.

a. Mekanisme pelaksanaan Sistem Mediasi Masalah sebagai berikut:

1. Adanya permintaan dari masyarakat atau pelapor/pengadu untuk meminta bantuan kepada petugas Sentra Pelayanan Propam (SPP) agar permasalahan yang terjadi antara pelapor dan oknum anggota Polri maupun ASN Polri dapat diselesaikan secara kekeluargaan atau dimediasi sehingga dari permintaan Pelapor tersebut petugas pelayanan sebagai mediator melakukan langkah-langkah dengan cara mempertemukan pihak-pihak yang terlibat sehingga permasalahan tersebut menemukan jalan keluar dan kesalahpahaman kedua belah pihak bisa diselesaikan;
2. Saran dari petugas pelayanan kepada pihak pelapor/pengadu agar permasalahan yang diajukan oleh pelapor/pengadu dapat dimediasi atau diselesaikan secara kekeluargaan, namun sebelum petugas memberikan saran mediasi kepada pelapor/pengadu petugas pelayanan harus terlebih dahulu mengkaji dan menganalisa uraian/isi dari aduan pelapor/pengadu jika menurut petugas tingkat kesalahan terlapor/teradu tidak berat dengan mempertimbangkan niat dan tujuan terlapor/teradu dan terlapor/teradu bukan anggota yang sering melakukan pelanggaran baik disiplin maupun etika profesi dan atas pertimbangan ankum layak untuk dilakukan perdamaian, jika pelapor/pengadu menyetujui saran dari petugas selanjutnya petugas pelayanan melakukan langkah-langkah mediasi dengan berkoordinasi dengan atasan dari terlapor/teradu.
3. Syarat Materiil Sistem Mediasi Masalah:
 - a. Tidak menimbulkan keresahan dan penolakan dari masyarakat;
 - b. Tidak berdampak konflik sosial;
 - c. Adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan;
 - d. Memenuhi kriteria kesepakatan

4. Syarat formil Sistem Mediasi Masalah:

- a. Surat pernyataan kesepakatan perdamaian dari kedua belah pihak antara pelapor dan terlapor;
- b. Surat pernyataan tidak mengulangi perbuatannya dari terlapor diatas materai.

Gambar 9

Mekanisme pelaksanaan Sistem Mediasi Masalah pada Sentra Pelayanan Propam (SPP) Bidpropam Polda Bali

NO	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA								MUTU BAKU			CEK LIST					
		PELAPOR	PAMIN & BAUR TRIMLAP	KAUR TRIMLAP	KASUBBAG YANDUAN	TEAM MEDIATOR	TERLAPOR	KABIDPROPAM	PARA KASUBBID	KELENG KAPAN	WKT	OUTPUT	SESUAI	TDK SESUAI				
1	Menerima masyarakat datang langsung ke Sentra Pelayanan Propam Polda Bali	☐										Kertas	10 mnt	Menerima kedatangan pelapor di Sentra Pelayanan Propam Polda Bali				
2	Mencatat identitas pelapor dan terlapor		☐											Kertas	15 mnt	Memeriksa identitas pelapor		
3	Menerima laporan serta interview pelapor			☐										Kertas	30 mnt	Hasil identifikasi benar anggota Polri/ASN Polri Aktif		
4	Menerima hasil identifikasi laporan Kaurtrimlap				☐									- Kertas	1 jam	Mengarahkan akan kaurtrimlap untuk mengkoordinasikan dengan		
5	Kasubbag yanduan bersama team mediator merapatkan laporan masyarakat					☐								Dokumentasi dan kertas	30 Mnt	tea mediator Menyampaikan persepsi		
6	Team mediator menemui pelapor dan terlapor	☐					☐							Kertas	1 jam	Kesepakatan mediasi		
7	Team mediator memfasilitasi dan mediasi pelapor dan terlapor							☐	☐					Kertas	2 jam	Tidak sepakat untuk berdamai		
8	Team mediator membuat laporan hasil mediasi ke Kabidpropam								☐					kertas	20 mnt	Menunggu disposisi Kabidpropam		
9	Menerima hasil disposisi Kabidpropam									☐				kertas	20 mnt	Tindak lanjut disposisi Ka		

b. Mekanisme pelaksanaan Pembinaan Rehabilitasi Profesi sebagai berikut:

1. Kasubbagrehabpers membuat rencana kegiatan Pembinaan dan Pemulihan Profesi Polri diajukan kepada Kabidpropam;
2. Membuat Nota Dinas kepada Kasatker untuk menghadirkan Personil Polri atau PNS Polri yang akan berakhir masa menjalani hukuman dan pengawasan, untuk mengikuti pembinaan pemulihan profesi;
3. Mengundang narasumber yang akan mengisi materi pada kegiatan pembinaan pemulihan profesi;
4. Melaksanakan pembinaan dan pemulihan profesi Polri sesuai dengan rencana dan jadwal kegiatan;
5. Membuat laporan hasil kegiatan Pembinaan dan Pemulihan Profesi Polri.

c. Sosialisasi Sistem Mediasi Masalah dan Rehabilitasi/Pemulihan Profesi kepada Kasipropam Polres jajaran Polda Bali serta sosialisasi lewat Baksos kepada Masyarakat dan pembuatan Banner yang ditempatkan di ruang pelayanan publik Polda Bali.

Pada tahapan ini telah dilaksanakan sosialisasi kepada Kasipropam Polres jajaran Polda Bali terkait Sistem Mediasi Masalah dan Rehabilitasi Profesi pada hari Jumat tanggal 15 November 2024 pukul 13.00 Wita dan pembuatan banner yang mencantumkan hotline/no telp Sentra Pelayanan Propam (SPP) sehingga masyarakat maupun personel Polri yang mengetahui adanya pelanggaran/penyalahgunaan wewenang oleh anggota Polri dapat dengan segera melaporkan ke Sentra Pelayanan Propam Polda Bali.

Gambar 10

Gambar Sosialisasi Sistem Mediasi Masalah dan Rehabilitasi Profesi





Gambar 11

Banner Sosialisasi Pada Ruang Pelayanan Publik Jajaran Polda Bali



Output yang dihasilkan dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi Sistem Mediasi Masalah dan Rehabilitasi Profesi ini adalah Kasatker dan Kasatwil serta personel Polda Bali mengetahui terkait SIMAMA dan diharapkan dapat mengimplementasikan di wilayah masing-masing sehingga angka pengaduan masyarakat dapat ditekan/menurun.

d. Pelaksanaan/implementasi Sistem Mediasi Masalah oleh Subbagyanduan Bidpropam Polda Bali sesuai SOP yang telah ditetapkan dengan melibatkan Tim kerja efektif proyek perubahan

Pada tahapan ini telah diimplementasikan sistem mediasi masalah oleh petugas Sentra Pelayanan Propam Polda Bali yang diawaki oleh Subbagyanduan Bidpropam Polda Bali pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 bertempat di ruang rapat Bidpropam Polda Bali dengan menghadirkan masyarakat yang mengadukan/komplain atas perilaku oknum anggota Polri Polda Bali, oknum anggota Polri selaku pihak teradu, Tim mediator dari pengemban fungsi penyelidikan Propam dari Subbidoaminal, fungsi penegakan etika profesi Polri dari Subbidwabprof, fungsi penegakan disiplin dari Subbidprovos dan Kasubbagyanduan beserta staf sebagai petugas yang mengawaki bidang pelayanan pengaduan masyarakat pada Bidpropam Polda Bali dan selaku ketua tim mediator.

Gambar 12

Implementasi Sistem Mediasi Masalah



Output yang dihasilkan pada kegiatan Sistem Mediasi Masalah ini adalah dapat dipertemukannya pelapor dengan terlapor (oknum anggota Polri) sehingga mendapatkan solusi serta kesepakatan antara kedua belah pihak atas permasalahan yang dihadapi.

e. Implementasi Kegiatan Rehabilitasi Pemulihan Profesi Polri oleh Subbagrehabpers Bidpropam Polda Bali

Pada tahapan ini telah dilaksanakan kegiatan pembinaan pemulihan profesi kepada anggota Polri yang pernah melakukan pelanggaran untuk dipulihkan kembali hak-haknya dalam hal pembinaan karier sehingga diharapkan dapat meningkatkan etos dan disiplin kerja sebagai abdi negara, pelayan, pelindung dan pengayom masyarakat guna mewujudkan Polri yang Presisi. Kegiatan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 bertempat di ruang sidang Bidpropam Polda Bali.

Gambar 13

Kegiatan Rehabilitasi Binlihpers oleh Subbagrehabpers



Output dari kegiatan ini adalah pulihnya hak-hak anggota yang telah selesai menjalani hukuman dalam rangka pembinaan karier selanjutnya dan meningkatnya etos serta disiplin kerja anggota sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat untuk mewujudkan Polri yang Presisi.

f. Pelaksanaan koordinasi dengan Kabidkum Polda Bali dalam rangka harmonisasi/sinkronisasi Standar Operasional Prosedur Sistem Mediasi Masalah dan Rehabilitasi Profesi Bidpropam Polda Bali.

Pada tahapan ini telah dilaksanakan kegiatan harmonisasi dan sinkronisasi Standar Operasional Prosedur (SOP) Sistem Mediasi Masalah dan Rehabilitasi Profesi sebagai acuan dalam pelaksanaan teknis kegiatan. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 15 November 2024 pukul 11.00 Wita bertempat di ruang rapat Bidkum Polda Bali

Gambar 14
Harmonisasi dan Sinkronisasi SOP



Output yang dihasilkan dalam kegiatan ini adalah penetapan secara legal Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan mediasi masalah dan Rehabilitasi profesi.

g. Pencapaian Sosialisasi kegiatan Sistem Mediasi Masalah dan Rehabilitasi Profesi melalui Media Online dan Cetak

RADAR BALI
Lintas Dewata
 Jember, 22 November 2024 | HALAMAN 2

Dihadiri Belasan Ribu Masyarakat, Antusias Teriakkan Dukungan Total ke Paket GP

AMUPRA, Radar Bali—Kegiatan sosialisasi peningkatan kompetensi dan profesionalisme Anggota Komisi Pengawasan Masalah dan Rehabilitasi Profesi (KPMR) Polda Bali, Kamis (21) di dihadiri antusias 12 ribu masyarakat di Gedung Pura Pura, Denpasar.

Antusias masyarakat teriakan dukungan total ke Paket GP (Gawir, Pahlawan, dan Patriot) yang akan dilaksanakan pada 2025. Acara ini dihadiri oleh Kepala Kepolisian Daerah Bali, Komandan Satuan Polisi (Kasatpol) dan Kepala Kepolisian Sektor (Kasatpolsek).

Kasatpol Bali, Komandan Satuan Polisi (Kasatpol) dan Kepala Kepolisian Sektor (Kasatpolsek) menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme Anggota KPMR Polda Bali. Kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja KPMR Polda Bali.

Kasatpol Bali, Komandan Satuan Polisi (Kasatpol) dan Kepala Kepolisian Sektor (Kasatpolsek) menyampaikan bahwa kegiatan ini akan dilaksanakan secara bertahap di seluruh wilayah Polda Bali. Kegiatan ini juga akan melibatkan masyarakat luas dalam proses sosialisasi dan peningkatan kompetensi.

Kasatpol Bali, Komandan Satuan Polisi (Kasatpol) dan Kepala Kepolisian Sektor (Kasatpolsek) menyampaikan bahwa kegiatan ini akan dilaksanakan secara bertahap di seluruh wilayah Polda Bali. Kegiatan ini juga akan melibatkan masyarakat luas dalam proses sosialisasi dan peningkatan kompetensi.

Kasatpol Bali, Komandan Satuan Polisi (Kasatpol) dan Kepala Kepolisian Sektor (Kasatpolsek) menyampaikan bahwa kegiatan ini akan dilaksanakan secara bertahap di seluruh wilayah Polda Bali. Kegiatan ini juga akan melibatkan masyarakat luas dalam proses sosialisasi dan peningkatan kompetensi.

STRATEGI
 PENINGKATAN PENGAWASAN MELALUI SISTEM MEDIASI MASALAH & REHABILITASI PROFESI DI PROPAM POLDA BALI

STRATEGI PENGAWASAN MELALUI SISTEM MEDIASI MASALAH & REHABI..
 583 x ditonton 2 h lalu ...selengkapnya

nanang prihasmoko 134

262 | Bagikan | Download

Komentar 82

Tambahkan komentar...

Narasi Implementasi Dalam Terobosan Kreatif: Strategi Peningkatan Pengawasan Melalui Sistem Mediasi Masalah dan Rehabilitasi Profesi di Propam Polda Bali

Oleh: AKBP Nanang Pri Hasmoko. ST. ...
 radarbali.jawapos.com

STRATEGI PENINGKATAN PENGAWASAN MELALUI SISTEM MEDIASI MASALAH & REHABILITASI PROFESI DI PROPAM POLDA BALI

Strategi peningkatan pengawasan melalui sistem mediasi masalah dan rehabilitasi profesi di Propam Polda Bali merupakan terobosan kreatif yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan. Strategi ini melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat, dalam proses penyelesaian masalah dan rehabilitasi profesi.

Strategi ini melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat, dalam proses penyelesaian masalah dan rehabilitasi profesi. Strategi ini melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat, dalam proses penyelesaian masalah dan rehabilitasi profesi.

Strategi ini melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat, dalam proses penyelesaian masalah dan rehabilitasi profesi. Strategi ini melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat, dalam proses penyelesaian masalah dan rehabilitasi profesi.

Strategi ini melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat, dalam proses penyelesaian masalah dan rehabilitasi profesi. Strategi ini melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat, dalam proses penyelesaian masalah dan rehabilitasi profesi.

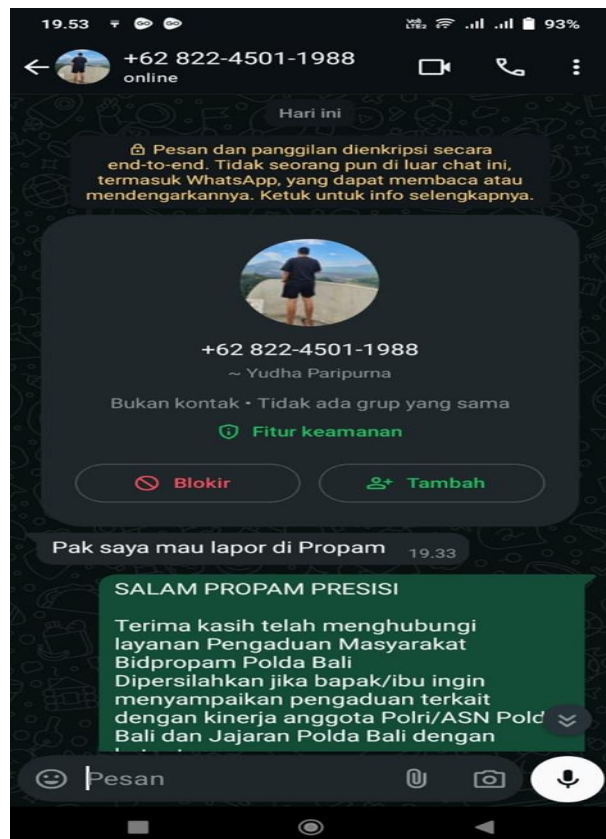
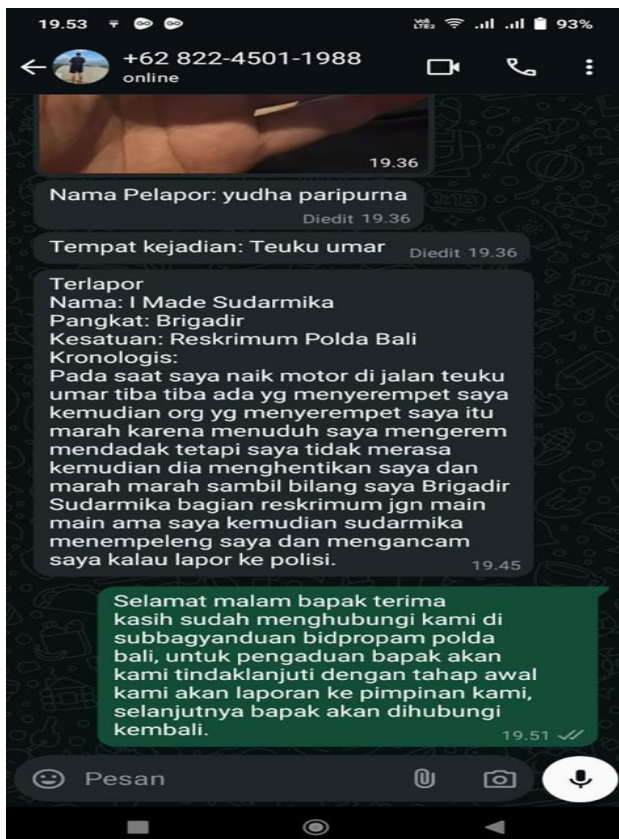
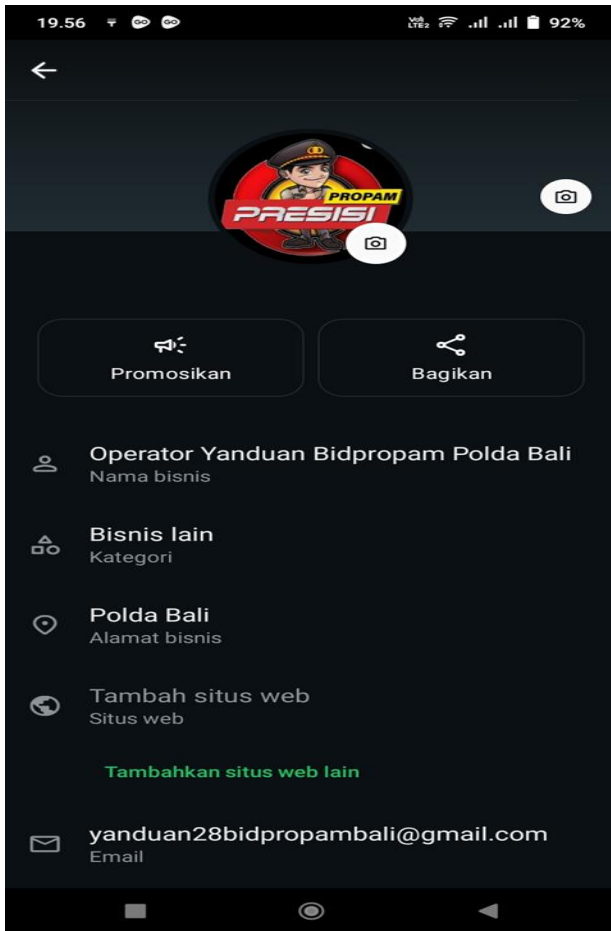
STRATEGI PENINGKATAN PENGAWASAN MELALUI SISTE...

Oleh: AKBP Nanang Pri Hasmoko. ST. ...
 frekuensimediabali.com

STRATEGI PENINGKATAN PENGAWASAN MELALUI SISTE...
 FREKUENSI MEDIA INDONESIA COM B...
 frekuensimediabali.com

<https://radarbali.jawapos.com/bali/705339442/narasi-implementasi-dalam-terobosan-kreatif-strategi-peningkatan-pengawasan-lewat-sistem-mediiasi-masalah-rehabilitasi-profesi-di-propam-polda-bali>

<https://frekuensimediabali.com/2024/11/21/strategi-peningkatan-pengawasan-melalui-sistem-mediiasi-masalah-dan-rehabilitasi-profesi-di-propam-polda-bali/>



B. Implementasi Strategi Marketing

Strategi pemasaran adalah sesuatu yang meliputi seluruh sistem yang berhubungan dengan tujuan untuk merencanakan sampai dengan mempromosikan dan mendistribusikan barang dan jasa yang bisa memuaskan kebutuhan konsumen aktual maupun potensial.

Guna mewujudkan proyek perubahan ini, *project leader* mengimplementasikan strategi marketing dengan stakeholder terkait sehingga upaya mediasi masalah dan Rehabilitasi/pemulihan profesi menuju Polri yang Presisi di lingkungan Bidpropam Polda Bali dapat terwujud sesuai harapan melalui upaya-upaya sebagai berikut:

1. Melakukan sosialisasi kepada personel Bidpropam Polda Bali tentang Rancangan Proyek Perubahan yang disusun terkait dengan Sistem Mediasi Masalah dan Rehabilitasi Profesi di lingkungan Bidpropam Polda Bali;
2. Melakukan koordinasi dan kolaborasi melalui pembentukan Tim Kerja Efektif Rancangan Proyek Perubahan sehingga apa yang menjadi tujuan dari penyusunan proyek perubahan ini dapat terwujud sesuai harapan dan bermanfaat bagi Institusi Polri khususnya, serta bagi masyarakat pada umumnya;
3. Melakukan sosialisasi Sistem Mediasi Masalah dan Rehabilitasi Profesi dengan memanfaatkan media zoom, media elektronik maupun media sosial.
4. Melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan unsur Pimpinan dan PJU Polda Bali guna memperoleh dukungan dalam mewujudkan proyek perubahan ini;
5. Melakukan koordinasi dengan pihak eksternal dalam hal ini Pimpinan Redaksi Media, POM TNI dan Ombudsman RI yang merupakan Lembaga eksternal pengawas kinerja pelayanan Kepolisian.

Rencana strategi marketing dibagi ke dalam 3 (tiga) tahapan yaitu analisis strategi marketing, identifikasi *stakeholder* yang dilanjutkan dengan pemetaan dan komunikasi untuk menarik *stakeholder* yang memiliki kepentingan rendah menjadi *stakeholder* dengan kepentingan atau pengaruh yang tinggi serta mengidentifikasi potensi resiko juga rencana mitigasi yang dalam prosesnya menggunakan strategi untuk mencapai hasil yang sesuai dengan harapan dan tujuan.

C. Strategi Marketing

Rencana strategi marketing dibagi dalam 3 (tiga) tahapan yaitu analisis strategi marketing, identifikasi *stakeholder* yang dilanjutkan dengan pemetaan *stakeholder* dan komunikasi untuk menarik *stakeholder* yang memiliki kepentingan rendah menjadi *stakeholder* dengan kepentingan atau pengaruh yang tinggi dan mengidentifikasi potensi resiko dan rencana mitigasi yang dalam prosesnya menggunakan strategi untuk mencapai hasil proyek perubahan sesuai dengan harapan dan tujuan.

1. Analisis Strategi Marketing

Dalam meningkatkan kolaborasi lintas *stakeholder* sehingga mendapatkan dukungan dalam pelaksanaan perubahan, diperlukan strategi marketing sektor publik. Adapun tahapannya meliputi identifikasi dan pemetaan sumber daya, dasar hukum dan *stakeholders*, kemudian menentukan rencana strategi marketing dan teknik komunikasi kepada *stakeholders*.

Peta Sumber Daya

a. Sumber Daya Manusia (SDM):

1) **Stakeholder**

Menjadi kekuatan dari terlaksananya proyek perubahan ini, masing-masing mempunyai pengaruh dan kepentingan atas proyek perubahan, dalam hal ini stakeholder yang terkait dengan proyek perubahan ini diantaranya Kapolda Bali, Wakapolda Bali, Irwasda, Karo SDM, Kabidkum, Kasubbidprovos Bidpropam, Kasubbidwabprof Bidpropam, Kasubbagyanduan, Kasubbagrehabpers, Kasubbagrenmin Bidpropam Polda Bali.

2) **Team work**

Merupakan tim kerja efektif yang terdiri dari:

- a) Sekretaris yang membidangi administrasi guna mendukung pemenuhan administrasi dan dokumentasi laporan;

- b) Bidang penegakan hukum yang memberikan dukungan dalam hal penegakan hukum terhadap anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin maupun etika profesi;
- c) Bidang pembinaan dan pemulihan profesi sebagai pengampu kegiatan pembinaan dan pemulihan profesi personel;
- d) Bidang pelayanan pengaduan masyarakat yang menjadi obyek dari proyek perubahan dalam memberikan pelayanan pengaduan masyarakat;
- e) Bidang Sumber Daya yang mendukung pemenuhan sumber daya manusia, sarana prasarana dan anggaran;
- f) Personel Subbagyanduan dan Subbagrehabpers Bidpropam Polda Bali yang mengawaki kegiatan sistem mediasi permasalahan dan pembinaan pemulihan profesi Polri.

b. Anggaran:

Dukungan anggaran untuk kegiatan sistem mediasi masalah pada Subbagyanduan Bidpropam Polda Bali dan pembinaan rehabilitasi pemulihan profesi Polri pada Subbagrehabpers Bidpropam Polda Bali saat ini belum terdukung anggaran.

c. Sarana dan prasarana:

Dukungan sarana dan prasarana untuk kegiatan pada Subbagyanduan dan Subbagrehabpers Bidpropam Polda Bali belum terdukung secara maksimal.

d. Metode:

Metode yang digunakan adalah dengan melaksanakan diskusi, rapat, penunjukan tim dan melaporkan kepemimpinan.

2. Sumber Daya Legal (Dasar Hukum)

Secara umum terkait pembinaan pemulihan profesi Polri pada Subbagrehabpers mengacu pada peraturan yang telah ditetapkan antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- b. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Disiplin Anggota Polri.
- c. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- d. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang SOTK Komisi Kode Etik Profesi Polri.
- e. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelesaian pelanggaran disiplin anggota Polri.
- f. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelesaian pelanggaran disiplin PNS Polri.
- g. Peraturan Kepala Divisi Propam Polri no 4 tahun 2021 tentang tata cara penyelesaian perdamaian pada pelanggaran disiplin dan kode etik Profesi Polri
- h. Peraturan Kepala Divisi Propam Polri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Rehabilitasi Personel Polri.
- i. Surat Telegram Kapolri Nomor: ST/965/V/BIN./2022, tanggal 13 Mei 2022 tentang Pembinaan dan Pemulihan Profesi (Binlihprof) terhadap anggota dan PNS Polri yang bermasalah.

3. Identifikasi *Stakeholder*

Dalam rancangan implementasi sebuah perubahan, identifikasi *stakeholder* menjadi sangat penting. Identifikasi *stakeholder* ini diperlukan untuk mengetahui pihak-pihak yang memberikan dampak terhadap proses perubahan atau terkena dampak dari adanya proses perubahan. Proyek

perubahan dengan gagasan strategi sistem mediasi permasalahan dan pemulihan profesi menuju Polri yang Presisi melibatkan stakeholder baik dari internal Propam maupun external Propam. *Stakeholder* dalam proyek perubahan ini sebagai berikut :

Stakeholder internal

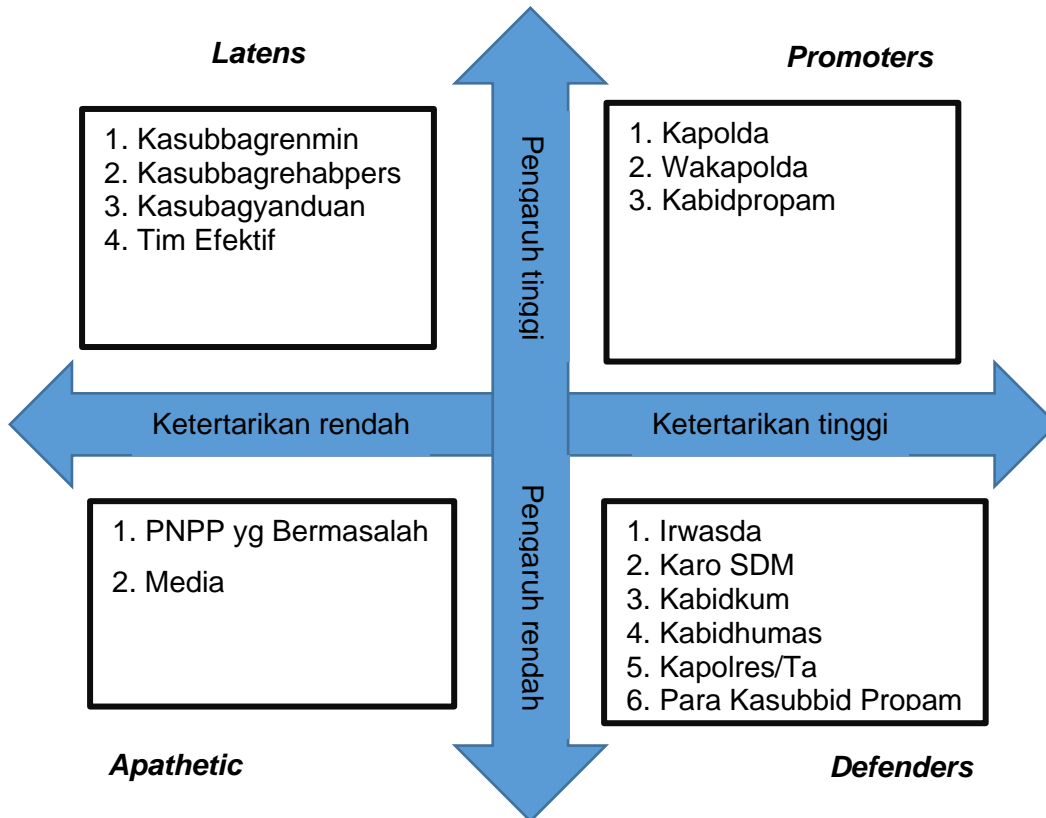
No	Stakeholder	Strategi Komunikasi	Dukungan / Pengaruh	Analisa Stakeholder
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kabid Propam	Komunikasi dan konsultasi	++	Promoter
2	Kasubbid wabprof	Komunikasi dan koordinasi	++	Defender
3	Kasubbid Provos	Komunikasi dan koordinasi	++	Defender
4	Kasubagrenmin	Komunikasi dan koordinasi	++	Latens
5	Kasubagrehab	Komunikasi dan koordinasi	++	Latens
6	Kasubagyanduan	Komunikasi dan koordinasi	++	Latens

Stakeholder eksternal

No	Stakeholder	Strategi Komunikasi	Dukungan / Pengaruh	Analisa Stakeholder
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kapolda	Konsultasi, koordinasi dan komunikasi	++	Promoter
1	Wakapolda	Konsultasi, koordinasi dan komunikasi	++	Promoter
2	Irwasda	Konsultasi, koordinasi dan komunikasi	++	Defender
3	Karo SDM	Konsultasi, koordinasi dan komunikasi	+/-	Defender
4	Kabidkum	Konsultasi, koordinasi dan komunikasi	+/-	Defender
5	Kabidhumas	Konsultasi, koordinasi dan komunikasi	+/-	Defender
6.	Kapolres/Ta	Konsultasi, koordinasi dan komunikasi	+/-	Defender

3. Pemetaan Stakeholder

Berdasarkan identifikasi stakeholder diatas selanjutnya dilakukan pemetaan, hal ini untuk memudahkan menganalisis dan tindakan lebih lanjut



Promoter

Promoter adalah *stakeholder* yang memiliki kepentingan tinggi dan pengaruh tinggi/besar terhadap proyek perubahan. *Stakeholder* yang masuk dalam kuadran ini adalah:

- Kapolda dengan fungsi memberikan dukungan dan masukan pada proyek perubahan.
- Wakapolda dengan fungsi sebagai koordinasi dan konsultasi, memberikan dukungan dan masukan pada proyek perubahan
- Kabidpropam dengan fungsi instruksi dan *decision maker* tertinggi pada Satker Bidpropam;

Defender

Stakeholder pada kuadran ini tergolong memiliki kepentingan tinggi, tetapi pengaruh rendah. *Stakeholder* yang masuk dalam kuadran ini adalah:

- a. Irwasda dengan fungsi koordinasi dan konsultasi mengenai sistem yang akan dirancang dalam pelaksanaan proyek perubahan ini.
- b. Karo SDM merupakan pengampu kebijakan dibidang sumber daya manusia Polri yang sangat *concern* terhadap pembinaan karier dan perawatan personel Polri.
- c. Kabidkum merupakan pengampu kebijakan dibidang peraturan hukum dan perundang-undangan yang mengawal secara hukum dan legalitas proyek perubahan ini.
- d. Kabidhumas yang mengawal secara hukum dan legalitas proyek perubahan ini.
- e. Kasubbidwabprof dengan fungsi koordinasi dan merupakan tim kerja utama yang berkepentingan langsung dengan proyek perubahan ini.
- f. Kasubbidprovos dengan fungsi koordinasi dan merupakan tim kerja utama yang berkepentingan langsung dengan proyek perubahan ini.

Latent

Pada kuadran ini diidentifikasi *stakeholder* yang kurang memiliki kepentingan terhadap proyek perubahan, tetapi memiliki pengaruh yang besar terhadap proyek perubahan maupun *stakeholder* sendiri. *Stakeholder* yang masuk dalam kuadran ini adalah:

- a. Kasubbagrenmin dengan fungsi koordinasi dan merupakan tim kerja utama yang berkepentingan langsung dengan proyek perubahan ini
- b. Kasubbagrehabpers sebagai *user* utama dari proyek perubahan.
- c. Kasubbagyanduan sebagai *user* utama dari proyek perubahan.
- d. Tim efektif merupakan tim kerja utama yang berkepentingan langsung dengan proyek perubahan ini

Apathetic

Pada kuadran ini adalah *stakeholder* yang kurang memiliki pengaruh dan kurang juga memiliki kepentingan. *Stakeholder* pada kuadran ini adalah:

- a. PNPP yang bermasalah merupakan pengampu yg bersentuhan langsung dibidang peraturan hukum dan perundang-undangan yang mengawal secara hukum dan legalitas proyek perubahan ini.
- b. Media yang mengawal dan memonitor secara hukum dan legalitas proyek perubahan ini.

D. Bentuk Strategi Marketing

Strategi marketing terhadap hasil proyek perubahan dilakukan dengan memperhatikan elemen dalam pemasaran sektor public, yaitu 4 P 1 C (*Product, Price, Promotion, Place* dan *Costumer*).

Product.

Product (produk) yang dihasilkan dari proyek perubahan ini adalah tersusunnya Standar Operasional Prosedur (SOP) Sistem Mediasi Masalah dan rehabilitasi pemulihan Profesi sebagai pedoman dalam pelaksanaan mediasi masalah dan pemulihan profesi.

Price

Price (harga) yang harus dibayarkan untuk dapat memperoleh produk dari proyek perubahan ini adalah dapat tertanganinya laporan masyarakat yang di tindak lanjuti dengan langsung dan cepat sehingga tidak menimbulkan beban harus datang lapor ke kantor polisi.

Place

Place (tempat) memasarkan produk dari proyek perubahan ini antara lain:

Seluruh kantor satuan kerja milik Polda Bali

Promotion

Beberapa elemen yang dapat dioptimalkan terkait promosi antara lain para Kabag SDM, Kapolsek dan Kasipropam diwilayah yang akan menjalankan fungsi *branding* dari proyek perubahan ini ke pihak eksternal Bidpropam serta *change agent* diinternal Bidpropam yang akan menjadi duta proyek perubahan ini, dimulai dari Subbagrehabpers, Subagyarduan, Subbidprovos, Subbidwabprof, Subbidpaminal dan Subbagrenmin.

Customer

Sasaran utama sebagai *customer* untuk menggunakan *output* dari proyek perubahan ini adalah para Kasatker, kasatwil dan anggota Polri.

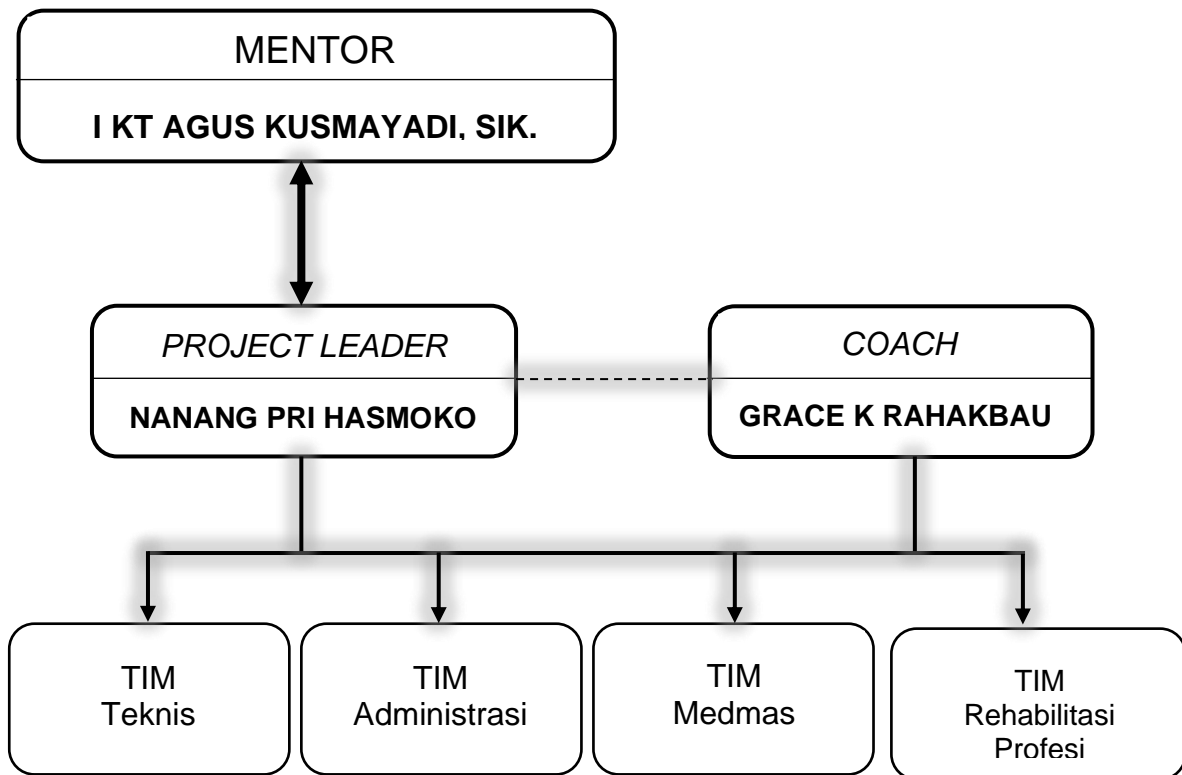
1. Strategi Komunikasi

Strategi Komunikasi Stakeholder

NO	PEMANGKU KEPENTINGAN	EKSPEKTASI	STRATEGI KOMUNIKASI
1	2	3	4
1	Kapolda	Memberikan dukungan dan masukan pada proyek perubahan	Memberikan laporan dan Bimbingan
2	Wakapolda	Konsultasi dan memberikan dukungan serta masukan pada proyek perubahan.	Memberikan laporan dan mohon bimbingan
3	Irwasda	Konsultasi dan memberikan masukan mengenai sistem yang akan dirancang dalam pelaksanaan proyek perubahan ini.	Memberikan laporan dan diskusi berkala
4	Kabidpropam	Menyetujui dan mengesahkan proyek.	Memberikan laporan dan evaluasi

5	Karo SDM	Memberikan dukungan dan masukan terkait kebutuhan personel untuk obyek proyek perubahan.	Menyampaikan informasi secara memadai
6	Kabidkum	Memberikan dukungan secara hukum dan legalitas proyek perubahan ini	Menyampaikan informasi secara memadai
7	Kabidhumas	Memberikan dukungan secara hukum dan legalitas proyek perubahan ini	Menyampaikan informasi secara memadai
8	Kasubbidwabprof	Memberikan dukungan dan masukan terkait proyek perubahan dan bersama-sama melaksanakan proyek perubahan	Diskusi berkala
9	Kasubbidprovos	Memberikan dukungan dan masukan terkait proyek perubahan dan bersama-sama melaksanakan proyek perubahan	Diskusi berkala
10	Kasubbagrehabpers dan Kasubagyanduan	Memberikan dukungan dan masukan terkait proyek perubahan dan bersama-sama melaksanakan proyek perubahan	Diskusi berkala
11	Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Bali	Memberikan dukungan dan masukan terkait proyek perubahan	Menyampaikan informasi secara memadai
12	Media Organisasi Siber Indonesia Provinsi Bali	Memberikan dukungan dan masukan terkait proyek perubahan	Menyampaikan informasi di Media secara memadai

Tim Kerja Proyek Perubahan



	PERAN	URAIAN
(1)	(2)	(3)
1	<i>Mentor</i>	Memberikan bimbingan, arahan dan dukungan kepada <i>Project Leader</i> dan memantau perkembangan capaian proyek perubahan
2	<i>Coach</i>	Memberikan bimbingan dalam merancang dan melaksanakan proyek perubahan

3	<i>Project Leader</i>	Merancang dan memimpin proyek perubahan, merencanakan <i>milestone</i> , melakukan implementasi, koordinasi, pembagian tugas, membuat evaluasi dan laporan proyek perubahan
4	Tim Teknis	Menyusun rumusan sistem pembinaan pemulihan profesi, melakukan koordinasi dengan <i>Stakeholder</i> terkait, menyiapkan desain dan mengimplementasikan proyek perubahan
5	Tim Administrasi	Menyiapkan dan berkoordinasi terhadap seluruh administrasi yang diperlukan dalam pelaksanaan proyek perubahan
6	Tim Simama	Menyusun SOP pelaksanaan Simama dan pelaksanaan implementasi Simama termasuk administrasi yang dibutuhkan
7	Tim Rehabilitasi Profesi	Menyusun SOP pelaksanaan Pembinaan Pemulihan Profesi dan pelaksanaan implementasi binlihprof termasuk administrasi yang dibutuhkan

2. Potensi Resiko dan Rencana Mitigasi

Pada setiap *milestone* baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang terdapat potensi resiko yang muncul. Oleh karena itu perlu dilakukan mitigasi resiko terhadap setiap tahapan dalam *milestone* untuk mengurangi dampak yang muncul. Mitigasi yang dilakukan dituangkan dalam tabel dibawah ini:

No	<i>Milestone</i>	Resiko	Dampak	Mitigasi Resiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Membangun tim efektif	Masing-masing fungsi mempunyai prioritas tugas atau kegiatan lain	Tim tidak efektif	Anggota tim dipilih secara khusus melalui Surat Perintah Tugas (Springas)

2	Membangun koordinasi dan kolaborasi dengan <i>Stakeholder</i>	Adanya kesibukan <i>Stakeholder</i> pada tugas khusus atau prioritas lain	Lambatnya koordinasi dan kolaborasi	Melakukan penyesuaian jadwal sesuai keluangan waktu <i>Stakeholder</i>
3	Penyusunan sistem mediasi masalah dan pembinaan pemulihan profesi Polri	Belum adanya SOP dan minimnya personel	Metode pembinaan belum dapat dilakukan secara maksimal	Menyusun SOP sesuai aturan yang berlaku terkait sistem mediasi masalah dan pemulihan profesi
4	Menyusun rancangan Kerjasama dengan Satker terkait	Adanya kesibukan <i>Stakeholder</i> pada prioritas lain	Metode pembinaan belum dapat dilakukan secara maksimal	Melakukan penyesuaian jadwal sesuai keluangan waktu <i>Stakeholder</i>
5	Evaluasi dan penyempurnaan program jangka pendek	Adanya tugas prioritas lain dari salah satu anggota tim	Informasi hasil evaluasi tidak dapat tersampaikan secara langsung	Melakukan notulensi pada setiap kegiatan evaluasi
6	Pembangunan sistem mediasi masalah dan pembinaan pemulihan profesi Polri	Adanya tugas prioritas lain dari salah satu anggota tim	Pembangunan sistem/metode tidak tepat waktu	Menyiapkan cadangan anggota tim lain
7	Evaluasi dan penyempurnaan program jangka menengah	Adanya tugas prioritas lain dari salah satu anggota tim	Informasi hasil evaluasi tidak dapat tersampaikan secara langsung	Melakukan notulensi pada setiap kegiatan evaluasi

8	<i>Milestone</i>	<i>Resiko</i>	<i>Dampak</i>	<i>Mitigasi Resiko</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
8	Sosialisasi sistem mediasi masalah dan kegiatan pembinaan pemulihan profesi Polri ditingkat Polda dan Polres jajaran	Sosialisasi tidak tersampaikan dengan baik	Satker/Satwil kurang memahami terkait sistem pembinaan dan pemulihan profesi Polri	Membuat alternatif sosialisasi dengan cara dan bentuk lain
9	Koordinasi dan evaluasi secara berkala	Adanya tugas prioritas lain dari salah satu anggota tim	Informasi hasil evaluasi tidak dapat tersampaikan secara langsung	Melakukan notulensi pada setiap tahapan kegiatan dan evaluasi
10	Pelaksanaan kegiatan secara berkelanjutan			

E. Mata Pelatihan Pilihan

1. Hak Asasi Manusia

Materi pelatihan Hak Asasi Manusia (HAM) ini telah memberi manfaat khususnya pada peningkatan fungsi pengawasan untuk memastikan bahwa penghargaan terhadap Hak Asasi Manusia telah diimplementasikan dalam pelaksanaan tugas Polri sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat serta dalam hal penegakan hukum.

2. Manajemen Pemerintahan

Manajemen Pemerintahan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam mendukung program pemerintah khususnya institusi Polri guna mewujudkan personel Polri yang Presisi dalam meningkatkan profesionalisme pelayanan kepada masyarakat sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri.

3. Manajemen Keuangan Negara

Dalam proyek perubahan ini manajemen keuangan menjadi cermin bagi pimpinan dalam merencanakan realisasi anggaran dan sarana prasarana pendukung dalam pelaksanaan tugas peningkatan pelayanan kepada masyarakat khususnya program Sistem Mediasi Masalah dan Rehabilitasi Profesi guna meminimalisir pelanggaran dan pengaduan masyarakat terhadap perilaku dan kinerja anggota Polri, serta pemulihan profesi terhadap anggota Polri yang telah menjalani pengawasan juga hukuman baik disiplin, etika maupun pidana untuk dapat kembali melanjutkan pembinaan kariernya.

F. Pelaksanaan Strategi Pengembangan Kompetensi

Berdasarkan hasil penilaian peserta dan penilaian dari mentor terhadap proses pengembangan kompetensi *action leader* yang merepresentasikan aspek sikap dan perilaku peserta pelatihan kepemimpinan mencakup 3 (tiga) kompetensi, yaitu:

1) Integritas

Dalam penilaian kompetensi Integritas yang mencakup 6 (enam) sub komponen, antara lain : Tanggung jawab, Komitmen, Kedisiplinan, Kejujuran, Konsistensi, Pengambilan Keputusan Dilematis dengan hasil nilai rata-rata ≥ 8.00

2) Kerjasama

Dalam penilaian kompetensi Kerja Sama yang mencakup 5 (lima) sub komponen, antara lain : Kerjasama Internal, Eksternal, Komunikasi, Fleksibilitas, Komitmen dalam Tim dengan hasil nilai rata-rata ≥ 8.00 .

3) Mengelola Perubahan

Dalam penilaian kompetensi Mengelola Perubahan yang mencakup 5 (lima) sub komponen, antara lain : Orientasi Pelayanan, Adaptabilitas, Pengembangan diri dan orang lain, Orientasi pada hasil, Inisiatif dengan hasil nilai rata-rata ≥ 8.00 .

G. Pemetaan Sikap Perilaku Kepemimpinan dan Strategi Pengembangan Potensi Diri

1. Pemetaan Sikap Perilaku Kepemimpinan

Hasil assessment antara *Project Leader* dan mentor terlihat seperti rekapitulasi tabel di bawah ini

REKAP NILAI GABUNGAN PESERTA DAN MENTOR					
Nama	:	NANANG PRI HASMOKO, S.T., S.H., M.H.	Nama Mentor	:	I KETUT AGUS KUSMAYADI, S.I.K., S.H.
NRP	:	75020662	NRP	:	74080669
Jabatan	:	KASUBBIDPAMINAL BIDPROPAM	Jabatan	:	KABIDPROPAM
Instansi	:	POLDA BALI	Instansi	:	POLDA BALI
Program	:	PKN II Angkatan XXXI TH 2024			
Komponen	Sub Komponen	Nilai Peserta	Nilai Mentor	Nilai Rata-Rata	Kualifikasi
Integritas	Tanggung jawab	8	9	8,70	Baik
	Komitmen	9	9	9,00	Istimewa
	Kedisiplinan	9	9	9,00	Istimewa
	Kejujuran	9	9	9,00	Istimewa
	Konsistensi	9	9	9,00	Istimewa
	Pengambilan Keputusan	9	9	9,00	Istimewa
	Rata-Rata		8,83	9,00	8,95
Kerjasama	Kerjasama Internal	9	9	9,00	Istimewa
	Kerjasama Eksternal	9	9	9,00	Istimewa
	Komunikasi	9	9	9,00	Istimewa
	Fleksibilitas	9	8	8,30	Baik
	Komitmen dalam Tim	9	9	9,00	Istimewa
	Rata-Rata		9,00	8,80	8,86

Mengelola Perubahan	Pelayanan Publik	9	8	8,30	Baik
	Adaptabilitas	9	9	9,00	Istimewa
	Pengembangan diri dan orang lain	8	8	8,00	Baik
	Orientasi pada hasil	9	8	8,30	Baik
	Inisiatif	8	9	8,70	Baik
	Rata-Rata	8,60	8,40	8,46	Baik
Rata-Rata Nilai Sikap Prilaku:		8,81	8,73	8,76	Baik

Keterangan Kualifikasi:

9 - 10	: Istimewa
7 - 8,99	: Baik
5 - 6,99	: Cukup
3 - 4,99	: Kurang
1 - 2,99	: Sangat Kurang

2. Strategi Pengembangan Potensi

Terdapat 3 (tiga) komponen yang dinilai yaitu integritas, Kerjasama dan mengelola perubahan. Berdasarkan hasil penilaian tersebut menunjukkan bahwa dari 16 Sub komponen seluruhnya memperoleh nilai rata-rata di atas 8,0 dengan predikat istimewa dan baik namun tetap untuk selalu mengembangkan diri guna meningkatkan profesionalitas sebagai abdi negara pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, strategi pengembangan potensi yang akan *Project Leader* lakukan setelah melihat gap potensi diri antara lain dengan melakukan:

1. Menerima *coaching* dari mentor untuk terlibat dalam tim kerja efektif yang bertujuan untuk melakukan percepatan dan perbaikan proses sesuai dengan kebijakan baru yang telah ditetapkan.



2. Belajar mandiri untuk memperbanyak referensi tentang *best practice* penerapan kebijakan atau aturan yang dilakukan oleh instansi atau unit kerja lain untuk membangun kesigapan dalam merespon perubahan.



3. Penugasan memimpin dalam tim kerja yang secara spesifik akan menyiapkan langkah-langkah praktis menindaklanjuti suatu kebijakan atau arahan perubahan.



Berikut ini strategi pengembangan untuk tim efektif, diantaranya:

1. Melatih tim (*coaching*) agar memahami lebih luas proses pelaksanaannya sehingga tidak terpaku pada lingkup tugas spesifik yang ditanganinya melalui berbagai pelatihan baik klasikal maupun non klasikal.



2. Penugasan untuk terlibat langsung dalam tim kerja efektif yang bertujuan melakukan percepatan dan perbaikan sesuai dengan kebijakan baru yang telah ditetapkan.



3. Penugasan kepada tim kerja yang secara spesifik akan menyiapkan langkah-langkah praktis menindaklanjuti suatu kebijakan atau arahan perubahan.



H. Kaitan Proyek Perubahan Dengan Materi Pelatihan

1. Hak Asasi Manusia

Materi pelatihan Hak Asasi Manusia (HAM) ini telah memberi manfaat khususnya pada peningkatan fungsi pengawasan untuk memastikan bahwa penghargaan terhadap Hak Asasi Manusia telah diimplementasikan dalam pelaksanaan tugas Polri sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat serta dalam hal penegakan hukum.

2. Manajemen Pemerintahan

Manajemen Pemerintahan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam mendukung program pemerintah khususnya institusi Polri guna mewujudkan personel Polri yang Presisi dalam meningkatkan profesionalisme pelayanan kepada masyarakat sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri.

3. Manajemen Keuangan Negara

Dalam proyek perubahan ini manajemen keuangan menjadi cermin bagi pimpinan dalam merencanakan realisasi anggaran dan sarana prasarana pendukung dalam pelaksanaan tugas peningkatan pelayanan kepada masyarakat khususnya program Sistem Mediasi Masalah dan Rehabilitasi Profesi guna meminimalisir pelanggaran dan pengaduan masyarakat terhadap perilaku dan kinerja anggota Polri, serta pemulihan profesi terhadap anggota Polri yang telah menjalani pengawasan juga hukuman baik disiplin, etika maupun pidana untuk dapat kembali melanjutkan pembinaan kariernya.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dengan diimplementasikannya proyek perubahan ini, maka:
 - a. Sistem Mediasi Masalah diharapkan dapat menurunkan jumlah pelanggaran dan pengaduan masyarakat terkait kinerja maupun perilaku anggota Polri Polda Bali.
 - b. Maksimalnya kegiatan rehabilitasi pembinaan dan pemulihan profesi diharapkan etos kerja dan disiplin anggota Polri semakin meningkat.
2. Dengan terwujudnya Polri yang Presisi, niscaya kepercayaan masyarakat terhadap Polri semakin meningkat.

B. Lesson Learnt

Peran pemimpin sangat menentukan bagi pertumbuhan dan kelangsungan hidup suatu organisasi, termasuk dalam memberikan pengaruh terhadap perilaku bawahannya untuk mencapai tujuan organisasi. Penerapan organisasi pembelajar di lingkungan Bidpropam Polda Bali terkait implementasi proyek perubahan ini sudah dilakukan dengan baik, dan untuk meningkatkan kinerja organisasi, perlu dilakukan beberapa langkah perbaikan pada penyediaan dan penyebaran informasi pembelajaran bagi seluruh personel, mengoptimalkan kompetensi personel dengan memberikan pelatihan khusus, meningkatkan kolaborasi dan pembelajaran tim, menjalin hubungan dan komunikasi yang baik dengan lingkungan eksternal dan internal, serta melakukan evaluasi terhadap langkah strategis yang diambil untuk mencapai target tujuannya.

Organisasi pembelajar memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan kinerja organisasi. Kepemimpinan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap terbentuknya organisasi pembelajar, berbeda dengan budaya organisasi yang memiliki hubungan tidak signifikan dalam membentuk organisasi pembelajar. Kepemimpinan secara langsung tanpa melalui organisasi pembelajar memiliki hubungan yang negatif namun tidak signifikan dengan kinerja organisasi, sedangkan melalui organisasi

pembelajar memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap kinerja organisasi. Budaya organisasi tanpa melalui organisasi pembelajar memiliki hubungan negatif namun tidak signifikan dengan kinerja organisasi, namun bila melalui organisasi pembelajar, kinerja organisasi dapat ditingkatkan. Strategi penting yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja dalam proyek perubahan ini adalah mengadakan sistem evaluasi dan monitoring yang terukur serta rewards dan punishment yang transparan. Pimpinan melakukan komunikasi terbuka dengan personel untuk dapat mencapai tujuan. Pimpinan unit kerja juga melakukan mentoring kepada anggota timnya secara berjenjang, dan memasukkan proses belajar dan mengajar sebagai salah satu indikator penilaian kinerja. Strategi tersebut dilakukan melalui prinsip-prinsip organisasi pembelajar untuk mendorong peningkatan kinerja organisasi. Beberapa hal yang dapat diambil dalam proses pembelajaran dalam implementasi proyek perubahan ini adalah sebagai berikut:

1. Pembelajaran tidak hanya dilakukan pada level individu dan tim, namun juga pada level organisasi. Pembelajaran bila diterapkan di kegiatan operasional harian akan mengubah cara pandang, pola pikir terhadap peluang perbaikan dan akhirnya dapat mendorong peningkatan efektivitas organisasi.
2. Pelatihan yang diberikan agar diterapkannya di pekerjaan sehari-hari serta dievaluasi efektifitas pelatihannya oleh atasan dan bagian sumber daya manusia. Untuk memotivasi anggota dan menciptakan iklim pembelajaran berkelanjutan perlu diberikan juga penghargaan bagi anggota yang mencapai target belajarnya dan menjadi pengajar anggota lainnya, dengan memasukkan pengembangan kompetensi individu dan tim didalam penilaian kinerja, termasuk kewajiban belajar melalui pelatihan, seminar, on the job training, rotasi dan mutasi, benchmarking, serta pemberian penugasan khusus.
3. Pemberdayaan personel dengan memberikan tugas khusus untuk menyelesaikan project- project perbaikan dibidang proses kerja dan layanan, akan membantu Bidpropam Polda Bali menyelesaikan permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam mencapai tujuan penegakan disiplin maupun etika profesi.
4. Pemimpin yang memotivasi anggotanya untuk mau belajar secara berkelanjutan, melakukan monitoring terhadap target kerja yang diberikan kepada anggotanya,

dan mengevaluasi serta mengembangkan sistem penilaian kinerja dapat membantu Bidpropam Polda Bali untuk meningkatkan kinerja organisasi melalui organisasi pembelajar.

5. Evaluasi dan monitoring program kerja yang terukur serta menyediakan program reward dan punishment secara transparan terhadap hasil kerja yang dicapainya, perlu dilakukan secara konsisten untuk meningkatkan efektivitas pencapaian kinerja organisasi. Selanjutnya hasil evaluasi tersebut ditindaklanjuti dengan melakukan langkah perbaikan agar tercapai target bisnisnya, termasuk evaluasi terhadap penempatan orang yang tepat.
6. Pertemuan rutin dan keterbukaan informasi menjadi sangat penting dilakukan sebagai sarana untuk mendapatkan informasi dan komunikasi aktif dua arah. Penyediaan sistem informasi dapat berupa WA group discussion ataupun dalam bentuk juklak kerja yang disimpan dalam tempat yang mudah diakses oleh seluruh anggota baru maupun anggota lama. Pengaturan serah terima jabatan yang disamakan disetiap unit kerja akan memudahkan proses pertukaran informasi antara petugas lama dan petugas baru sebagai pengganti.
7. Kegiatan kebersamaan untuk mendorong keterbukaan, kebersamaan dan kesamaan persepsi dan kerjasama tim yang baik dapat dilakukan secara periodik, agar para pemimpin dan anggota lebih saling mengenal dan mengetahui apa yang menjadi harapan dan mampu menyelaraskannya dengan tujuan organisasi yang diharapkan guna mewujudkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri.

Dari pembuatan proyek perubahan ini, yang dapat kami petik hikmahnya adalah dalam setiap tahapan untuk menunjang pencapaian target kegiatan adalah sinergi antar stakeholder, kepemimpinan yang Visioner, Keberanian mengambil resiko dan integritas tim. Sehingga apa yang diharapkan dalam proyek perubahan ini adalah tercapainya tujuan dan adanya manfaat bagi organisasi Polri dan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penyusunan

Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akutansi Dan Pelaporan Keuangan.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 99/Pmk.05/2017 Tentang Administrasi Pengelolaan Hibah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah.

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Perintah Tim Kerja Efektif

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH BALI
BIDANG PROFESI DAN PENGAMANAN



SURAT PERINTAH

Nomor: Sprin/ 339 /X/DIK.1.2./2024

Pertimbangan : Bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Rancangan Proyek Perubahan peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXXI Tahun 2024, maka dipandang perlu mengeluarkan surat perintah ini.

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Surat Kepala Kepolisian Negara Republik Nomor: B/11312/VII/DIK.2.5./2024/SSDM, tanggal 24 Juli 2024, tentang pemanggilan peserta PKN Tingkat II Angkatan XXXI Tahun 2024.

DIPERINTAHKAN

Kepada : NAMA, PANGKAT, JABATAN SESUAI YANG TERCANTUM DALAM LAMPIRAN SURAT PERINTAH INI.

Untuk :

1. Melaksanakan tugas sebagai tim kerja efektif Rancangan Proyek Perubahan peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXXI Tahun 2024;
2. Mengadakan koordinasi dan kerja sama yang sebaik-baiknya dengan unsur terkait;
3. Surat perintah ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan;
4. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kabidpropam Polda Bali;
5. Melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Selesai.

Dikeluarkan di: Denpasar
Pada tanggal : 01 Oktober 2024

KEPALA BIDANG PROFESI DAN PENGAMANAN POLDA BALI

Tembusan:

1. Kapolda Bali
2. Wakapolda Bali
3. Irwasda Polda Bali





KEPUTUSAN KEPALA BIDANG PROFESI DAN PENGAMANAN POLDA BALI
Nomor : Kep/ 07 /X/2024

tentang

PEMBENTUKAN TIM KERJA EFEKTIF PROYEK PERUBAHAN

KEPALA BIDANG PROFESI DAN PENGAMANAN POLDA BALI

- Menimbang** : Bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Rancangan Proyek Perubahan peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXII Tahun 2024, maka dipandang perlu menetapkan keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Surat Kepala Kepolisian Negara Republik Nomor: B/11312/MII/DIK.2.5./2024/SSDM, tanggal 24 Juli 2024, tentang pemanggilan peserta PKN Tingkat II Angkatan XXXI Tahun 2024.
- Memperhatikan**: Hasil Seminar Rancangan Proyek Perubahan Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXXI Tahun 2024 yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 di Pusdikmin Bandung.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA BIDANG PROFESI DAN PENGAMANAN POLDA BALI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA EFEKTIF PROYEK PERUBAHAN.**
1. Membentuk Tim Kerja Efektif Rancangan Proyek Perubahan peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXXI Tahun 2024;
 2. mengadakan koordinasi dan kerja sama yang sebaik baiknya dengan unsur terkait;
 3. adapun susunan daftar nama Tim Kerja Efektif Proyek Perubahan sebagaimana terlampir;
 4. keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Denpasar
pada tanggal : 01 Oktober 2024

KEPALA BIDANG PROFESI DAN PENGAMANAN POLDA BALI

Tembusan:

1. Kapolda Bali.
2. Wakapolda Bali.
3. Irwasda Polda Bali.
4. Karo SDM Polda Bali.





DAFTAR NAMA PERSONEL BIDPROPAN POLDA BALI YANG DITUNJUK SEBAGAI
TIM KERJA EFEKTIF RANCANGAN PROYEK PERUBAHAN PESERTA PELATIHAN
KEPEMIMPINAN NASIONAL (PKN) TINGKAT II ANGKATAN XXXI TAHUN 2024

NO	NAMA /	PANGKAT	JABATAN	TIM KERJA	KET
1	2	3	4	5	6
1	I KETUT AGUS KUSMAYADI, S.I.K., S.H.	KBP	KABIDPROPAM POLDA BALI	MENTOR	
2	NANANG PRI HASMOKO, S.T., S.H., M.H.	AKBP	KASUBBIDPAMINAL BIDPROPAM POLDA BALI	KETUA TIM KERJA EFEKTIF	
3	TAUFAN RIZALDI. S.I.K.,M.H	KOMPOL	KAURLITPERS SUBBIDPAMINAL BIDPROPAM	SEKRETARIS	
4	GST AYU DIAH INDRIYATHI, S.H.	AIPDA	BAMIN URLITPERS SUBBIDPAMINAL BIDPROPAM	ANGGOTA	
5	KETUT DANA, S.H	AKBP	KASUBBIDPROVOS BIDPROPAM POLDA BALI	TIM EFEKTIF BIDANG GAKKUM	
6	ANAK AGUNG WIRAHATININGSIH, S.H., M.H.	AKBP	KASUBBIDWABPROF BIDPROPAM POLDA BALI	ANGGOTA	
7	I GUSTI NGURAH PUTU SUARTA, S.H.,M.H	AKP	P.S. KAURBINPAM SUBBIDPAMINAL BIDPROPAM	ANGGOTA	
8	NI NYOMAN SUYASMINI	AKP	KAURPRODOK SUBBIDPAMINAL BIDPROPAM	ANGGOTA	
9	I WAYAN WIDASTRA, S.H.	AKP	P.S. KAURGAKKUM SUBBIDPROVOS BIDPROPAM	ANGGOTA	
10	I KADEK WIDANA, S.E.,M.M	IPTU	PAMIN 2 SUBBIDPAMINAL BIDPROPAM	ANGGOTA	
11	I GEDE SUTAWIJAYA	AKP	PLH. KANIT III SUBBIDPAMINAL	ANGGOTA	
12	I MADE SUBAMIA	AKP	KAUR BINPLIN SUBIDPROVOS BIDPROPAM	ANGGOTA	
13	I WAYAN SUMABA, S.H	IPTU	KANIT I SUBBIDPAMINAL BIDPROPAM	ANGGOTA	
14	PUTU BUDIAWAN	AKP	KANIT II SUBBIDPAMINAL BIDPROPAM	ANGGOTA	
15	AGUNG KUSUMAJAYA, S.H.,M.H	IPDA	PAMIN 1 SUBBIDPAMINAL BIDPROPAM	ANGGOTA	

16.DEWA.....

1	2	3	4	5	6
16	I NYOMAN SUJANA, S.H.	IPDA	PANIT 2 SUBBIDPAMINAL BIDPROPAM	ANGGOTA	
17	PUTU WAHYU DARMAWAN, S.H., M.H	IPDA	PANIT 5 SUBBIDPAMINAL BIDPROPAM	ANGGOTA	
18	I KETUT SUANDI, S.H	AKP	KASUBBAGREHAB PERS BIDPROPAM	TIM EFEKTIF BINLIHPROF	
19	I KETUT SUKATA	IPTU	PS. KAURBINLIHPROF SUBBAGREHABPERS BIDPROPAM	ANGGOTA	
20	NI PUTU INDRAYANTI	AIPDA	BANUM 1 SUBBAGREHABPERS BIDPROPAM	ANGGOTA	
21	YULIUS DE ORNAY, S.H.	IPTU	KAUR TRIMLAP SUBBAGYANDUAN BIDPROPAM	TIM EFEKTIF MEDIASI MASALAH	
22	I WAYAN GEDE ARIMBAWA	AIPTU	PS. PAMIN 2 SUBBAGYANDUAN BIDPROPAM	ANGGOTA	
23	I KADEK BUDI PRIHATIN	BRIPKA	BANUM SUBBAGYANDUAN BIDPROPAM	ANGGOTA	
24	NI MADE DEWI ARIANI, S.H.	AKP	KASUBBAGRENMIN BIDPROPAM	TIM EFEKTIF BIDANG PERSONEL, ANGGARAN DAN SARPRAS	
25	I NYOMAN SUARTAMA, S.H.	IPDA	PS. KAURKEU SUBBAGRENMIN BIDPROPAM	ANGGOTA	
26	I MADE WASITA JAYA KUSUMA	AIPTU	PS. PAMIN 2 SUBBAGRENMIN BIDPROPAM	ANGGOTA	
27	WINDI JAYANTI MANIK WULANDARI, S.H.	AIPDA	PS. PAMIN 1 SUBBAGRENMIN BIDPROPAM	ANGGOTA	

Dikeluarkan di: Denpasar

pada tanggal : 01 Oktober 2024

KEPALA BIDANG PROFESI DAN PENGAMANAN POLDA BALI



I KETUT AGUSTIUSMAYADI, S.I.K., S.H.
 KOMISARIS BESAR POLISI NRP 74080669

Lampiran 2 : Undangan, Notulen, Daftar Hadir Rapat Pembentukan
Tim Kerja Efektif

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH BALI
BIDANG PROFESI DAN PENGAMANAN

NOTA DINAS

Nomor: B/ND - 2024/X/WAS.2.4/2024/Subbidpaminal

Kepada : Yth. 1. Kasubbidwabprof Bidpropam Polda Bali
2. Kasubbidprovos Bidpropam Polda Bali
3. Kasubbagyanduan Bidpropam Polda Bali
4. Kasubbagrehabpers Bidpropam Polda Bali
5. Kasubbagrenmin Bidpropam Polda Bali

Dari : Kasubbidpaminal Bidpropam Polda Bali

Hal : Undangan rapat

1. Rujukan :
 - a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b. Surat Perintah Kabidpropam Polda Bali Nomor: Sprin/339/X/DIK.1.2./2024, tanggal 1 Oktober 2024 tentang melaksanakan tugas sebagai tim kerja efektif Rencana Proyek Perubahan peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXXI Tahun 2024.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, dalam rangka melaksanakan tugas sebagai tim kerja efektif Rencana Proyek Perubahan peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXXI Tahun 2024, akan dilaksanakan rapat pada:

Hari, tanggal : Rabu, 16 Oktober 2024
Waktu : 10.00 Wita s.d. selesai
Tempat : Ruang Sidang Bidpropam Polda Bali
Pakaian : yang berlaku saat itu
3. Demikian untuk menjadi maklum.

Denpasar, 14 Oktober 2024
KASUBBIDPAMINAL BIDPROPAM POLDA BALI


NANANG PRI HASMOKO, S.T., S.H., M.H.
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 75020662

Tembusan:
Kabidpropam Polda Bali

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH BALI
BIDANG PROFESI DAN PENGAMANAN

DAFTAR HADIR PERSONEL TIM KERJA EFEKTIF RENCANA PROYEK PERUBAHAN
PESERTA PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL (PKN)
TINGKAT II ANGGARAN XXXI TAHUN 2024
HARI RABU, TANGGAL 16 OKTOBER 2024

NO	NAMA	PANGKAT	JABATAN	TIM KERJA	TTD
1	I KETUT AGUS KUSMAYADI, S.I.K., S.H.	KBP	KABIDPROPAM POLDA BALI	MENTOR	
2	NANANG PRI HASMOKO, S.T., S.H., M.H.	AKBP	KASUBBIDPAMINAL BIDPROPAM POLDA BALI	KETUA TIM EFEKTIF KERJA	
3	TAUFAN RIZALDI, S.I.K., M.H.	KOMPOL	KAURLITPERS SUBBIDPAMINAL BIDPROPAM	SEKRETARIS	
4	GST AYU DIAH INDIRIYATHI, S.H.	AIPDA	BAMIN URLITPERS SUBBIDPAMINAL BIDPROPAM	ANGGOTA	
5	KETUT DANA, S.H.	AKBP	KASUBBIDPROVOS BIDPROPAM POLDA BALI	TIM EFEKTIF BIDANG GAKKUM	
6	ANAK AGUNG WIRAHATININGSIH, S.H., M.H.	AKBP	KASUBBIDWABPROF BIDPROPAM POLDA BALI	ANGGOTA	
7	I GUSTI NGURAH PUTU SUARTA, S.H., M.H.	AKP	P.S. KAURBINPAM SUBBIDPAMINAL BIDPROPAM	ANGGOTA	
8	NI NYOMAN SUYASMINI	KOMPOL	KAURPRODOK SUBBIDPAMINAL BIDPROPAM	ANGGOTA	
9	I WAYAN WIDASTRA, S.H.	AKP	P.S. KAURGAKKUM SUBBIDPROVOS BIDPROPAM	ANGGOTA	
10	I KADEK WIDANA, S.E., M.M.	IPTU	PAMIN 2 SUBBIDPAMINAL BIDPROPAM	ANGGOTA	
11	I GEDE SUTAWIJAYA	IPDA	PLH. KANIT III SUBBIDPAMINAL	ANGGOTA	
12	I MADE SUBAMIA	AKP	KAUR BINPLIN SUBBIDPROVOS BIDPROPAM	ANGGOTA	
13	I WAYAN SUMABA, S.H.	AKP	KANIT 1 SUBBIDPAMINAL BIDPROPAM	ANGGOTA	
14	PUTU BUDIAWAN	AKP	KANIT II SUBBIDPAMINAL BIDPROPAM	ANGGOTA	
15	AGUNG KUSUMAJAYA, S.H., M.H.	IPDA	PAMIN I SUBBIDPAMINAL BIDPROPAM	ANGGOTA	

16 I NYOMAN....

NO	NAMA	PANGKAT	JABATAN	TIM KERJA	TTD
1	I NYOMAN SUJANA, S.H.	IPDA	PANIT 2 SUBBIDPAMINAL BIDPROPAM	ANGGOTA	
17	PUTU WAHYU DARMAWAN, S.H., M.H.	IPDA	PANIT 5 SUBBIDPAMINAL BIDPROPAM	ANGGOTA	
18	I KETUT SUANDI, S.H.	AKP	KASUBBAGREHAB PERS BIDPROPAM	TIM EFEKTIF BINLIHPROF	
19	I KETUT SUKATA	IPTU	PS. KAURBINLIH PROF SUBBAG REHABPERS	ANGGOTA	
20	NI PUTU INDRAYANTI	AIPDA	BANUM 1 SUBBAG REHABPERS	ANGGOTA	
21	YULIUS DE ORWAY, S.H.	IPTU	KAUR TRIMLAP SUBBAGYANDUAN BIDPROPAM	TIM EFEKTIF MEDIASI MASALAH	
22	I WAYAN GEDE ARIMBAWA	AIPTU	PS. PAMIN 2 SUBBAGYANDUAN	ANGGOTA	
23	I KADEK BUDI PRIHATIN	BRIPKA	BANUM SUBBAGYANDUAN	ANGGOTA	
24	NI MADE DEWI ARIANI, S.H.	AKP	KASUBBAGRENMIN BIDPROPAM	TIM EFEKTIF BIDANG PERSONEL ANGGARAN DAN SARPRAS	
25	I NYOMAN SUARTAMA, S.H.	IPDA	PS. KAURKEU SUBBAGRENMIN	ANGGOTA	
26	I MADE WASITA JAYA KESUMA	AIPTU	PS. PAMIN 2 SUBBAGRENMIN	ANGGOTA	
27	WINDI JAYANTI MANIK WULANDARI, S.H.	AIPDA	PS. PAMIN 1 SUBBAGRENMIN	ANGGOTA	

Denpasar, 16 Oktober 2024
KEPALA BIDANG PROFESI DAN PENGAMANAN POLDA BALI

I KETUT AGUS KUSMAYADI, S.I.K., S.H.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 74080669

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

NOTULEN
RAPAT KOORDINASI PEMBENTUKAN TIM KERJA EFEKTIF
RANCANGAN PROYEK PERUBAHAN

2

I. Pelaksanaan

- a. Hari/Tanggal : Rabu, 16 Oktober 2024
- b. Pukul : 10.00 Wita s.d. selesai
- c. Tempat : Ruang Sidang Bidpropam Polda Bali

II. Peserta

- a. Pimpinan rapat: Kasubbidpaminal Bidpropam Polda Bali (AKBP NANANG PRI HASMOKO, S.T., S.H., M.H., selaku Ketua Tim Kerja Efektif RPP)
- b. Peserta rapat:
 - 1. Kasubbidprovos Bidpropam (diwakili Kaugakkum)
 - 2. Kasubbidwabprof Bidpropam
 - 3. Para Kaur Subbidpaminal
 - 4. Para Kasubbag Bidpropam beserta anggota
 - 5. Para Kanit Subbidpaminal

III. Materi Rapat

- a. Kasubbidpaminal Bidpropam Polda Bali (AKBP NANANG PRI HASMOKO, S.T., S.H., M.H.) selaku Ketua Tim Kerja Efektif RPP menyampaikan terkait judul RPP yaitu "Strategi Peningkatan Pengawasan melalui Sistem Mediasi Masalah dan Rehabilitasi di Propam Polda Bali".
- b. Yang melatarbelakangi diangkatnya judul untuk RPP tersebut karena masih adanya pelanggaran baik disiplin, kode etik dan pidana yang dilakukan oleh anggota Polda Bali sehingga dengan RPP tersebut diharapkan tidak adanya pelanggaran atau meminimalisir pelanggaran oleh anggota Polri untuk mewujudkan Polri yang Presisi. Dimana dengan peningkatan pengawasan melalui ini diharapkan di hulu dapat dilakukan mediasi terlebih dahulu dan di hilirnya dilakukan pembinaan dan pemulihan profesi terhadap personel yang diduga telah melakukan pelanggaran disiplin, etika profesi maupun pidana.
- c. Adapun strategi yang digunakan untuk mewujudkan RPP tersebut adalah melalui strategi SOAR yaitu **Strength** (kekuatan), **Opportunity** (peluang), **Aspiration** (aspirasi) dan **Result** (hasil).
- d. Rancangan Proyek Perubahan ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk organisasi Polri khususnya Polda Bali dalam memaksimalkan pengawasan terhadap

personel

personel guna meminimalisir adanya pelanggaran sehingga dapat mewujudkan Polri yang Presisi. Adapun tujuan RPP ini dibagi ke dalam 3 tahapan yaitu Jangka Pendek yang dimulai dari bulan Oktober s.d. Desember 2024, Jangka Menengah dan Jangka Panjang.

- e. Untuk penyusunan RPP ini tidak membutuhkan biaya.
- f. Akan ada tim dari Pusdiklat yang akan datang guna melihat dan memastikan bahwa Proyek perubahan ini benar-benar dilaksanakan.
- g. Minggu depan akan dilakukan rapat koordinasi kembali guna membahas terkait prosedur dan skema SIMAMA seperti apa dan dapat memilih dan memilah kasus-kasus mana yang dapat dilakukan mediasi.
- h. Kauritpers Subbidpaminal menyarankan kepada Ketua Tim Kerja Efektif dan peserta rapat terkait SIMAMA agar dibuatkan format untuk pelaksanaan mediasinya dan didokumentasikan.
- i. Kasubbagrenmin menyarankan agar SIMAMA disosialisasikan kembali kepada anggota agar lebih banyak yang mengetahuinya.
- j. Ketua Tim Kerja meminta agar dimintakan kriteria kasus Narkoba yang dapat diselesaikan melalui restorative justice.

IV. Penutup

Rapat selesai pukul 11.30 Wita dengan kesimpulan bahwa akan dilakukan rapat koordinasi kembali pada tanggal 22 Oktober 2024 guna membahas lebih lanjut terkait mekanisme dan SOP SIMAMA dan Binlilprof.

Denpasar, 16 Oktober 2024

Mengetahui
KASUBBIDPAMINAL BIDPROPAM
Selaku Ketua Tim Kerja Efektif RPP


NANANG PRI HASMOKO, S.T., S.H., M.H.
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 75020662

Notulen


TAUFAN RIZALDI, S.I.K., M.H.
KOMISARIS POLISI NRP 85102014

Lampiran 3 : Undangan, Notulen, Daftar Hadir Rapat Penyusunan SOP
Dgn Tim Kerja Efektif

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH BALI
BIDANG PROFESI DAN PENGAMANAN

NOTA DINAS

Nomor: B/ND - 219 /X/WAS.2.4/2024/Subbidpaminal

Kepada : Yth. 1. Para Kasubbid Bidpropam Polda Bali
2. Para Kasubbag Bidpropam Polda Bali

Dari : Kasubbidpaminal Bidpropam Polda Bali selaku Ketua Tim Kerja Efektif Rencana Proyek Perubahan

Hal : Undangan rapat

1. Rujukan :

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Surat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: B/11312/VII/DIK.2.5./2024/SSDM, tanggal 24 Juli 2024 tentang pemanggilan peserta PKN Tingkat II Angkatan XXXI Tahun 2024;
- c. Surat Perintah Kabidpropam Polda Bali Nomor: Sprin/339/X/DIK.1.2./2024, tanggal 1 Oktober 2024 tentang melaksanakan tugas sebagai tim kerja efektif Rencana Proyek Perubahan peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXXI Tahun 2024.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, bersama ini dimohon kehadiran tersebut alamat dengan mengikutsertakan personelnnya yang telah ditunjuk sebagai Tim Kerja Efektif Rencana Proyek Perubahan peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXXI Tahun 2024 dalam rangka koordinasi terkait pembagian tugas dan penyiapan instrumen yang dibutuhkan dalam kegiatan dimaksud untuk hadir pada:

- a. Hari, tanggal : Selasa, 22 Oktober 2024
- b. Pukul : 10.00 Wita
- c. Tempat : Ruang Sidang Bidpropam Polda Bali

3. Demikian untuk menjadi maklum.

Denpasar, 21 Oktober 2024
KASUBBIDPAMINAL BIDPROPAM POLDA BALI
Selaku Ketua Tim Kerja Efektif RPP


NANANG PRI HASMOKO, S.T., S.H., M.H.
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 75020662

Tembusan:

Kabidpropam Polda Bali

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH BALI
BIDANG PROFESI DAN PENGAMANAN

DAFTAR HADIR PERSONEL TIM KERJA EFEKTIF RENCANA PROYEK PERUBAHAN
PESERTA PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL (PKN)
TINGKAT II ANGKATAN XXXI TAHUN 2024
HARI SELASA, TANGGAL 22 OKTOBER 2024

NO	NAMA	PANGKAT	JABATAN	TIM KERJA	TTD
1	2	3	4	5	6
1	I KETUT AGUS KUSMAYADI, S.I.K., S.H.	KBP	KABIDPROPAM POLDA BALI	MENTOR	
2	NANANG PRI HASMOKO, S.T., S.H., M.H.	AKBP	KASUBBIDPAMINAL BIDPROPAM POLDA BALI	KETUA TIM EFEKTIF KERJA	
3	TAUFAN RIZALDI, S.I.K., M.H.	KOMPOL	KAURLITPERS SUBBIDPAMINAL BIDPROPAM	SEKRETARIS	
4	GST AYU DIAH INDRİYATHI, S.H.	AIPDA	BAMIN URLITPERS SUBBIDPAMINAL BIDPROPAM	ANGGOTA	
5	KETUT DANA, S.H.	AKBP	KASUBBIDPROVOS BIDPROPAM POLDA BALI	TIM EFEKTIF BIDANG GAKKUM	
6	ANAK AGUNG WIRAHATININGSIH, S.H., M.H.	AKBP	KASUBBIDWABPROF BIDPROPAM POLDA BALI	ANGGOTA	
7	I GUSTI NGURAH PUTU SUARTA, S.H., M.H.	AKP	P.S. KAURBINPAM SUBBIDPAMINAL BIDPROPAM	ANGGOTA	
8	NI NYOMAN SUYASMINI	KOMPOL	KAURPRODOK SUBBIDPAMINAL BIDPROPAM	ANGGOTA	
9	I WAYAN WIDASTRA, S.H.	AKP	P.S. KAURGAKKUM SUBBIDPROVOS BIDPROPAM	ANGGOTA	
10	I KADEK WIDANA, S.E., M.M.	IPTU	PAMIN 2 SUBBIDPAMINAL BIDPROPAM	ANGGOTA	
11	I GEDE SUTAWIJAYA	IPDA	PLH. KANIT III SUBBIDPAMINAL	ANGGOTA	
12	I MADE SUBAMIA	AKP	KAUR BINPLIN SUBBIDPROVOS BIDPROPAM	ANGGOTA	
13	I WAYAN SUMABA, S.H.	AKP	KANIT 1 SUBBIDPAMINAL BIDPROPAM	ANGGOTA	
14	PUTU BUDIAWAN	AKP	KANIT II SUBBIDPAMINAL BIDPROPAM	ANGGOTA	
15	AGUNG KUSUMAJAYA, S.H., M.H.	IPDA	PAMIN I SUBBIDPAMINAL BIDPROPAM	ANGGOTA	

16 I NYOMAN.....

NO	NAMA	PANGKAT	JABATAN	TIM KERJA	TTD
1	2	3	4	5	6
16	I NYOMAN SUJANA, S.H.	IPDA	PANIT 2 SUBBIDPAMINAL BIDPROPAM	ANGGOTA	
17	PUTU WAHYU DARMAWAN, S.H., M.H.	IPDA	PANIT 5 SUBBIDPAMINAL BIDPROPAM	ANGGOTA	
18	I KETUT SUANDI, S.H.	AKP	KASUBBAGREHAB PERS BIDPROPAM	TIM EFEKTIF BINLIHPROF	
19	I KETUT SUKATA	IPTU	PS. KAURBINLIH PROF SUBBAG REHABPERS	ANGGOTA	
20	NI PUTU INDRAYANTI	AIPDA	BANUM 1 SUBBAG REHABPERS	ANGGOTA	
21	YULIUS DE ORNAY, S.H.	IPTU	KAUR TRIMLAP SUBBAGYANDUAN BIDPROPAM	TIM EFEKTIF MEDIASI MASALAH	
22	I WAYAN GEDE ARIMBAWA	AIPTU	PS. PAMIN 2 SUBBAGYANDUAN	ANGGOTA	
23	I KADEK BUDI PRIHATIN	BRIPKA	BANUM SUBBAGYANDUAN	ANGGOTA	
24	NI MADE DEWI ARIANI, S.H.	AKP	KASUBBAGRENMIN BIDPROPAM	TIM EFEKTIF BIDANG PERSONEL ANGGARAN DAN SARPRAS	
25	I NYOMAN SUARTAMA, S.H.	IPDA	PS. KAURKEU SUBBAGRENMIN	ANGGOTA	
26	I MADE WASITA JAYA KESUMA	AIPTU	PS. PAMIN 2 SUBBAGRENMIN	ANGGOTA	
27	WINDI JAYANTI MANIK WULANDARI, S.H.	AIPDA	PS. PAMIN 1 SUBBAGRENMIN	ANGGOTA	

Denpasar, 22 Oktober 2024
KEPALA BIDANG PROFESI DAN PENGAMANAN POLDA BALI

I KETUT AGUS KUSMAYADI, S.I.K., S.H.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 74080669

NOTULEN
RAPAT KOORDINASI PEMBENTUKAN TIM KERJA EFEKTIF
RANCANGAN PROYEK PERUBAHAN

2

I. Pelaksanaan

- a. Hari/Tanggal : Selasa, 22 Oktober 2024
- b. Pukul : 10.00 Wita s.d. selesai
- c. Tempat : Ruang Sidang Bidpropam Polda Bali

II. Peserta

- a. Pimpinan rapat: Kasubbidpaminal Bidpropam Polda Bali (AKBP NANANG PRI HASMOKO, S.T., S.H., M.H., selaku Ketua Tim Kerja Efektif RPP)
- b. Peserta rapat: Seluruh anggota tim kerja efektif Rencana Proyek Perubahan.

III. Materi Rapat

- a. Kasubbidpaminal Bidpropam Polda Bali (AKBP NANANG PRI HASMOKO, S.T., S.H., M.H.) selaku Ketua Tim Kerja Efektif RPP membuka acara rapat lanjutan dalam rangka penyusunan SOP kegiatan mediasi masalah dan pemulihan profesi personel Polri.
- b. Program SIMAMA (Sistem Mediasi Masalah) tidak dapat diselesaikan secara restorative justice, kedepannya akan dipilah pengaduan apa saja yang dapat diselesaikan melalui mediasi pada Subbagyanduan.
- c. Selanjutnya Ketua Tim Kerja Efektif mempersilahkan Kasubbagyanduan atau yang mewakili untuk memaparkan terkait mekanisme pelayanan, alur dalam penyelesaian Dumas dan SOP pelaksanaan SIMAMA pada Subbagyanduan Bidpropam Polda Bali.
- d. Selanjutnya Ketua Tim Kerja Efektif mempersilahkan Kasubbagrehabpers selaku tim kegiatan pemulihan profesi untuk memaparkan kegiatan binlihprof yang dilaksanakan, mekanisme binlihprof dan SOP yang diterapkan pada kegiatan binlihprof yang dilaksanakan oleh Subbagrehabpers.
- e. Akan dibuatkan banner pelayanan SIMAMA pada Subbagyanduan agar masyarakat atau personel Polri mengetahui Sistem Mediasi Masalah (SIMAMA) yang ada pada Subbagyanduan Bidpropam Polda Bali.

- f. Rapat berikutnya terkait penyusunan RPP ini akan dilaksanakan kembali pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2024 yang dihadiri oleh seluruh anggota tim kerja efektif proyek perubahan

IV. Penutup

Rapat selesai pukul 11.30 Wita dengan kesimpulan bahwa akan dilakukan rapat koordinasi kembali pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 yang dihadiri oleh seluruh anggota tim kerja efektif proyek perubahan guna membahas lebih lanjut terkait mekanisme dan SOP SIMAMA dan Binlihprof.

Denpasar, 22 Oktober 2024

Mengetahui
KASUBBIDPAMINAL BIDPROPAM
Selaku Ketua Tim Kerja Efektif RPP


NANANG PRI HASMOKO, S.T., S.H., M.H.
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 75020662

Notulen


TAPAN RIZALDI S.I.K., M.H.
KOMISARIS POLISI NRP 85102014

f. Rapat. . . .

Lampiran 4 : Undangan, Notulen, Daftar Hadir Rapat Evaluasi Penyusunan Draft SOP

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH BALI
BIDANG PROFESI DAN PENGAMANAN

NOTA DINAS

Nomor: B/ND - 215 /X/WAS.2.4/2024/Subbidpaminal

Kepada : Yth. 1. Para Kasubbid Bidpropam Polda Bali
2. Para Kasubbag Bidpropam Polda Bali

Dari : Kasubbidpaminal Bidpropam Polda Bali selaku Ketua Tim Kerja
Efektif Rencana Proyek Perubahan

Hal : Undangan rapat

1. Rujukan :
 - a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b. Surat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: B/11312/II/DIK.2.5./2024/SSDM, tanggal 24 Juli 2024 tentang pemanggilan peserta PKN Tingkat II Angkatan XXXI Tahun 2024;
 - c. Surat Perintah Kabidpropam Polda Bali Nomor: Sprin/339/X/DIK.1.2./2024, tanggal 1 Oktober 2024 tentang melaksanakan tugas sebagai tim kerja efektif Rencana Proyek Perubahan peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXXI Tahun 2024.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, bersama ini dimohon kehadiran tersebut alamat dengan mengikutsertakan personelnnya yang telah ditunjuk sebagai Tim Kerja Efektif Rencana Proyek Perubahan peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXXI Tahun 2024 dalam rangka koordinasi terkait pembagian tugas dan penyiapan instrumen yang dibutuhkan dalam kegiatan dimaksud untuk hadir pada:
 - a. Hari, tanggal : Selasa, 29 Oktober 2024
 - b. Pukul : 10.00 Wita
 - c. Tempat : Ruang Sidang Bidpropam Polda Bali
3. Demikian untuk menjadi maklum.

Denpasar, 21 Oktober 2024
KASUBBIDPAMINAL BIDPROPAM POLDA BALI
Selaku Ketua Tim Kerja Efektif RPP


NANANG PRI HASMOKO, S.T., S.H., M.H.
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 75020662

Tembusan:
Kabidpropam Polda Bali

DAFTAR HADIR PERSONEL TIM KERJA EFEKTIF RENCANA PROYEK PERUBAHAN
PESERTA PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL (PKN)
TINGKAT II ANGKATAN XXXI TAHUN 2024
HARI SELASA, TANGGAL 29 OKTOBER 2024

NO	NAMA	PANGKAT	JABATAN	TIM KERJA	TTD
1	2	3	4	5	6
1	I KETUT AGUS KUSMAYADI, S.I.K., S.H.	KBP	KABIDPROPAM POLDA BALI	MENTOR	
2	NANANG PRI HASMOKO, S.T., S.H., M.H.	AKBP	KASUBBIDPAMINAL BIDPROPAM POLDA BALI	KETUA TIM EFEKTIF KERJA	
3	TAUFAN RIZALDI, S.I.K., M.H.	KOMPOL	KAURLITPERS SUBBIDPAMINAL BIDPROPAM	SEKRETARIS	
4	GST AYU DIAH INDRIYATHI, S.H.	AIPDA	BAMIN URLITPERS SUBBIDPAMINAL BIDPROPAM	ANGGOTA	
5	KETUT DANA, S.H.	AKBP	KASUBBIDPROVOS BIDPROPAM POLDA BALI	TIM EFEKTIF BIDANG GAKKUM ANGGOTA	
6	ANAK AGUNG WIRAHATININGSIH, S.H., M.H.	AKBP	KASUBBIDWABPROF BIDPROPAM POLDA BALI	ANGGOTA	
7	I GUSTI NGURAH PUTU SUARTA, S.H., M.H.	AKP	P.S. KAURBINPAM SUBBIDPAMINAL BIDPROPAM	ANGGOTA	
8	NI NYOMAN SUYASMINI	KOMPOL	KAURPRODOK SUBBIDPAMINAL BIDPROPAM	ANGGOTA	
9	I WAYAN WIDASTRA, S.H.	AKP	P.S. KAURGAKKUM SUBBIDPROVOS BIDPROPAM	ANGGOTA	
10	I KADEK WIDANA, S.E., M.M.	IPTU	PAMIN 2 SUBBIDPAMINAL BIDPROPAM	ANGGOTA	
11	I GEDE SUTAWIJAYA	IPDA	PLH. KANIT III SUBBIDPAMINAL	ANGGOTA	
12	I MADE SUBAMIA	AKP	KAUR BINPLIN SUBBIDPROVOS BIDPROPAM	ANGGOTA	
13	I WAYAN SUMABA, S.H.	AKP	KANIT 1 SUBBIDPAMINAL BIDPROPAM	ANGGOTA	
14	PUTU BUDIAWAN	AKP	KANIT II SUBBIDPAMINAL BIDPROPAM	ANGGOTA	
15	AGUNG KUSUMAJAYA, S.H., M.H.	IPDA	PAMIN I SUBBIDPAMINAL BIDPROPAM	ANGGOTA	

16 I NYOMAN....

NO	NAMA	PANGKAT	JABATAN	TIM KERJA	TTD
1	2	3	4	5	6
16	I NYOMAN SUJANA, S.H.	IPDA	PANIT 2 SUBBIDPAMINAL BIDPROPAM	ANGGOTA	
17	PUTU WAHYU DARMAWAN, S.H., M.H.	IPDA	PANIT 5 SUBBIDPAMINAL BIDPROPAM	ANGGOTA	
18	I KETUT SUANDI, S.H.	AKP	KASUBBAGREHAB PERS BIDPROPAM	TIM EFEKTIF BINLIH PROF	
19	I KETUT SUKATA	IPTU	PS. KAURBINLIH PROF SUBBAG REHABPERS	ANGGOTA	
20	NI PUTU INDRAYANTI	AIPDA	BANUM 1 SUBBAG REHABPERS	ANGGOTA	
21	YULIUS DE ORNAY, S.H.	IPTU	KAUR TRIMLAP SUBBAGYANDUAN BIDPROPAM	TIM EFEKTIF MEDIASI MASALAH	
22	I WAYAN GEDE ARIMBAWA	AIPTU	PS. PAMIN 2 SUBBAGYANDUAN	ANGGOTA	
23	I KADEK BUDI PRIHATIN	BRIPKA	BANUM SUBBAGYANDUAN	ANGGOTA	
24	NI MADE DEWI ARIANI, S.H.	AKP	KASUBBAGRENMIN BIDPROPAM	TIM EFEKTIF BIDANG PERSONEL ANGGARAN DAN SARPRAS	
25	I NYOMAN SUARTAMA, S.H.	IPDA	PS. KAURKEU SUBBAGRENMIN	ANGGOTA	
26	I MADE WASITA JAYA KESUMA	AIPTU	PS. PAMIN 2 SUBBAGRENMIN	ANGGOTA	
27	WINDI JAYANTI MANIK WULANDARI, S.H.	AIPDA	PS. PAMIN 1 SUBBAGRENMIN	ANGGOTA	

Denpasar, 29 Oktober 2024
KEPALA BIDANG PROFESI DAN PENGAMANAN POLDA BALI

I KETUT AGUS KUSMAYADI, S.I.K., S.H.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 74080669

NOTULEN
RAPAT KOORDINASI PEMBENTUKAN TIM KERJA EFEKTIF
RANCANGAN PROYEK PERUBAHAN

2

I. Pelaksanaan

- a. Hari/Tanggal : Selasa, 29 Oktober 2024
- b. Pukul : 10.00 Wita s.d. selesai
- c. Tempat : Ruang Sidang Bidpropam Polda Bali

II. Peserta

- a. Pimpinan rapat: Kasubbidpaminal Bidpropam Polda Bali (AKBP NANANG PRI HASMOKO, S.T., S.H., M.H., selaku Ketua Tim Kerja Efektif RPP)
- b. Peserta rapat: Seluruh anggota tim kerja efektif Rencana Proyek Perubahan.

III. Materi Rapat:

- a. Kasubbidpaminal Bidpropam Polda Bali (AKBP NANANG PRI HASMOKO, S.T., S.H., M.H.) selaku Ketua Tim Kerja Efektif RPP membuka acara rapat lanjutan dalam rangka penyusunan SOP kegiatan mediasi masalah dan pemulihan profesi personel Polri.
- b. Dibutuhkan saran masukan para tim kerja efektif untuk menyempurnakan SOP pada kegiatan pemulihan profesi dan mediasi masalah yang ada di Subbagyanduan Bidpropam.
- c. Bahwa SOP yang telah disusun dan sempurna akan dilaporkan kepada Pimpinan dan diharapkan program ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri melalui Sistem Mediasi Masalah dan pemulihan profesi anggota Polri ini.
- d. Setelah program ini dilaporkan kepada Bapak Kapolda Bali, beliau mengapresiasi proyek ini dan memberikan petunjuk agar disiapkan nomor telepon (hotline) yang mudah diakses masyarakat dan setelah ada hotline maka akan disosialisasikan ke Satker, Polres sampai tingkat Polsek.
- e. Akan dibuatkan banner, spanduk pelayanan SIMAMA pada Subbagyanduan yang selanjutnya akan dimintakan persetujuan pimpinan terlebih dahulu dan setelah disetujui selanjutnya banner/ spanduk akan didistribusikan ke jajaran dan diharapkan Kapolres sampai dengan tingkat Polsek juga memiliki nomor telepon yang bisa diakses masyarakat untuk pelayanan pengaduan perilaku anggota Polri

f. Masukan.

f. Masukan dari Kasubbidwabprof agar dalam penyusunan SOP dilakukan harmonisasi dengan Bidkum dan Subbagyanduan berkoordinasi dengan Divpropam Polri terkait SOP SIMAMA.

g. Rapat berikutnya penyempurnaan terakhir SOP SIMAMA yang akan dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 5 November 2024 yang dihadiri oleh seluruh anggota tim kerja efektif proyek perubahan.

IV. Penutup

Rapat selesai pukul 11.00 Wita dengan kesimpulan bahwa akan dilakukan rapat koordinasi kembali pada hari Selasa tanggal 5 November 2024 yang dihadiri oleh seluruh anggota tim kerja efektif proyek perubahan guna membahas lebih lanjut terkait penyempurnaan SOP SIMAMA.

Denpasar, 29 Oktober 2024

Mengetahui
KASUBBIDPAMINAL BIDPROPAM
Selaku Ketua Tim Kerja Efektif RPP


NANANG PRI HASMOKO, S.T., S.H., M.H.
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 75020662

Notulen


TAFAN RIZALDI, S.I.K., M.H.
KOMISARIS POLISI NRP 85102014

Lampiran 5 : Administrasi Pelaksanaan Sistem Mediasi Masalah

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH BALI
BIDANG PROFESI DAN PENGAMANAN

NOTA DINAS

Nomor: B/ND- 844 /X/WAS.2.4./2024/Bidpropam

Kepada: Yth.Kabiddokkes Polda Bali.

Dari : Kabidpropam Polda Bali.

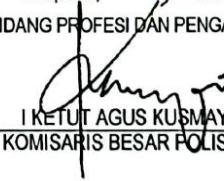
Perihal : Undangan mediasi

1. Rujukan:

- a. Perkap Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Masyarakat di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b. Surat telegram Kapolri No. ST/244/XI/HUK.2.8/2022 tanggal 7 November 2022 perihal giat anev internal polri. mengutamakan restoratife justice dan berkeadilan dalam pelayanan laporan pengaduan masyarakat;
 - c. Surat Perintah Kabidpropam Polda Bali Nomor: Sprin/348/X/WAS.2.4/2022 tanggal 2 Oktober 2024 tentang melaksanakan tugas sebagai team mediator Simamansi Bidpropam Polda Bali.
 - d. Surat permohonan mediasi dari Ni Made Wiwik Rahayu Gandari Yani dengan AIPTU NI MADE SUKRI PADMAWATI Jab anggota Biddokes Polda Bali dalam hal membuat perasaan tidak menyenangkan;
2. Sehubungan dengan rujukan di atas, bersama ini disampaikan kepada Ka, bahwa Sentra Pelayanan Propam Polda Bali telah menerima laporan pengaduan dari saudari Ni Made Wiwik Rahayu Gandari Yani dengan AIPTU NI MADE SUKRI PADMAWATI Jab anggota Biddokes Polda Bali dalam hal membuat perasaan tidak menyenangkan (Mendatangi rumah yang sudah diimpahkan ke pelapor);
 3. Berkaitan dengan butir dua di atas, dimohon kepada Ka memerintahkan anggota bawahannya a.n AIPTU NI MADE SUKRI PADMAWATI Anggota Biddokes Polda Bali menghadap Iptu Yulius De Ormay pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 Pukul 09.00 Wita yang bertempat diruang Sentra Pelayanan Propam Polda Bali, dalam rangka dilakukannya Mediasi dengan pelapor.
 4. Demikian untuk menjadi maklum.

Denpasar, 9 Oktober 2024

KEPALA BIDANG PROFESI DAN PENGAMANAN POLDA BALI








I KETUT AGUS KUSMAYADI. S.I.K, S.H
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 74080669

Tembusan:

1. Kapolda Bali.
2. Waka Polda Bali.
3. Irwasda Polda Bali.

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH BALI
BIDANG PROFESI DAN PENGAMANAN

DAFTAR HADIR PELAKSANAAN MEDIASI
PELAPOR MADE WIWIK RAHAYU GANDARI YANI
TERLAPOR AIPTU NI MADE SUKRI PADMAWATI
HARI : Kamis Tanggal 10 Oktober 2024

NO	NAMA	PANGKAT/ NRP	SATKER/ FUNGSI	TTD
TEAM MEDIATOR				
1				
2	YULIUS DE ORANAY	IP 70/6870462	Yandusan	
3	(Made Dwi Pajuna)	BK 18/06/20	Yandusan	
4	I Putu Dhorma Putrawana	IP 70/830720	Yandusan	
5	IKD SUPRI P.	BP 000/801005	Yandusan	
6				
7				
8				
PELAPOR				
NO	JENIS KELAMIN/ ALAMAT		TTD	
1	Made Wiwik Rahayu Gandari Yani Perempuan / Jl. Patimura 59, B flo. 2			
PENDAMPING				
NO	PANGKAT/ NRP	SATKER/ FUNGSI	TTD	
1				
2				
3				
4				
TERLAPOR				
NO	PANGKAT/ NRP	SATKER/ FUNGSI	TTD	
1	Ni Made Sukri padmawati	AIPTU	BIDDOKES POLDA BALI	
SAKSI-SAKSI				
NO	JENIS KELAMIN/ ALAMAT		TTD	
1				
2				
3				
4				
5				

Denpasar, 10 Oktober 2024

a.n.KASUBBAGYANDUAN BIDPROPAM POLDA BALI

KAUSTRIMEAP


YULIUS DE ORANAY
IPTU NRP 68070462

FORM SURAT PERNYATAAN SIMAMA

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH BALI
BIDANG PROFESI DAN PENGAMANAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan :

Nama :

Tempat / Tgl Lahir :

Agama :

Pekerjaan :

Jenis Kelamin :

Alamat :

— Dengan ini saya selaku pelapor menyatakan bahwa :-----

- Perkara yang saya laporkan belum pernah dilaporkan / diadukan dikantor Kepolisian yang sama atau yang lain
- Perkaranya belum pernah diproses dan / atau dihentikan penyidikannya
- Bersedia dituntut sesuai ketentuan hukum perundang – undang yang berlaku bilamana pernyataan atau keterangan yang dituangkan didalam laporan polisi ternyata, tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya atau merupakan tindakan fitnah.

— Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar – benarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.-----

Denpasar,

2024

Yang membuat pernyataan

FORM PERMOHONAN MEDIASI

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH BALI
BIDANG PROFESI DAN PENGAMANAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan :

N a m a :
Tempat / Tgl Lahir :
A g a m a :
Pekerjaan :
Jenis Kelamin :
A l a m a t :



— Dengan ini saya selaku pelapor menyatakan bahwa :-----

- Perkara yang saya laporkan belum pernah dilaporkan / diadukan dikantor Kepolisian yang sama atau yang lain
- Perkaranya belum pernah diproses dan / atau dihentikan penyidikannya
- Bersedia dituntut sesuai ketentuan hukum perundang –undang yang berlaku bilamana pernyataan atau keterangan yang dituangkan didalam laporan polisi ternyata, tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya atau merupakan tindakan fitnah.

— Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar – benarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.-----

Denpasar,

2024

Yang membuat pernyataan

Lampiran 6 : Surat Koordinasi dan Sinkronisasi SOP ke Bidkum dan Jajaran Polres/Ta

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH BALI
BIDANG PROFESI DAN PENGAMANAN

NOTA DINAS

Nomor: B/ND - 099 /XI/WAS.2.4/2024/Bidpropam

Kepada : Yth. Kepala Bidang Hukum Polda Bali

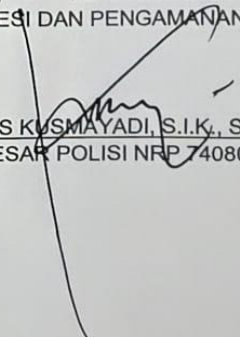
Dari : Kepala Bidang Profesi dan Pengamanan Polda Bali

Hal : mohon koordinasi dan sinkronisasi SOP

1. Rujukan :
 - a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan dan Tata Kerja Organisasi Kepolisian Daerah Bali (Polda);
 - c. Surat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: B/11312/VII/ DIK.2.5/SSDM tanggal 24 Juli 2024 tentang Pemanggilan peserta PKN Tingkat II Angkatan XXXI Tahun Anggaran 2024;
 - d. Surat Perintah Kabidpropam Polda Bali Nomor: Sprin/339/X/DIK.1.2./2024, tanggal 1 Oktober 2024 tentang melaksanakan tugas sebagai tim kerja efektif Rencana Proyek Perubahan peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXXI Tahun 2024.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan personel Polda Bali dan mendukung pelaksanaan Proyek Perubahan peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXXI Tahun 2024. Bidpropam Polda Bali telah menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Sistem Mediasi Masalah yang dilaksanakan oleh Subbagyanduan Bidpropam Polda Bali dan SOP Rehabilitasi Pembinaan Pemulihan Profesi yang dilaksanakan oleh Subbagrehabpers Bidpropam Polda Bali.
3. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, dimohon kepada Ka dapatnya melakukan harmonisasi terhadap SOP dimaksud untuk dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas pada Bidpropam Polda Bali, sebagaimana terlampir.
4. Demikian untuk menjadi maklum.

Denpasar, 5 November 2024

KEPALA BIDANG PROFESI DAN PENGAMANAN POLDA BALI


I KETUT AGUS KUSMAYADI, S.I.K., S.H.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 74080669



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH BALI
Jl. WR. Supratman, 7 Denpasar 80233

Denpasar, 7 November 2024

Nomor : B/9466 /XI/LIT.2.1./2024/Bidpropam
Klasifikasi: BIASA
Lampiran : -
Perihal : mohon sinkronisasi SOP

Kepada

Yth. DISTRIBUSI C POLDA BALI

di

Tempat

1. Rujukan:
 - a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan dan Tata Kerta Organisasi Kepolisian daerah Bali (Polda);
 - c. Surat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: B/11312/VII/DIK.2.5/ssdm tanggal 24 juli 2024 tentang Pemanggilan peserta PKN Tingkat II Angkatan XXXI Tahun Anggaran 2024;
 - d. Surat Perintah Kabidpropam Polda Bali Nomor: Sprin/339/X/DIK.1.2./2024, tanggal 1 Oktober 2024 tentang melaksanakan tugas sebagai tim kerja efektif Rencana Proyek Perubahan peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXXI Tahun 2024;
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat dan personel Polres jajaran Polda Bali dan mendukung pelaksanaan Proyek perubahan peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXXI Tahun 2024. Bidpropam Polda Bali telah Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Sistem Mediasi Masalah yang dilaksanakan oleh Subbagyanduan Bidpropam Polda Bali dan SOP Rehabilitasi Pembinaan pemulihan Profesi yang dilaksanakan oleh Subbagrehabpers Bidpropam Polda Bali.
3. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, dimohon kepada ka dapatnya melakukan harmonisasi terhadap SOP dimaksud untuk dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas pada Sipropam Polres Jajaran, sebagaimana terlampir.
4. Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. Kapolda Bali
2. Irwasda Polda Bali
3. Karo SDM Polda Bali

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH BALI
BIDANG HUKUM

DAFTAR HADIR SINKRONISASI SOP SISTEM MEDIASI MASALAH
KAMIS, 14 NOPEMBER 2024 TEMPAT RUANG RAPAT BIDKUM POLDA BALI

NO.	N A M A	PANGKAT	JABATAN	NO. HP	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5	6
1	IMD KRISNHA M.	AKBP	KSB BID SUNLUHKUM		
2	I Nyu Gatra, S.H., M.H	Kompol	Kaur LuHKUM		
3	Nipuku mejirin cikayanti	Polp	Kasubid Kom		
4	DW Pramadi S.H	Aipda	Banin LuHKUM		
5	I WAYAN KOTA S.H	PEMBINA I	ADVOKAT MADYA II		
6	I KI BUDI ARSTANA S.H	AKBP	KSUBID BERSAM		
7	NANANIS PRIATI	AKBP	KASUBID PAM		
8	IPT TIPTA YASA	BAIPKA	PATAMIAL		
9	PURU YUDA SURAWATA S.H., M.H	BRIGADIR	Jurnal		
10					
11					
12					
13					
14					
15					

KASUBBIDSUNLUHKUM BIDKUM POLDA BALI

I MADE KRISNHA M., S.H., M.H
AKBP NRP 77030931

Lampiran 7 : Undangan, Notulen, Daftar Hadir Rapat Evaluasi SOP

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH BALI
BIDANG PROFESI DAN PENGAMANAN

NOTA DINAS

Nomor: B/ND - 239 /XI/WAS.2.4/2024/Subbidpaminal

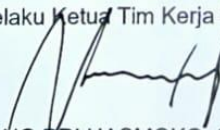
Kepada : Yth. 1. Para Kasubbid Bidpropam Polda Bali
2. Para Kasubbag Bidpropam Polda Bali

Dari : Kasubbidpaminal Bidpropam Polda Bali selaku Ketua Tim Kerja Efektif Rencana Proyek Perubahan

Hal : Undangan rapat

1. Rujukan :
 - a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b. Surat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: B/11312/VII/DIK.2.5./2024/SSDM, tanggal 24 Juli 2024 tentang pemanggilan peserta PKN Tingkat II Angkatan XXXI Tahun 2024;
 - c. Surat Perintah Kabidpropam Polda Bali Nomor: Sprin/339/X/DIK.1.2./2024, tanggal 1 Oktober 2024 tentang melaksanakan tugas sebagai tim kerja efektif Rencana Proyek Perubahan peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXXI Tahun 2024.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, bersama ini dimohon kehadiran tersebut alamat dengan mengikutsertakan personelnnya yang telah ditunjuk sebagai Tim Kerja Efektif Rencana Proyek Perubahan peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXXI Tahun 2024 dalam rangka evaluasi akhir penyusunan SOP, dalam kegiatan dimaksud untuk hadir pada:
 - a. Hari, tanggal : Senin, 18 November 2024
 - b. Pukul : 10.00 Wita
 - c. Tempat : Ruang Sidang Bidpropam Polda Bali
3. Demikian untuk menjadi maklum.

Denpasar, 12 November 2024
KASUBBIDPAMINAL BIDPROPAM POLDA BALI
Selaku Ketua Tim Kerja Efektif RPP



NANANG PRI HASMOKO, S.T., S.H., M.H.
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 75020662

Tembusan:
Kabidpropam Polda Bali

DAFTAR HADIR PERSONEL TIM KERJA EFEKTIF RENCANA PROYEK PERUBAHAN
PESERTA PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL (PKN)
TINGKAT II ANGKATAN XXXI TAHUN 2024
HARI SENIN, TANGGAL 18 NOVEMBER 2024

NO	NAMA	PANGKAT	JABATAN	TIM KERJA	TTD
1	KETUT AGUS KUSMAYADI, S.I.K., S.H.	KBP	KABIDPROPAM POLDA BALI	MENTOR	
2	NANANG PRI HASMOKO, S.T., S.H., M.H.	AKBP	KASUBBIDPAMINAL BIDPROPAM POLDA BALI	KETUA TIM EFEKTIF KERJA	
3	TAUFIK RIZALDI, S.I.K., M.H.	KOMPOL	KAURLITPERS SUBBIDPAMINAL BIDPROPAM	SEKRETARIS	
4	GST AYU DIAH INDIRIYATHI, S.H.	AIPDA	BAMIN URLITPERS SUBBIDPAMINAL BIDPROPAM	ANGGOTA	
5	KETUT DANA, S.H.	AKBP	KASUBBIDPROVOS BIDPROPAM POLDA BALI	TIM EFEKTIF BIDANG GAKKUM	
6	ANAK AGUNG WIRAHATININGSIH, S.H., M.H.	AKBP	KASUBBIDWABPROF BIDPROPAM POLDA BALI	ANGGOTA	
7	I GUSTI NGURAH PUTU SUARTA, S.H., M.H.	AKP	P.S. KAURBINPAM SUBBIDPAMINAL BIDPROPAM	ANGGOTA	
8	NI NYOMAN SUYASMINI	KOMPOL	KAURPRODOK SUBBIDPAMINAL BIDPROPAM	ANGGOTA	
9	I WAYAN WIDASTRA, S.H.	AKP	P.S. KAURGAKKUM SUBBIDPROVOS BIDPROPAM	ANGGOTA	
10	I KADEK WIDANA, S.E., M.M.	IPTU	PAMIN 2 SUBBIDPAMINAL BIDPROPAM	ANGGOTA	
11	I GEDE SUTAWIJAYA	IPDA	PLH. KANIT III SUBBIDPAMINAL	ANGGOTA	
12	I MADE SUBAMIA	AKP	KAUR BINPLIN SUBBIDPROVOS BIDPROPAM	ANGGOTA	
13	I WAYAN SUMABA, S.H.	AKP	KANIT 1 SUBBIDPAMINAL BIDPROPAM	ANGGOTA	
14	PUTU BUDI AWAN	AKP	KANIT II SUBBIDPAMINAL BIDPROPAM	ANGGOTA	
15	AGUNG KUSUMAJAYA, S.H., M.H.	IPDA	PAMIN I SUBBIDPAMINAL BIDPROPAM	ANGGOTA	

16 | NYOMAN.....

NO	NAMA	PANGKAT	JABATAN	TIM KERJA	TTD
16	NI NYOMAN SUYASMINI	IPDA	PAMIN 2 SUBBIDPAMINAL BIDPROPAM	ANGGOTA	
17	PUTU WAWAHYU H.M.	IPDA	PAMIN 2 SUBBIDPAMINAL BIDPROPAM	ANGGOTA	
18	KETUT SUANDI, S.H.	AKP	KASUBBIDGABERHAB BILITPROP	TIM EFEKTIF	
19	KETUT SUKATA	IPTU	P.S. KAURBINPLIN PROF. SUBBAG REHABPERS	ANGGOTA	
20	NI PUTU INDIRAYANTI	AIPDA	BAMIN 1 SUBBAG REHABPERS	ANGGOTA	
21	JULIUS DE ORNAY, S.H.	IPTU	KAUR TRIMIMP SUBBAGYANDUAN MEDIAH BIDPROPAM	TIM EFEKTIF	
22	I WAYAN GEDE ARIMBAWA	AIPDA	P.S. PAMIN 2 SUBBAGYANDUAN	ANGGOTA	
23	I KADEK BUDI PRIHANTINI	BRIKPA	BAMIN SUBBAGYANDUAN	ANGGOTA	
24	NI MADE DEWI ARIANI, S.H.	AKP	KASUBBAGREMINI BIDPROPAM BIDANG PERSONEL ANGGARAN DAN SARPRAS	TIM EFEKTIF	
25	NI NYOMAN SUARTAMA, S.H.	IPDA	P.S. KAURKEN SUBBAGREMINI	ANGGOTA	
26	NI MADE WISATA AJAY KESUMA	AIPDA	P.S. PAMIN 2 SUBBAGREMINI	ANGGOTA	
27	WINDI AYALAYATI MIK, S.H.	AIPDA	P.S. PAMIN 1 SUBBAGREMINI	ANGGOTA	

Denpasar, 18 November 2024
KEPALA BIDANG PROFESI DAN PENGAMANAN POLDA BALI

KOMISARIS BESAR POLRI NRP. 14080888
S.H. KUSUMAJAYA, S.I.K., S.H.

NOTULEN
RAPAT EVALUASI AKHIR SOP INI DGN TIM KERJA EFEKTIF
PROYEK PERUBAHAN

I. Pelaksanaan

- a. Hari/Tanggal : Senin, 18 November 2024
- b. Pukul : 10.00 Wita s.d. selesai
- c. Tempat : Ruang Sidang Bidpropam Polda Bali

II. Peserta

- a. Pimpinan rapat: Kasubbidpaminal Bidpropam Polda Bali (AKBP NANANG PRI HASMOKO, S.T., S.H., M.H., selaku Ketua Tim Kerja Efektif RPP)
- b. Peserta rapat: Seluruh anggota tim kerja efektif Proyek Perubahan.

III. Materi Rapat:


- a. Kasubbidpaminal Bidpropam Polda Bali (AKBP NANANG PRI HASMOKO, S.T., S.H., M.H.) selaku Ketua Tim Kerja Efektif RPP membuka acara rapat evaluasi penyusunan SOP kegiatan mediasi masalah dan pemulihan profesi personel Polri.
- b. Dibutuhkan saran masukan para tim kerja efektif untuk memberikan evaluasi akhir Dan pemantapan penyusunan SOP pada kegiatan rehabilitasi profesi dan mediasi masalah yang ada di Subbagrehabpers dan Subbagyanduan Bidpropam.
- c. Bahwa SOP yang telah tersusun dan sempurna akan dilaporkan kepada Pimpinan dan diharapkan program ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri melalui Sistem Mediasi Masalah dan rehabilitasi profesi anggota Polri ini.
- d. Telah dibuatkan banner, spanduk pelayanan Sistem Mediasi Masalah pada Subbagyanduan dan telah terpasang pada tingkat Polres sampai dengan tingkat Polsek untuk pelayanan pengaduan perilaku anggota Polri
- e. Masukan dari Kasubbidwabprof agar dalam penyusunan SOP dilakukan harmonisasi dengan Bidkum dan Polres Jajaran serta Subbagyanduan berkoordinasi dengan Divpropam Polri terkait SOP SIMAMA.
- f. Rapat berikutnya penyempurnaan terakhir SOP SIMAMA yang akan dilaksanakan pemantapan oleh seluruh anggota tim kerja efektif proyek perubahan.

IV. Penutup

Rapat selesai pukul 11.00 Wita dengan kesimpulan bahwa akan ada pemantapan yang dihadiri oleh seluruh anggota tim kerja efektif proyek perubahan guna membahas lebih lanjut terkait penyempurnaan SOP SIMAMA.

Denpasar, 18 November 2024

Mengetahui
KASUBBIDPAMINAL BIDPROPAM
Selaku Ketua Tim Kerja Efektif RPP


NANANG PRI HASMOKO, S.T., S.H., M.H.
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 75020662

Notulen


TAUFAN RIZALDI, S.I.K., M.H.
KOMISARIS POLISI NRP 85102014

Lampiran 8 : Administrasi Pelaksanaan Rehabilitasi Pembinaan Pemulihan Profesi (Binlihprof)

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH BALI
Jalan W.R. Supratman 7 Denpasar 80233



SURAT PERINTAH
Nomor: Sprin/ 2561 /X/LIT.2.1/2024

Pertimbangan: Bahwa untuk mendukung kelancaran dalam pelaksanaan tugas-tugas Kepolisian khususnya Tupoksi Subbagrehabpers dalam memberikan pelayanan terhadap Pegawai Negeri Pada Polri (PNPP) jajaran Polda Bali yang pernah melakukan pelanggaran baik sebelum dan sedang dalam proses pemeriksaan serta telah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap, guna memberikan kejelasan terhadap status Pegawai Negeri Pada Polri (PNPP) jajaran Polda Bali serta pemulihan hak-hak anggota sesuai dengan prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi, maka dipandang perlu mengeluarkan surat perintah.

- Dasar :**
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 2. Surat Telegram Kapolda Bali No. Pol.: ST/833/XI/2008 tanggal 16 September 2008 tentang pengiriman data anggota Polri / PNS Polri yang melanggar Disiplin, Pidana dan KKE untuk diberikan konseling terpadu;
 3. Peraturan Kadivpropam Polri Nomor 1 Tahun 2017, tanggal 13 Juli 2019 tentang Tata Cara Rehabilitasi Personil Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 4. Hasil rapat koordinasi propam pada tanggal 24 April 2018 tentang percepatan penyelesaian rehabilitasi dan pembentukan tim konseling bersama Biro SDM Polda Bali;
 5. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang KEPP dan KKEP;
 6. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengawasan Melekat di Lingkungan Polri;
 7. Peraturan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri Nomor 1 Tahun 2023, tanggal 28 Februari 2023 tentang Pengurangan Masa Hukuman (PMH);
 8. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tanggal 31 Oktober 2023 tentang Pembinaan Terhadap Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan Pelanggaran Disiplin dan/atau Kode Etik Profesi;

/9. Program.....

LAMPIRAN SURAT PERINTAH KAPOLDA BALI
NOMOR : SPRIN/ 2561 /X/LIT.2.1/2024
TANGGAL: 14 OKTOBER 2024

2

9. Program kerja Bidpropam Polda Bali T.A. 2024

DIPERINTAHKAN

Kepada : NAMA, PANGKAT, JABATAN SESUAI YANG TERCANTUM DALAM LAMPIRAN SURAT PERINTAH INI.

- Untuk :**
1. melaksanakan tugas sebagai panitia dan narasumber dalam kegiatan Pembinaan dan Pemulihan Profesi Polri pada tanggal 21 s.d 25 Oktober 2024;
 2. mengadakan koordinasi dan kerjasama yang sebaik-baiknya dengan unsur terkait;
 3. melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Kapolda Bali u.p. Kabidpropam Polda Bali;
 4. melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Sesuai

Dikeluarkan di: Denpasar
pada tanggal : 14 Oktober 2024

KEPOLISIAN DAERAH BALI
KABIDPROPAM

KEPALA

AGUS KUSUMAWATI, S.I.K., S.H.
KORWASBES POLISI NRP 74080669

Tembusan:

1. Kapolda Bali.
2. Inwasa Polda Bali.
3. Karo SDM Polda Bali.
4. Kabiddokkes Polda Bali.



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH BALI
Jalan W.R. Supratman 7 Denpasar 80233

Denpasar, 14 Oktober 2024

Nomor : B/Und-0857/LIT.2.1/2024/Bidpropam
Klasifikasi: BIASA
Lampiran : tiga lembar
Hal : undangan

Kepada

Yth. PARA PEJABAT POLDA BALI
DAFTAR TERLAMPIR

di

Tempat

1. Rujukan:

- a. Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri;
- c. Surat Telegram Kepala Kepolisian Daerah Bali No. Pol.: T/833/XI/2008 tanggal 16 September 2008 tentang pengiriman data anggota Polri/PNS yang melanggar Disiplin, Pidana dan KKEP untuk diberikan konseling terpadu;
- d. Kawat Sandi Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor: KS/BP-02/II/2017/ropaminal tanggal 6 Januari 2017 tentang pendataan anggota Poli yang melakukan pelanggaran (KEPP dan disiplin) untuk dilakukan pembinaan;
- e. Peraturan Kadivpropam Polri Nomor 1 Tahun 2017, tanggal 13 Juli 2017 tentang Tata Cara Rehabilitasi Personil Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- f. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Polri dan Komisi Kode Etik Polri;
- g. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengawasan Melekat di Lingkungan Polri;
- h. Surat Telegram Kapolri Nomor: ST/956/V/BIN/2022, tanggal 13 Mei 2022 tentang Pembinaan dan Pemulihan Profesi (BINLIHPROF) terhadap anggota dan PNS Poli yang bermasalah;
- i. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tanggal 31 Oktober 2023 tentang Pembinaan Terhadap Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan Pelanggaran Disiplin dan/atau Kode Etik Profesi;

j. Peraturan

2

SURAT KAPOLDA BALI
NOMOR : B/Und-0857/LIT.2.1/2024
TANGGAL : 14 OKTOBER 2024

- j. Peraturan Kepala Divisi Profesi Poli Nomor 1 Tahun 2023, tanggal 28 Februari 2023 tentang Pengurangan Masa Hukuman (PMH);
- k. Program Kerja Bidpropam Polda Bali T.A. 2024;
- l. Surat Perintah Kepala Kepolisian Daerah Bali Nomor: Sprin/ 256/ IX/LIT.2.1/2024 tanggal 14 Oktober 2024 tentang kegiatan Pembinaan dan Pemulihan Profesi Polri;

2. Sehubungan dengan rujukan diatas, diberitahukan kepada Ka bahwa dalam rangka peningkatan kesadaran hukum dan disiplin maka Bidpropam Polda Bali akan melaksanakan Pembinaan dan Pemulihan Profesi Poli bagi Pegawai Negeri Pada Poli (PNPP) jajaran Polda Bali yang sedang dalam masa pengawasan, tumpang rawat maupun proses hukum;
3. Berkaitan dengan butir dua tersebut, dimohon kepada Ka untuk memerintahkan anggota bawahannya yang tercantum dalam surat undangan ini untuk hadir guna diberikan pembinaan dan pemulihan profesi Poli yang akan dilaksanakan pada :

- a. hari : Senin s.d. Jumat;
- b. tanggal: 21 s.d. 25 Oktober 2024;
- c. pukul : 08.30 Wita s/d selesai;
- d. tempat : Ruang Sidang Bidpropam Polda Bali.

dengan membawa alat tulis serta pas foto berwarna ukuran 3x4 cm sebanyak 2 lembar.

4. Demikian untuk menjadi maklum.



Tembusan:

1. Kapolda Bali.
2. Irwada Polda Bali.
3. Karo SDM Polda Bali.



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH BALI
Jalan W.R. Supratman 7 Denpasar 80233

SURAT KAPOLDA BALI
NOMOR : B/Und-0857/LIT.2.1/2024/BIDPROPAM
TANGGAL : 14 OKTOBER 2024

DAFTAR UNDANGAN

1. DIREKTUR KRIMINAL UMUM POLDA BALI
2. DIREKTORAT PENGAMANAN OBJEK VITAL POLDA BALI
3. KEPALA PELAYANAN MARKAS POLDA BALI
4. KAPOLRES BULELENG POLDA BALI
5. KAPOLRES BADUNG POLDA BALI
6. KAPOLRES KARANGASEM POLDA BALI
7. KAPOLRES KLUNGKUNG POLDA BALI
8. KAPOLRES BANGLI POLDA BALI



Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH BALI
BIDANG PROFESI DAN PENGAMANAN

DAFTAR HADIR ANGGOTA POLRI/ ASN POLRI YANG MENGIKUTI
PEMBINAAN DAN PEMULIHAN PROFESI
HARI SENIN, 21 OKTOBER 2024

NO	NAMA	PANGKAT/ NRP	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
1	I MADE SUTAMA, S.H., M.H.	IPTU/84010395	Kaurbinops Satsamapta Polres Karangasem	
2	I NYOMAN SUARTHA ADHI PUTRA, S.H.	IPTU/84020086	PS.Kanit Reskrim Polsek Rendang Polres Karangasem	
3	FRANSISKUS ASISI ALIBABA, S.H.	IPDA/75100220	PS.Panit 1 Unit III Subdit III Ditreskrim Polda Bali	
4	I KOMANG GEDE INDRAYANA, S.H.	AIPTU/79101123	Banit 5 Unit Idik 1 Satresnarkoba Polres Badung	
5	HENDRI, S.H.	AIPDA/82090331	Banit Idik 2 Satreskrim Polres Karangasem	
6	I PUTU ADI SWANTARA, S.H.	AIPDA/84120278	Banit 2 Unit Pamobvit Satsamapta Polres Karangasem	
7	I DEWA GEDE KURNIA WIDI PRATAMA	AIPDA/86040091	Bamin 3 Sium Polres Klungkung	
8	I GUSTI KADEK ARDANA	BRIPKA/85111482	Ba Ditpamobvit Polda Bali	
9	I WAYAN HENDI EPAYANA, S.H.	BRIPKA/87110552	Banit Idik 3 Satreskrim Polres Karangasem	
10	GEDE MULIAWAN, S.H.	BRIPKA/87120779	Banit 1 Unit Idik 2 Satresnarkoba Polres Badung	
11	I KOMANG ADI WIBAWA, S.H.	BRIPKA/89050052	Ba Yanma Polda Bali	

/12. I PUTU RISGA MANGANTIKA, S.H.

2

NO	NAMA	PANGKAT/ NRP	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
12	I PUTU RISGA MANGANTIKA, S.H.	BRIGADIR/92120591	Banum 1 Urmintu Satresnarkoba Polres Badung	
13	I PANDE PUTU HERI SAPUTRA, S.H.	BRIGADIR/95100688	Bamin 1 Urmintu Satresnarkoba Polres Badung	
14	I PUTU KRISNA MEGA SAPUTRA, S.H.	BRIGADIR/96120222	Ba Unit Dalmas Satsamapta Polres Bangli	
15	GEDE YUDI KUSUMADANA	BRIPU/95050461	Ba Unit Turjawali Satsamapta Polres Buleleng	

Denpasar, Oktober 2024

a.n. KABIDPROPAM POLDA BALI
KASUBBAGREHABPERS

I KETUT SUANDI, S.H.
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 68010538

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH BALI
BIDANG PROFESI DAN PENGAMANAN

NOTA DINAS

Nomor : B/ND- 31 /XI/REN.2.1/2022/Subbagrehabpers

Kepada : Yth. Kabidpropam Polda Bali

Dari : Kasubbagrehabpers Bidpropam Polda Bali

Perihal : Usulan Renbut T.A.2024 Subbagrehabpers

1. Rujukan Nota Dinas Kasubbagrenmin Bidpropam Polda Bali Nomor : B/ND-362/XI/REN.2.1/2021 tanggal 4 November 2021 tentang rencana kegiatan dan kebutuhan anggaran T.A.2024.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, bersama ini diajukan kepada Ka usulan Renbut T.A.2024 Subbagrehabpers Bidpropam Polda Bali, data terlampir.
3. Demikian untuk menjadi maklum.

Denpasar, 17 Nopember 2022

KASUBBAGREHABPERS BIDPROPAM POLDA BALI

I WAYAN SUKARITA, S.Sos
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 71040216

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH BALI
BIDANG PROFESI DAN PENGAMANAN

RENBut T.A.2024 SUBBAGREHABPERS

NO	URAIAN	JUMLAH	KET
	GIAT PEMBINAAN DAN REHABILITASI PERSONEL		
1	PEMBELIAN 27 KUE KOTAK @ RP.20.000,- (27 X RP.20.000,- X 2 HARI X 6 GIAT)	RP.6.480.000,-	
2	PEMBELIAN 27 NASI KOTAK @ RP.40.000,- (27 X RP.40.000,- X 2 HARI X 6 GIAT)	RP.12.960.000,-	
3	FC LAPORAN @ RP.250,- (24 LBR X 6 BUKU X 6 GIAT X RP.250,-)	RP.216.000,-	
4	PENJILIDAN LAPORAN @RP.15.000,- (6 BUKU X 6 GIAT X RP.15.000,-)	RP.540.000,-	
	TOTAL	RP.20.196.000,-	

Denpasar, 17 Nopember 2022

KASUBBAGREHABPERS BIDPROPAM POLDA BALI

I WAYAN SUKARITA, S.Sos
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 71040216

Lembar 9: Surat Permohonan Narasumber dr Psycologi & Nota Dinas
Permohonan Pemeriksaan Konseling Psikologi



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH BALI

Jalan W.R. Supratman, 7 Denpasar 80233

Denpasar, 14 Oktober 2024

Nomor : B/ 6849 /X/LIT.2.1/2024/Bidpropam

Klasifikasi: BIASA

Lampiran : satu lembar

Perihal : Nara sumber dalam acara Binlihprof

Kepada

Yth. 1. KEPALA BIRO SUMBER DAYA
MANUSIA POLDA BALI
2. KEPALA BIDANG
KEDOKTERAN DAN
KESEHATAN POLDA BALI

di

Tempat

1. Rujukan:

- a. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 22 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah;
- b. Kawat sandi Kepala Biro Pengamanan Internal Nomor: KS/BP-02/1/2017/Ropaminal tanggal 6 Januari 2017 tentang pendataan anggota Polri yang melakukan pelanggaran (KEPP dan Disiplin);
- c. Peraturan Kepala Divisi Pengamanan Polri Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 13 Juli 2017 tentang Tata Cara Rehabilitasi Personil Kepolnsian Negara Republik Indonesia;
- d. Surat Telegram Kapolri Nomor: ST/956/BIN./2022, tanggal 13 Mei 2022 perihal Pembinaan dan Pemulihan Profesi (Binlihprof) terhadap anggota Polri dan PNS Polri yang bermasalah;
- e. Program kerja Bidpropam Polda Bali T.A. 2024.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, agar Ka menunjuk bawahannya sebagai narasumber dalam kegiatan Pembinaan Rohani, mental dan pengetahuan profesi yang akan dilaksanakan pada tanggal 21 s.d. 25 Oktober 2024, diruang sidang Bidpropam Polda Bali, sebagaimana Surat Perintah Tugas terlampir.

3. Demikian untuk menjadi maklum.



Tembusan :

1. Kadivpropam Polri
2. Kapolda Bali,
3. Irwasda Polda Bali,
4. Karo SDM Polda Bali.

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH BALI
BIDANG PROFESI DAN PENGAMANAN

NOTA DINAS

Nomor : B/ND- 10 /9 /XI/WAS.2.4./2024/ Bidpropam

Kepada : Yth. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Polda Bali

Dari : Kepala Bidang Profesi dan Pengamanan Polda Bali

Hal : mohon bantuan pemeriksaan psikologi dan pemeriksaan agama .

1. Rujukan :

- a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri;
- c. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- d. Peraturan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri Nomor 1 Tahun 2015 tentang Standar Oprasional Prosedur Penyelidikan dan Pengamanan Internal Polri;
- e. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang pengamanan internal dilingkungan Polri;
- f. Laporan Informasi Nomor : R/LI-32/XI/2024/Subbidpaminal tanggal 11 November 2024 tentang adanya dugaan indikasi LGBT yang dilakukan oleh oknum anggota Polda Bali;
- g. Surat Perintah Tugas Kepala Bidang Profesi dan Pengamanan Polda Bali Nomor: Sprin/137/XI/WAS.2.4./2024 tanggal 11 November 2024 tentang melakukan penyelidikan terhadap laporan informasi Nomor : R/LI-32/XI/2024/Subbidpaminal tanggal 11 November 2024.

2. Sehubungan dengan rujukan di atas, dimohon kepada Ka agar memerintahkan anggota Bag Psikologi dan Bag Watpers untuk melakukan pemeriksaan terhadap anggota Polri yang diduga melakukan perilaku sex menyimpang, atas nama :

Nama : RUDY HARTONO
Pangkat/Nrp : AIPTU/68050440
Jabatan : BRIGADIR SATSAMAPTA
Kesatuan : POLRES BANDARA POLDA BALI

3. Demikian untuk menjadi maklum.

Denpasar, // November 2024

KEPALA BIDANG PROFESI DAN PENGAMANAN POLDA BALI

I KETUT AGUS KUSMAYADI, S.J.K., S.H.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 74080669

Tembusan :

1. Kapolda Bali.
2. Wakapolda Bali.



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH BALI
RUMAH SAKIT BHAYANGKARA DENPASAR

Denpasar, 20 Nopember 2024

Nomor : B/Speng-387X1/KES.15./2024/Rumkit
Klasifikasi: BIASA

Yth. KEPALA BIDANG
PROFESI DAN
PENGAMANAN POLDA
BALI


di

Tempat

SURAT PENGANTAR

NOMOR	ISI	BANYAKNYA	KETERANGAN
1.	Pengiriman Hasil pemeriksaan fisik dan psikiatri a.n. RUDY HARTONO AIPTU/68050440	dua eksemplar	Disampaikan dengan hormat untuk menjadi maklum.

KARUMKIT BHAYANGKARA DENPASAR


dr. M. FAIZAL ZULKARNAEN, Sp.KF., M.H.Kes., M.A.R.S.
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 75121205

Lembar 9: SOP Sistem Mediasi Masalah Dan Rehabilitasi Profesi

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH BALI
BIDANG PROFESI DAN PENGAMANAN

SOP SISTIM MEDIASI MASALAH BIDPROPAM POLDA BALI

NO	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA								MUTU BAKU			CEK LIST		
		PELAPOR	PAMIN & BAUR TRIMLAP	KAUR TRIMLAP	KASUBBAG YANDUAN	TEAM MEDIATOR	TERLAPOR	KABIDPROPAM	PARA KASUBBID	KELENGKAPAN	WKT	OUTPUT	SESUAI	TDK SESUAI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.	Menerima masyarakat datang langsung ke Sentra Pelayanan Propam Polda Bali	☐									Kertas	10 mnt	Menerima kedatangan pelapor di Sentra Pelayanan Propam Polda Bali		
2	Mencatat identitas pelapor dan terlapor		☐								Kertas	15 mnt	Memeriksa identitas pelapor		
3	Menerima laporan serta interview pelapor			☐							Kertas	30 mnt	Hasil identifikasi benar anggota Polri/ASN Polri Aktif		
4	Menerima hasil identifikasi laporan Kaurtrimlap					☐					Kertas	1 jam	Mengarahkan kaurtrimlap untuk mengkoordinasikan dengan		

8

NO	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA								MUTU BAKU			CEK LIST		
		PELAPOR	PAMIN & BAUR TRIMLAP	KAUR TRIMLAP	KASUBBAG YANDUAN	TEAM MEDIATOR	TERLAPOR	KABIDPROPAM	PARA KASUBBID	KELENGKAPAN	WKT	OUTPUT	SESUAI	TDK SESUAI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
5	Kasubbag yanduan bersama team mediator merapikan laporan masyarakat					☐					Dokumentasi dan kertas	30 Mnt	Menyampaikan persepsi		
6	Team mediator menemui pelapor dan terlapor	☐					☐				Kertas	1 jam	Kesepakatan mediasi		
7	Team mediator memfasilitasi dan mediasi pelapor dan terlapor							☐	☐		Kertas	2 jam	Tidak sepakat untuk berdamai		
8	Team mediator membuat laporan hasil mediasi ke Kabidpropam								☐		kertas	20 mnt	Menunggu disposisi Kabidpropam		
9	Menerima hasil disposisi Kabidpropam								☐		kertas	20 mnt	Tindak lanjut disposisi Ka		



Denpasar, 11 November 2024
KABIDPROPAM POLDA BALI

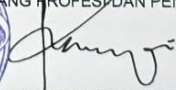
KETUT AGUS KUSMAYADI, S.I.K., S.H.
KOMBES POL NRP 74080669

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBINAAN DAN PEMULIHAN PROFESI POLRI BIDPROPAM POLDA BALI (BINLIHPROF)

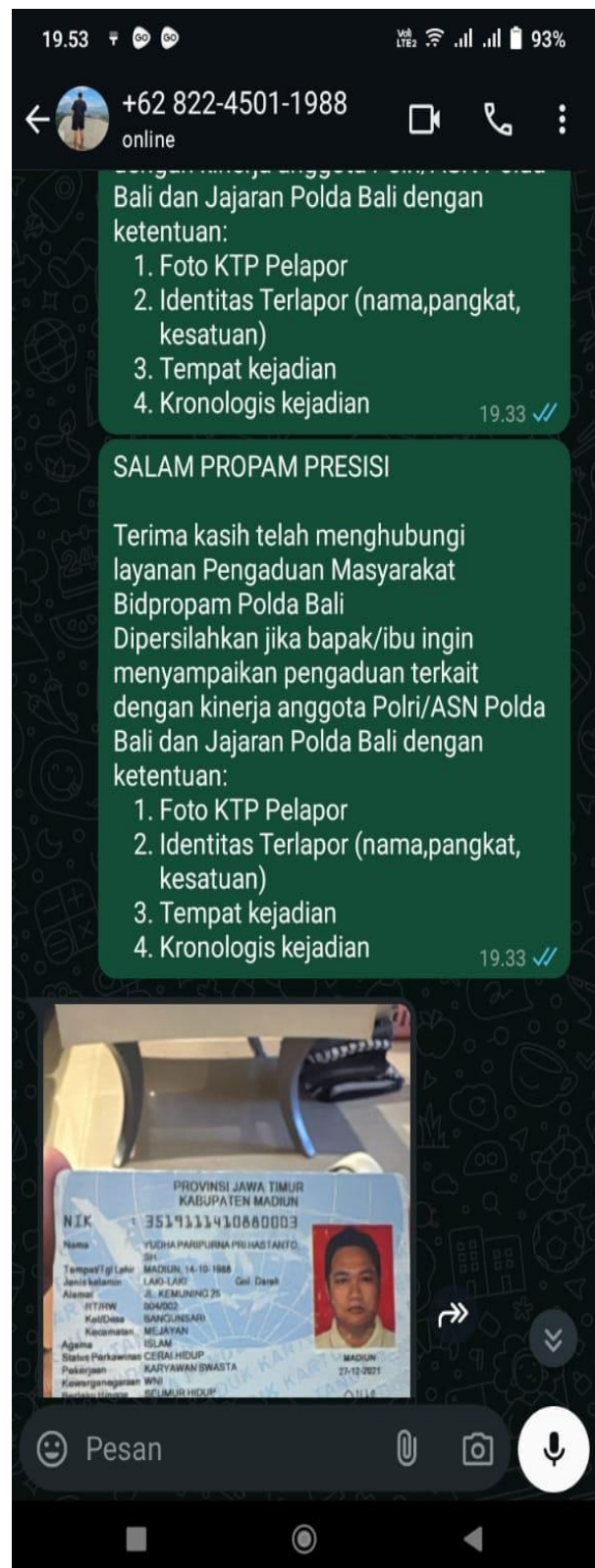
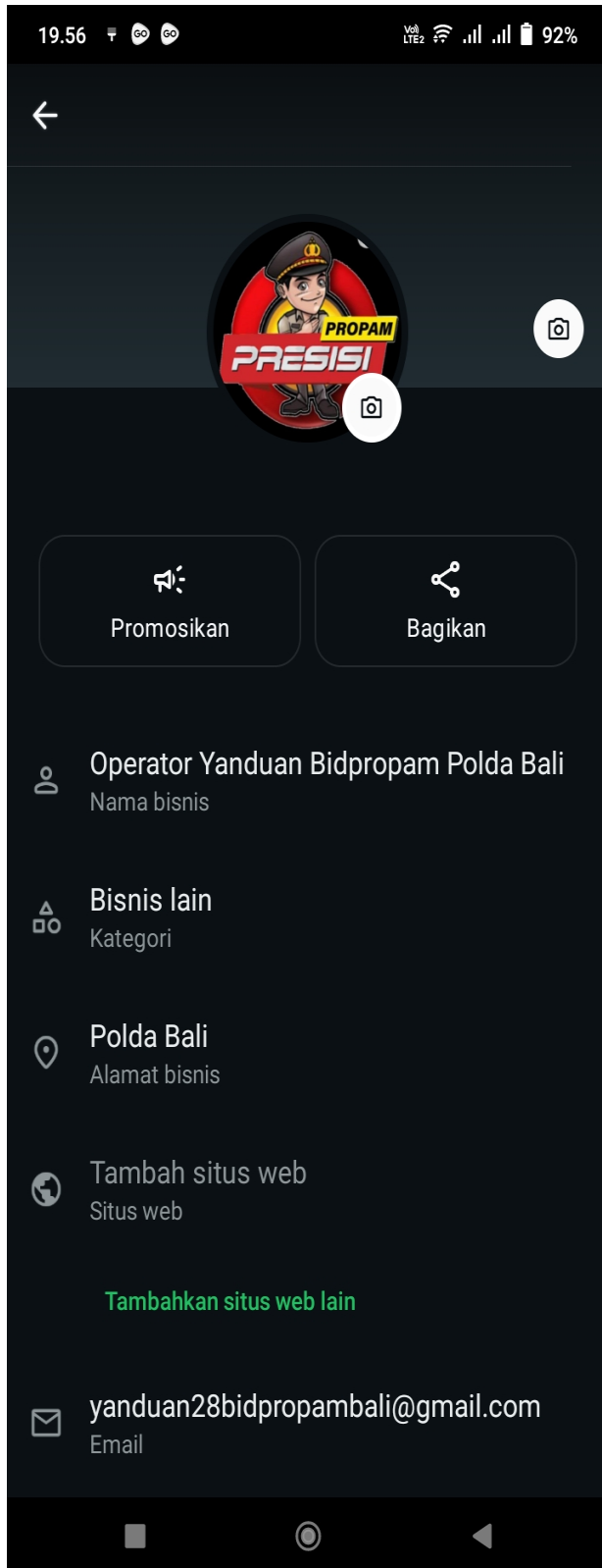
NO	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA								MUTU BAKU			CEK LIS	
		KABID PROPAM	KSB RENMIN	KAUR MINTU	KASUBAG REHAB	KAUR LEGLITAP	PAMIN LEGITAP	BAUR LEGLITAP	KSTKER/PO LRES JJR	PESE RTA BIN AAN	KELENG KAPAN	WKT	OUTPUT	SESU AI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	Membuat rencana kegiatan Pembinaan dan Pemulihan Profesi Polri diajukan kepada Kabidpropam dan Kabid Propam menyetujui dan meneruskan kpd Kasubbagrehab utk ditindak lanjuti.										Kertas	1 JAM	Mengajukan rengiat pembinaan dan pemulihan profesi Polri	

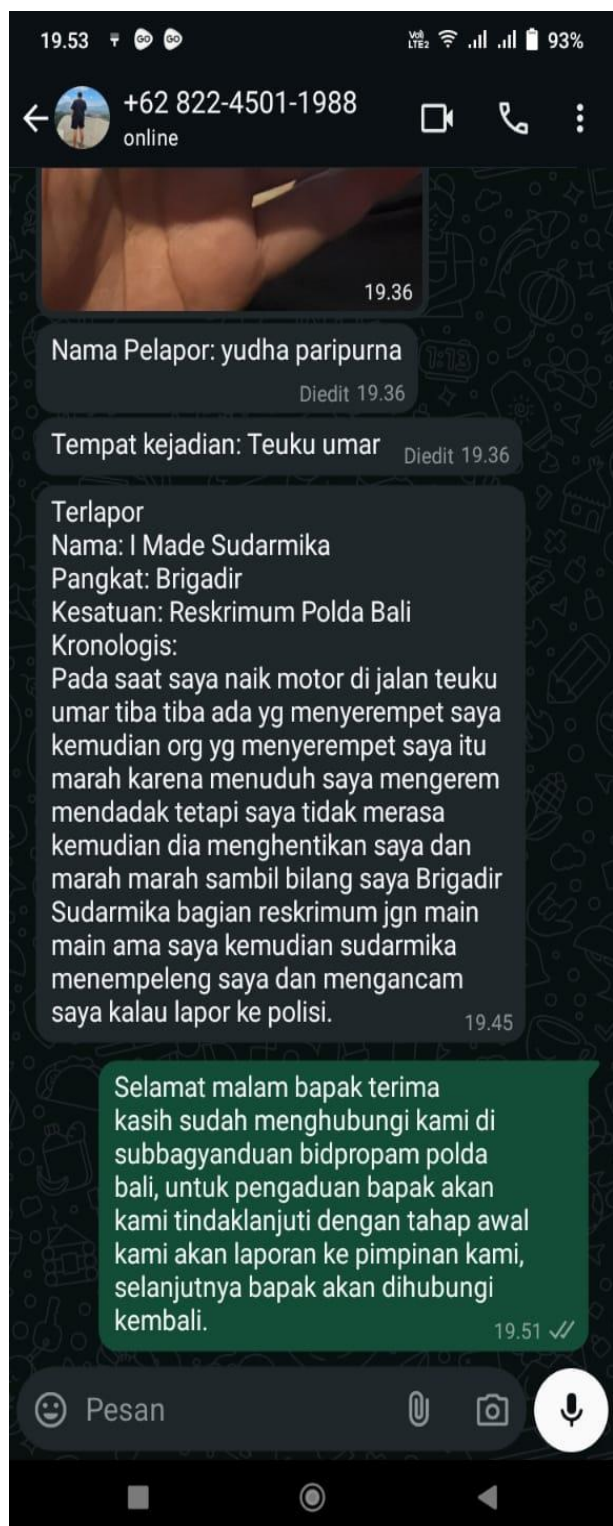
NO	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA								MUTU BAKU			CEK LIS	
		KABID PROPAM	KSB RENMIN	KAUR MINTU	KASUBAG REHAB	KAUR LEGLITAP	PAMIN LEGITAP	BAUR LEGLITAP	KSTKER/PO LRES JJR	PESE RTA BIN AAN	KELENG KAPAN	WKT	OUTPUT	SESU AI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
16	Kasatker menerima Laporan Pembinaan dan Pemulihan Profesi													
17	Mengarsipkan Laporan Pembinaan dan Pemulihan Profesi										arsip 15 mnt			

Denpasar, 11 November 2024
 KEPALA BIDANG PROFESI DAN PENGAMANAN POLDA BALI


 YKUTU'AGUS KUSMAYADI, S.I.K., S.H.
 KOMISARIS BESAR POLISI NRP 74080669

Lembar 10: Hotline Pelaporan Online Pelayanan Pengaduan Propam Melalui Aplikasi WA





RADAR BALI
Lintas Dewata

JURAGAL PETA | JUMAT 22 NOVEMBER TAHUN 2024 | HALAMAN 2

BALI MEMILIH



MEMANENKALAN Badan Pemungutan Kabupaten pasangan calon nomor urut 3, I Gusti Putu Parwata dan Pandu Prananda...

Tim Kubu Siap Menangkan Paslon Gus Par - Pandu

AMLAPURA, Radar Bali - Belawan dan tim pemungutan tingkat TPS se-Kecamatan Kubu, mempersiapkan kesiapannya untuk memonev...

Dihadiri Belasan Ribu Masyarakat, Antusias Teriakkan Dukungan Total ke Paket GP

AMLAPURA, Radar Bali - Kampanye putaran terakhir pasangan calon nomor urut 3, I Gusti Putu Parwata dan Pandu Prananda...



DUKUNGAN Kampanye terbuka Gus Par-Gus Par Pandu di Lapangan Cande Buana, Amlapura...

Demer, seraya mengajak para PEPAHU wajib mengawal kemenangan Gus Par-Pandu pada 27 November nanti...

sebagai pendukung Karangasem, tidak hanya sudah jadi kapolda dan di beberapa tempat sekiranya saya masih sayang...

Debat Pamungkas, Mulyadi-Ardika Tawarkan Program Satu Desa Satu Dokter untuk Atasi Kekerasan Seksual

TABANAN, Radar Bali - Debat pamungkas pasangan calon (paslon) Bupati dan Wakil Bupati Tabanan Rabu malam kemarin (20/11) kembali digelar...



INOVATIF Pasangan di Calon Bupati dan Wakil Bupati I Nyoman Mulyadi dan I Nyoman Ardika...

paslon yang diusung oleh KEM Plus jika terpilih menjadi Bupati Tabanan...

Strategi Peningkatan Pengawasan Melalui Sistem Mediasi Masalah dan Rehabilitasi Profesi di Propam Poldabali

Dalam mewujudkan Polri yang Presisi, Biro Propam Poldabali atau Institut Kasubbid PAMMAL, AKBP Nanang Pri Hastomo, S.T., S.H., M.H. membuat proyek perubahan dengan judul Strategi Peningkatan Pengawasan Melalui Sistem Mediasi Masalah dan Rehabilitasi Profesi di Propam Poldabali...

adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan dan menyetujui kriteria kesepakatan...

target kegiatan, diperlukan sinergi antar stakeholder baik dari internal atau eksternal (dari Organisasi, Media dan PEM TND), kemampuan yang visioner, keberanian mengambil...

Infographic titled 'STRATEGI PENINGKATAN PENGAWASAN MELALUI SISTEM MEDIASI MASALAH & REHABILITASI PROFESI DI PROPAM POLDA BALI'. It includes a flowchart showing the process from 'Peningkatan Pengawasan' to 'Sistem Mediasi Masalah & Rehabilitasi Profesi' and 'Peningkatan Pengawasan'. It also features a table with data and a QR code.

Social media post for 'nanang prihastomo' with 262 likes and 134 comments. The post content is the infographic from the previous block. It includes a 'Bagikan' button, a 'Download' button, and a 'Komentar 82' section with a 'Tambahkan komentar...' input field.



Narasi Implementasi Dalam Terobosan Kreatif: Strategi Peni...

Oleh: AKBP Nanang Pri Hasmoko. ST. ...
radarbali.jawapos.com

<https://radarbali.jawapos.com/bali/705339442/narasi-implementasi-dalam-terobosan-kreatif-strategi-peningkatan-pengawasan-lewat-sistem-mediasi-masalah-rehabilitasi-profesi-di-propam-polda-bali>



STRATEGI PENINGKATAN PENGAWASAN MELALUI SISTE...

FREKUENSI MEDIA INDONESIA COM B...
frekuensimediabali.com

<https://frekuensimediabali.com/2024/11/21/strategi-peningkatan-pengawasan-melalui-sistem-mediasi-masalah-dan-rehabilitasi-profesi-di-propam-polda-bali/>

10 00

